

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH KOMPETENSI, PARTISIPASI
ANGGARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANGKA BARAT)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen dalam ilmu Manajemen
Bidang Minat Manajemen Keuangan**

Disusun Oleh :

M. ZUCHRI SATRIYO

NIM. 016093323

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Anggaran dan Pembelajaran Organisasi pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat)” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang.....

Yang menyatakan




M. ZUCHRI SATRIYO

NIM. 016093323

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI, PARTISIPASI ANGGARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI PADA KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat)

zuchrisatriyo@yahoo.com
Universitas Terbuka

Kata kunci : Keuangan Daerah, Kompetensi, Partisipasi Anggaran, Pembelajaran Organisasi, Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara kompetensi, partisipasi anggaran, dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat.

Penelitian adalah penelitian eksplanatori dengan menggunakan metode survey. Subjek penelitian adalah seluruh PNS yang berdinasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan dari bulan Februari sampai dengan Juli 2011 dengan jumlah responden sebanyak 37 orang PNS. Metode sampling untuk menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan metode sampel jenuh atau sensus karena jumlah populasi yang relatif sedikit. Dengan demikian keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian. Metode analisis data adalah dengan menggunakan metode regresi sederhana dan regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dari kompetensi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 0,652 artinya 65,2%, keragaman variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh kompetensi, sedangkan sisanya 34,8% disebabkan oleh faktor lain. Pengaruh partisipasi anggaran PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 0,633 artinya 63,3%, keragaman variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh partisipasi anggaran, sedangkan sisanya 36,7% disebabkan oleh faktor lain. Pengaruh pembelajaran organisasi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 0,671 artinya 67,1% keragaman variabel kinerja PNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh pembelajaran organisasi, sedangkan sisanya 32,9% disebabkan oleh faktor lain.

Pengaruh dari kompetensi teknis, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 0,802

artinya 80,2% keragaman variabel kinerja PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi, sedangkan sisanya 19,8% disebabkan oleh faktor lain.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa faktor kompetensi PNS berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, faktor partisipasi anggaran PNS berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, faktor pembelajaran organisasi PNS berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah serta faktor kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi PNS secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Universitas Terbuka

ABSTRACT

EFFECT OF COMPETENCE, BUDGET PARTICIPATION AND LEARNING ORGANIZATION IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT PERFORMANCE (Case Study at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency)

zuchrisatriyo@yahoo.com
Open University of Indonesia

Keywords: Public Finance, Competence, Budgetary Participation, Organizational Learning, Performance of Regional Financial Management.

This study aimed to evaluate the effect of competence, budgetary participation, and organizational learning on the performance of regional financial management at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency.

The research is explanatory research using survey methods. The subjects were all the civil servants/ public officer (PNS) who served on the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency where the research was conducted. The research was conducted over six months from February to July 2011 with the number of respondents as many as 37 people for public officer. Sampling method to determine the number of samples is by using saturated sample or population census due to the relatively small amount of the overall population is became research sample. Reliability and validity tests used to determine the validity of the questionnaires. Data was analyzed analysis method is by using simple regression and multiple regression.

The results showed that the influence competence of public officer on the performance of regional financial management at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency amounts to 0.652 means that 65.2% of diversity performance variables public officer at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency caused by the competence, while the remaining 34.8% is caused by other factors.

The influence budgetary participation of public officer on the performance of regional financial management at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency amounts to 0.633 means that 63.3% of diversity performance variables public officer at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency caused by the budgetary participation, while the remaining 36.7% is caused by other factors.

The influence organizational learning of public officer on the performance of regional financial management at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency amounts to 0.671 means that 67.1% of diversity performance variables public officer at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency caused by the organizational learning, while the remaining 32.9% is caused by other factors.

The influence of technical competence, budgetary participation and organizational learning work together on the performance of public officer in regional financial management at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency amounts to 0.802 means that 80.2% of diversity performance variables public officer at the Department of Revenue, Finance and Asset Management of West Bangka Regency caused by the competence, budgetary participation and organizational learning, while the remaining 19.8% is caused by other factors.

In conclusion, this study proves that the competence of public officer factor affects the performance of regional financial management, the budgetary participation of public officer factor affects the performance of regional financial management, the organizational learning of public officer factor affects the performance of regional financial management, as well as competence, budgetary participation and organizational learning of public officer work together factor affects the performance of regional financial management.

Universitas Terbuka

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Anggaran dan Pembelajaran Organisasi pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat)

NAMA : M. Zuchri Satriyo

NIM : 016093323

PROGRAM STUDI : Magister Manajemen (MM)

Menyetujui,

Pembimbing I,

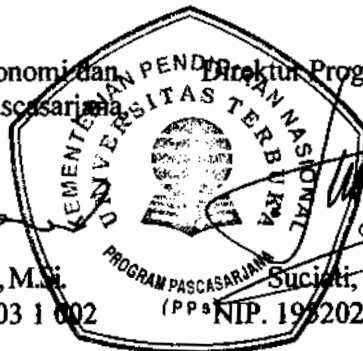
Dr. Timotius, SE, MM.
NIK. 060603578

Pembimbing II,

Dr. Ir. Wahyuni Kadarko, M.Ed.
NIP. 19470519 198603 2 001

Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen Program Pascasarjana, dan Direktur Program Pascasarjana,

Drs. C.B. Supartomo, M.Si.
NIP. 19521022 198203 1 002



Suciati, M.Sc., Ph.D.
(PPS) NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : M. Zuchri Satriyo
 NIM : 016093323
 Program Studi : Magister Manajemen
 Judul TAPM : Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Anggaran dan Pembelajaran Organisasi pada Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Terbuka pada :

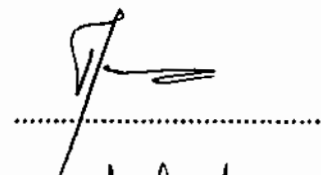
Hari/Tanggal : Sabtu, 26 November 2011

Waktu : 10.00 s.d. 12.30 WIB

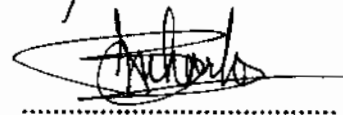
Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

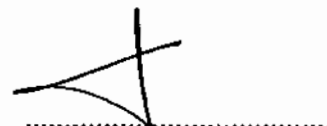
Ketua Komisi Penguji :
 Dr. Tita Rosita, M.Pd.



Penguji Ahli :
 Dr. F.X. Bambang Wiharto, MM



Pembimbing I :
 Dr. Timotius, SE, MM.



Pembimbing II :
 Dr. Ir. Wahyuni Kadarko, M.Ed.



KATA PENGANTAR

Hampir semua aktifitas penulisan tesis -sampai batas tertentu- bersifat parasit. Mengakui suatu usaha seperti ini, yang mencoba menyerap lautan pengetahuan orang lain dan menyaringnya ke dalam tempat yang kecil, sebagai kerja satu orang saja, tak berarti lain kecuali kelancangan atau bahkan dusta. Dengan kata lain, tak mungkin bagi penulis sendiri dapat melakukan penulisan tesis ini tanpa bantuan orang banyak. Terlebih lagi selama ‘masa perjuangan’ penulisan. Kesibukan penulis terdiktomi kedalam upaya ‘mengabdikan republik’, sebagai pelayan masyarakat, berdampingan dengan status penulis sebagai mahasiswa yang dikejar batas waktu akhir perkuliahan.

Untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak – pihak tersebut dibawah ini,

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M. Ed., Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka.
2. Dr. Suciati, M.Sc., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
3. Ir. H. Eko Maulana Ali, S.AP., M.Sc., selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang telah mendukung dalam kesempatan belajar di UPBJJ Universitas Terbuka Pangkalpinang.
4. Ust. Zuhri Al Syazali, Lc., M.A., selaku Bupati Bangka Barat.
5. H. Abdul Muin, S.IP., MAP., selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Manajemen Universitas Terbuka Jakarta. disela pekerjaan penulis sebagai birokrat di Kabupaten Bangka Barat.

6. Drs. C.B. Supartomo, M.Si., selaku Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta.
7. Dr. Maman Rumanta, M.Si., selaku Ketua Universitas Terbuka Pangkalpinang.
8. Dr. Timotius, SE., MM., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan untuk penyelesaian tesis ini.
9. Dr. Ir. Wahyuni Kadarko, M. Ed., selaku Pembimbing II dimana telah dengan sabar dan penuh perhatian bersedia meluangkan waktunya yang padat hanya untuk mendengarkan, membaca, mengoreksi serta memberikan banyak saran dan kritik bagi terselesaikannya tesis ini.
10. Para Dosen dan segenap Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Manajemen Angkatan I (Pertama) Universitas Terbuka Jakarta UPBJJ Pangkalpinang.
11. Ayahanda dan Ibunda penulis yang dengan cinta, keikhlasan dan doanya telah menjadi penopang kekuatan bagi penulis.
12. Sahabat penulis, Abimayu, Herry Indarto, Sari Dwi Estari, Latifah Dewi, Ferdinand, Ibu Mardiana, Miwani, terima kasih atas perhatiannya semua.
13. Adinda Asfi Hanni yang dengan keluguan semangat ingin membantunya ternyata malah menjadi 'maskot pendorong' bagi penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
14. Seluruh saudara dan teman penulis di Universitas Terbuka Jakarta UPBJJ Pangkalpinang yang secara khusus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih, karena tanpa nasehat, dorongan, masukan yang tak kenal lelah agaknya tesis ini akan terlalu sulit untuk diselesaikan.

Diatas segala – galanya, ungkapan syukur tertuju kepada Allah SWT, yang telah berkenan menganugrahkan karunia kesempatan yang tidak ternilai kepada penulis untuk mempelajari dan menstudi setitik air dalam luasan samudera Sabda dan Karya-Nya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Muntok, Maret 2011

Penulis

M. Zuchri Satriyo

NIM. 016093323

Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
a. Keuangan Negara	10
b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Hubungan Antar Tingkat Pemerintahan (<i>Level of Government Relationship</i>)	12
c. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	17
d. Anggaran	18
e. Sumber Pendapatan Daerah di Indonesia.....	20
1). Pendapatan Asli Daerah	20
2). Dana Alokasi Umum.....	27
3). Dana Alokasi Khusus	31
4). Dana Bagi Hasil.....	34
5). Dana Transfer Pemerintah Provinsi.....	37
2. Kompetensi.....	40
3. Partisipasi Anggaran.....	43
4. Pembelajaran Organisasi.....	45

5. Kinerja.....	49
B. Penelitian Terdahulu.....	51
C. Kerangka Berfikir.....	53
D. Hipotesis Penelitian.....	60
E. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel.....	60
1. Definisi Operasional.....	60
2. Metode Pengukuran Variabel.....	68
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	69
A. Desain Penelitian.....	69
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	69
2. Jenis Penelitian.....	69
B. Populasi dan Sampel.....	71
C. Instrumen Penelitian.....	71
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	73
E. Metode Analisa Data.....	74
F. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat.....	78
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Hasil Penelitian.....	84
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	118
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	140
A. Simpulan.....	140
B. Saran.....	142
C. Keterbatasan Penelitian.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Persentase Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)	.. 36
Tabel 2.2	: Persentasi Bagi Hasil Pajak Provinsi	.. 39
Tabel 2.3	: Penelitian Sebelumnya	.. 52
Tabel 2.4	: Operasional Variabel Bebas Kompetensi Teknis (X_1)	.. 65
Tabel 2.5	: Operasional Variabel Bebas Partisipasi Anggaran (X_2)	.. 66
Tabel 2.6	: Operasional Variabel Bebas Pembelajaran Organisasi (X_3)	.. 66
Tabel 2.7	: Operasional Variabel bebas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	.. 67
Tabel 2.8	: Operasionalisasi Variabel	.. 68
Tabel 3.1	: Jadwal Penelitian	.. 69
Tabel 4.1	: Pertumbuhan PAD Kab. Bangka Barat 2004 - 2010	.. 79
Tabel 4.2	: Pertumbuhan DAU Kab. Bangka Barat 2004 - 2010	.. 80
Tabel 4.3	: Pertumbuhan DAK Kab. Bangka Barat 2004 - 2010	.. 81
Tabel 4.4	: Pertumbuhan DBH Kab. Bangka Barat 2004 - 2010	.. 82
Tabel 4.5	: Pertumbuhan DTTP Kab. Bangka Barat 2004 - 2010	.. 83
Tabel 4.6	: Skor Frekuensi Data Variabel Kompetensi (X_1)	.. 85
Tabel 4.7	: Distribusi Frekuensi Data Variabel Kompetensi (X_1)	.. 85
Tabel 4.8	: Skor Frekuensi Data Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)	.. 86
Tabel 4.9	: Distribusi Frekuensi Data Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)	.. 87
Tabel 4.10	: Skor Frekuensi Data Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)	.. 88
Tabel 4.11	: Distribusi Frekuensi Data Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)	.. 89
Tabel 4.12	: Skor Frekuensi Data Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	.. 90
Tabel 4.13	: Distribusi Frekuensi Data Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	.. 91
Tabel 4.14	: Koefisien Reliability Variabel Kompetensi (X_1)	.. 93
Tabel 4.15	: Koefisien Reliability Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)	.. 93
Tabel 4.16	: Koefisien Reliability Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)	.. 93
Tabel 4.17	: Koefisien Reliability Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	.. 93
Tabel 4.18	: Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Variabel Kompetensi (X_1)	.. 95
Tabel 4.19	: Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)	.. 96
Tabel 4.20	: Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)	.. 97
Tabel 4.21	: Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	.. 98

Tabel 4.22	: Durbin - Watson	.. 101
Tabel 4.23	: Tolerance - VIF	.. 102
Tabel 4.24	: ANOVA ^b	.. 105
Tabel 4.25	: Coefficient ^a	.. 106
Tabel 4.26	: Model Summary ^b	.. 106
Tabel 4.27	: ANOVA ^b	.. 108
Tabel 4.28	: Coefficient ^a	.. 109
Tabel 4.29	: Model Summary ^b	.. 109
Tabel 4.30	: ANOVA ^b	.. 111
Tabel 4.31	: Coefficient ^a	.. 112
Tabel 4.32	: Model Summary ^b	.. 112
Tabel 4.33	: ANOVA ^b	.. 114
Tabel 4.34	: Coefficient ^a	.. 115
Tabel 4.35	: Model Summary ^b	.. 117

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Variabel dan Hasil Akhir Penelitian	... 58
Gambar 2.2	: Kerangka Pemikiran	... 58
Gambar 2.3	: Kerangka Pemikiran Penelitian	... 59
Gambar 2.4	: Hubungan Antar Variabel Penelitian	... 67
Gambar 4.1	: Histogram Frekuensi Variabel Kompetensi (X_1)	... 86
Gambar 4.2	: Histogram Frekuensi Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)	... 87
Gambar 4.3	: Histogram Frekuensi Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)	... 89
Gambar 4.4	: Histogram Frekuensi Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	... 91

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Peta Muntok Ibukota Kabupaten Bangka Barat151
Lampiran 2	: Analisis Hasil Regresi152
Lampiran 3	: Surat Permohonan Kuesioner172
Lampiran 4	: Kuesioner173
Lampiran 5	: Daftar Istilah178

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengelolaan sistem kenegaraan di Indonesia, UUD 1945 termasuk amandemennya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa *sesungguhnya memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, yang dalam pelaksanaannya tetap berlandaskan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).*

Dengan terjadinya perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai perubahan undang – undang tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan termasuk didalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah.

Ide dasar yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang – undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Semua ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan termasuk PNS di daerah (Mahmudi,2007).

APBD yang ditetapkan setiap tahun melalui Perda, merupakan wujud dari

pengelolaan keuangan di daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Hal ini disebabkan karena APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pengaturan tahap demi tahap pengelolaan keuangan daerah melalui APBD, dilaksanakan melalui tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan, tahap evaluasi serta tahap pembinaan.

Kewenangan besar yang dimiliki hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas jika diikuti perbaikan kemampuan profesional dari aparatnya. Profesionalisme menjadi syarat penting bagi keberhasilan otonomi daerah. Kualitas aparatur pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya DPRD sangat menentukan mudah dan tidaknya penerapan pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan profesionalisme aparat pemerintah kabupaten dan kota menjadi salah satu isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Dwiyanto *dkk*,2003).

Pada proses pengelolaan keuangan daerah selanjutnya, penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan perundang - undangan tersebut. Penatausahaan keuangan daerah mencakup penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Pada penatausahaan penerimaan yang menjadi fokus penelitian ini, aktivitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan pada pendapatan daerah yaitu semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang relatif baru dimekarkan pada tahun 2003 dan dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten

Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 Mei 2003. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bangka Barat yang diberi nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dinas PPKA), merupakan penggabungan antara bagian dan dinas pada SKPD ditahun 2008 yaitu Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bangka Barat.

Pengelolaan seluruh pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat dilakukan di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Pengelolaan PAD yang secara teknis dilakukan pada SKPD yang memiliki PAD, secara keseluruhan pengelolaan pendapatannya juga dilakukan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terdiri atas kelompok sosial yang memiliki karakteristik dan latar belakang pendidikan yang berbeda yang tergabung dalam beberapa hirarki lini jabatan dan staf.

Tingkat pendidikan PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 3 orang PNS yang berpendidikan pascasarjana (S2), 19 orang PNS yang berpendidikan sarjana (S1), 1 orang PNS yang berpendidikan Sarjana Muda/Akademi (D3), 14 orang PNS yang berpendidikan SLTA Umum. Untuk tingkat pendidikan doktoral (S3), SLTP Umum dan Sekolah Dasar (SD), Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki PNS dengan basis pendidikan tersebut.

PNS menurut tingkat pendidikan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terdiri dari golongan kepangkatan yang berbeda. Dari 37 orang jumlah PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, jumlah PNS yang memiliki golongan kepangkatan IV (Golongan IV) berjumlah 2 orang. PNS yang memiliki golongan

kepangkatan III (Golongan III) berjumlah 20 orang. Dan PNS yang memiliki golongan kepangkatan II (Golongan II) berjumlah 15 orang.

Dari data di atas diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat secara umum termasuk baik, dikarenakan PNS yang berdinasi di Dinas PPKA memiliki pendidikan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari 23 orang PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat memiliki gelar akademis kesarjanaan, dan berarti lebih dari separuh dari keseluruhan jumlah PNS. Sedangkan dari segi golongan kepangkatan terlihat lebih dari separuh PNS yang berdinasi di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terdiri dari golongan III dan IV.

Dengan latar belakang pendidikan yang baik tersebut seharusnya PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat mempunyai pemahaman yang baik terhadap tugas terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan fungsi Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan merupakan puncak hirarki fungsional terhadap seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Anggaran Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, Bapak Abimayu, SE, Ak, M.Ec.Dev., dan beberapa staf bidang keuangan Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, didapat kesimpulan sementara bahwa pentingnya pemahaman dan pengetahuan PNS terkait pada pengelolaan keuangan daerah berupa penatausahaan pendapatan, agar pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat khususnya pada penatausahaan penerimaan lebih maksimal kedepan.

Dalam penatausahaan pendapatan dan guna meningkatkan pendapatan

daerah dibutuhkan partisipasi anggaran terutama dalam penganggaran pendapatan daerah. Sasaran yang harus dicapai adalah faktor penting dalam partisipasi anggaran, daerah harus menganggarkan pendapatan daerah yang tinggi dan berkomitmen untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pada PAD partisipasi anggaran diperlukan untuk pencapaian sasaran PAD yang tinggi.

Begitu juga untuk merealisasikan anggaran dari pemerintah provinsi berupa DBH pajak provinsi dan Dana Bantuan (DABA) provinsi, partisipasi anggaran dibutuhkan untuk mencapai sasaran agar mengalami peningkatan dari segi pendapatan ditahun – tahun berikutnya melalui efektifitas anggaran.

Pada penerimaan daerah berupa dana transfer dari pemerintah pusat, partisipasi anggaran dibutuhkan karena pada DAU, pagu dari pemerintah pusat disusun berdasarkan data aktual dari pemerintahan daerah sebagai dasar perhitungan. Disinilah adanya partisipasi anggaran dari PNS daerah kepada pemerintah pusat. Dana transfer pemerintah pusat lainnya seperti DAK dan DBH, partisipasi anggaran dibutuhkan untuk merealisasikan dana transfer tersebut agar jumlah pagu yang diberikan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dapat terealisasikan seluruhnya.

Pembelajaran organisasi diperlukan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada pendapatan dapat berjalan dengan baik, dan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Partisipasi anggaran dan pembelanjaran organisasi pada Dinas PPKA harus didukung oleh kinerja PNS yang memiliki kompetensi tinggi. Sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bangka Barat, dan akhirnya dapat memberikan efek positif pada keuangan negara.

Pengelolaan keuangan pusat dan daerah masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama disebabkan oleh faktor teknis dan keterbatasan sumber daya manusia (Nasution,2009). Subjek penelitian ini pada akhirnya berpijak pada kajian bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia memiliki kelemahan yang cukup mendasar terutama sumber daya manusia yang profesional.

Kondisi faktual pada pemerintahan daerah di Indonesia dapat dijadikan bahan perbandingan bahwa masih sedikitnya pengelola keuangan daerah dalam hal ini PNS daerah yang mengerti terhadap laporan keuangan khususnya pendapatan daerah dan memiliki basis pendidikan akuntansi atau manajemen keuangan sebagai penunjang pengelolaan keuangan daerah (Tuasikal,2007).

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada kinerja keuangan berupa pendapatan daerah yang meliputi PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP yang masuk ke kas daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode tahun anggaran 2004 sampai dengan 2010 hubungannya dengan kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Dikarenakan seringkali terjadi perubahan dalam peraturan perundang – undangan oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam hal ini pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dimana variabel diatas (kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi) merupakan ukuran keberhasilan Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dalam mengimplementasikan peraturan perundang – undangan tersebut.

Lingkup penelitian ini dipilih Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dengan alasan bahwa *center* pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bangka Barat

terdapat pada instansi / SKPD tersebut, dimana Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menaungi 30 (tiga puluh) SKPD yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat, sehingga sangat representatif untuk memenuhi keterwakilan penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Kemampuan Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat untuk tetap memperbaharui pengetahuannya melalui kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi, penting untuk sekarang ini dan dimasa yang akan datang.

Griffin (2002) menggambarkan kinerja sebagai upaya organisasi menjadi efektif dengan menunjukkan tingkat produktivitas outputnya, yang diperoleh melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.

Penjelasan diatas dapat memberikan asumsi bahwa kompetensi, partisipasi anggaran, pembelajaran organisasi dan kinerja adalah unsur yang berfungsi membentuk perilaku seseorang maupun perilaku organisasi dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya dalam proses pengelolaan keuangan khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pada akhirnya masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut *Bagaimanakah pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat ?*.

Secara spesifik, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah partisipasi anggaran PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah pembelajaran organisasi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah ?
4. Apakah kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi PNS secara bersama-sama memberikan pengaruh yang nyata terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengukur pengaruh kompetensi PNS terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ?
2. Mengukur pengaruh partisipasi anggaran PNS terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ?
3. Mengukur pengaruh pembelajaran organisasi PNS terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ?
4. Mengukur pengaruh kinerja PNS terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagi penulis, dapat menjadi sarana untuk memperkaya pengetahuan dan referensi mengenai ilmu manajemen keuangan. Khususnya keuangan daerah.
2. Dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terutama pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pengambilan kebijakan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kompetensi dan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan.
3. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada era desentralisasi dan sistem anggaran berbasis kinerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Keuangan negara

Keuangan negara atau “*public finance*” merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan – kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta pengaruhnya dalam perekonomian.

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang cukup besar peranannya dalam mengatur kegiatan perekonomian serta dalam pengadaan barang dan jasa publik. Belanja modal publik tersebut ada yang bermanfaat dan mempunyai eksternalitas nasional, regional maupun berskala lokal. Musgrave and Musgrave (2004:7) mengemukakan tiga fungsi pemerintah sebagai berikut :

“The provision social good of the process by which total resource used divided between private and social goods and by which the mix of social goods is choosen. This maybe termed the allocation fuction of budgetary policy.

Adjustment of the distribution of income and wealth or the distribution fungction and,

The use of budget policy as means of maintaining high employment a reasonable degree of price level stability, and an appropriate of economic growth. Also there is the objective of stability in the balance of payment. All these we refer to as the stabilization function”.

Dari uraian diatas dapat secara singkat dikatakan ada tiga fungsi

pemerintah menurut Musgrave (2007:6) sebagai berikut : (a) fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan barang – barang sosial, mengatur pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, serta bagaimana menentukan komposisi barang sosial. (b) fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah untuk mengatur pendapatan dan kekayaan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya keadilan dan pemerataan. (c) fungsi stabilisasi berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah sebagai alat untuk mengatur perekonomian seperti tingkat stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran.

Dalam literatur keuangan negara (*public finance*), istilah publik atau *public* dapat diartikan pemerintah (*government*). Dalam arti luas istilah publik tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja, tetapi menggambarkan pula *utility* (yang menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak) seperti perusahaan kereta api, telepon, listrik dan air minum. Di luar negeri perusahaan *utility* tidak selalu dimiliki oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan *public finance* (keuangan negara) yang dijelaskan sebelumnya merupakan interpretasi dalam arti sempit yakni *government finance* (keuangan pemerintah), sedangkan mengenai arti *finance* (keuangan) dimaksudkan adalah segala kegiatan pemerintah di dalam mencari sumber dana (*source of fund*) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of fund*) untuk mencapai tujuan pemerintah. Jadi keuangan negara mencerminkan

kegiatan pemerintah yang berada dalam sektor publik (*public sector*), bukan berada dalam sektor swasta (*private sector*), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan swasta.

Kegiatan pemerintah di sektor publik banyak ditentukan oleh keputusan yang bersifat politis. Pemerintah harus memperhatikan preferensi para pemilih (*voters*) yang memilih orang – orang yang akan duduk di pemerintahan.

b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Hubungan Antar Tingkat Pemerintahan (*Level of Government Relationship*)

Publik finance atau *public sector* disebagian besar negara tidak dikelola sebagai suatu kesatuan atau terpusat melainkan terdapat pada berbagai tingkat pemerintahan, dimana masing – masing mempunyai fungsi atau kewenangan dalam menarik pajak. Sebagai contoh di negara Amerika Serikat (USA), dan Australia ada beberapa tingkat pemerintahan yaitu *federal government*, *state government*, *local government*, *municipality* dan *special function districts*.

Sistem pemerintahan yang bertingkat mengakibatkan adanya suatu hubungan fiskal antara pemerintahan yang lebih tinggi dengan pemerintahan yang lebih rendah atau disebut *fiscal federalism* atau *central/ local government relation*.

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi pemerintahan itu seharusnya dilaksanakan diberbagai tingkat pemerintahan. Suatu sentralisasi pemerintahan dapat dilaksanakan pada tingkat pemerintahan pusat dan ini akan memadai kalau diterapkan di negara dengan luas

wilayah yang kecil seperti Singapura. Kalau negara yang wilayahnya luas seperti Republik Indonesia maka desentralisasi diperlukan.

Desentralisasi di Indonesia terjadi pada kebijaksanaan keuangan negara dan daerah yang tercermin pada kebijakan fiskal anggaran daerah. Due dalam Wijaya (2009), mengemukakan tentang tiga tujuan kebijaksanaan fiskal, yaitu :

Pertama, untuk menjamin agar laju pertumbuhan ekonomi dapat sesuai dengan potensinya. Ini berarti kebijakan fiskal akan diusahakan seoptimal mungkin agar potensi ekonomi yang ada didaerah tersebut dapat direalisasikan.

Kedua, untuk mengusahakan terbukanya kesempatan kerja.

Ketiga, mengusahakan agar harga berada dalam tingkat wajar dan selalu dalam keadaan stabil sehingga memungkinkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan fiskal antar tingkat pemerintahan disuatu negara mengandung arti adanya alokasi dana untuk menunjang kegiatan pemerintahan pada tingkatan – tingkatan tersebut.

Dengan demikian hubungan fiskal antar pemerintahan baru muncul apabila suatu negara mempunyai wilayah yang sangat luas sehingga pemerintahan harus dipecah agar efisien atau *fragmentasi* berlapis, seperti di USA (Amerika Serikat) dengan *federal government, state government, local government*, dan *municipality*. Sedangkan di Indonesia ada pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa.

Dilihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa hubungan fiskal meliputi sumber – sumber pembelanjannya, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana penggunaan dana tersebut, dan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah cara penetapan pola pembagian dana untuk berbagai kegiatan pemerintahan di pusat dan daerah.

Keuangan negara dan daerah pada berbagai tingkat pemerintahan dilaksanakan berdasarkan suatu sistem yang disebut hubungan keuangan pusat dan daerah. Manan (2002) menjelaskan, dimanapun keuangan negara selalu ada dalam kekuasaan pemerintah pusat. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian yang diserahkan pusat kepada daerah atau yang dibenarkan digali oleh daerah. Tanpa penyerahan atau pembenaran oleh pusat, daerah tidak dapat menciptakan sendiri keuangan daerah seperti memungut, meminjam apalagi mencetak uang. Inilah inti hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Keuangan menyangkut kewajiban rakyat banyak, maka segala sesuatu mengenai uang termasuk hubungan keuangan antara pusat dengan daerah harus diatur dengan undang-undang.

Potensi daerah berbeda-beda, ada daerah yang memiliki *financial resources* yang cukup bahkan banyak, tetapi kurang pada unsur lain seperti *human resources* (jumlah dan mutu). Ada pula daerah yang dalam keadaan sebaliknya, memiliki *human resources* yang memadai tetapi kurang pada *financial resources*-nya. Bahkan mungkin ada daerah yang memiliki dengan cukup kedua sumber tersebut atau kurang untuk kedua-duanya.

Jika permasalahan tersebut tidak diatur dan dikelola secara nasional dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antar daerah. Untuk itu harus ada mekanisme baik yang didasarkan pada *national public policy* maupun mekanisme antar daerah itu sendiri yang memungkinkan terjadinya aliran *resources* sehingga dapat memberikan manfaat terhadap semua daerah di Indonesia. Walaupun demikian, pada pengelolaan keuangan daerah, ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin tinggi, menurut Manan (2002) ini terjadi dikarenakan :

- (1) Upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya semakin besar dan luas, hal ini disesuaikan dengan perkembangan tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kecenderungan pemerintah pusat untuk menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintahan daerah.
- (2) Keterbatasan sumber keuangan daerah, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya pembaharuan yang mendasar tentang sumber pendapatan daerah di Indonesia. Sumber – sumber pendapatan tersebut dikarenakan perkembangan dan keadaan daerah yang berbeda menjadi tidak efektif.
- (3) Kepada pemerintah daerah, pemberian subsidi lebih dipilih oleh pemerintah pusat dari pada penyerahan sumber pendapatan. Hal ini disebabkan melalui sistem subsidi, pemerintah pusat dapat lebih efektif dalam sumber pendapatan dan mempunyai daya kendali terhadap pemerintahan daerah.

Widjaja (2004) menyatakan bahwa pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, penyerahan sumber penerimaan yang cukup kepada daerah harus mengikuti penyelenggaraan urusan pemerintahan agar pemerintahan di daerah dapat berjalan secara optimal. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan di daerah juga mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah serta sumber pembiayaan.

Merujuk pada pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 maka diterbitkanlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berisikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah yang didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau “uang mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi dkk,2001).

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa undang-undang pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari undang-undang perimbangan keuangan. Tanpa undang-undang yang mengatur keuangan daerah, ketentuan-ketentuan pemerintahan daerah tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan dimanapun soal keuangan daerah, hubungan keuangan pusat dengan daerah atau perimbangan keuangan pusat dengan daerah merupakan persoalan yang paling menonjol dalam masalah pemerintahan daerah. Sistem hubungan keuangan pusat dan daerah tidak hanya menentukan kemampuan daerah. Jauh lebih mendasar, hubungan keuangan antara pusat dengan daerah akan menentukan tingkat kemandirian dan kebebasan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya.

c. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu perwujudan dari rencana kerja keuangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, memiliki landasan hukum antara lain :

- 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- 4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Anggaran

Dalam Wijaya (2010) kata anggaran adalah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *budget* yang sebenarnya berasal dari bahasa Perancis *bougette*, yang mempunyai arti sebuah tas kecil. Berdasar dari arti kata asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena sumber daya yang dimiliki

pemerintah memiliki keterbatasan, dalam hal ini adalah dana. Karena keterbatasan dana tersebut, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas pada kurun waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Due dalam Wijaya (2010), menyatakan bahwa anggaran negara adalah:

“A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a specific period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed expenditures and expected revenues for the coming period, together with data of actual expenditures and revenues for current and past period”.

Proses pembuatan anggaran dalam periode satu tahun disebut penganggaran. Mardiasmo (2009:61) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses / metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Peranan anggaran bagi daerah sangat penting dengan memperhatikan sumber kekayaan dan potensi daerah dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam upaya pelayanan publik. Perencanaan ekonomi pemerintah harus diterjemahkan melalui proses perumusan anggaran melalui perencanaan dalam satuan keuangan berupa *input* dan *output*. Untuk itu proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik.

Samuel (2000) membagi tiga tahap dalam proses penganggaran yaitu dirumuskannya proposal anggaran, pengesahan prosposal anggaran dan implementasi anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum, Hagen (2005) kemudian membagi penganggaran menjadi beberapa

tahapan yaitu interaksi antara eksekutif (*executive planning*) dan legislatif (*legislative approval*) dimana terjadi dominasi dalam politik anggaran, dan keterlibatan birokrasi sebagai agen (*executive implementation, dan ex post accountability*).

e. Sumber Pendapatan Daerah di Indonesia

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Sumber pendapatan bagi pemerintahan daerah di Indonesia berasal dari :

1) Pendapatan Asli Daerah

Halim (2007:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Kinerja keuangan daerah dikatakan rendah jika subsidi atau bantuan pemerintah pusat sangat dominan dan kontribusi PAD sangat kecil dalam pembiayaan suatu kebutuhan daerah. Kontribusi PAD yang rendah dalam APBD daerah yang bersangkutan merupakan bukti

kekurangmampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber pendapatan dan sumber daya ekonominya.

Pada hakekatnya PAD secara langsung diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi daerah atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat. Pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Dalam implementasinya, pajak daerah dan retribusi daerah harus memiliki rasa keadilan atau kewajaran berkaitan dengan prinsip kewajaran horisontal dan kewajaran vertikal. Dalam prinsip kewajaran horisontal mempersyaratkan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama. Sedangkan pada prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan dari wajib pajak/ retribusi untuk membayar, artinya bagi masyarakat berkemampuan membayar tinggi akan dibebankan pajak/ retribusi yang tinggi pula.

Untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah harus dapat menerapkan kebijakan diskriminasi tarif yang rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Ini berbeda dengan konteks belanja, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar secara relatif dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

PAD bersumber dari :

a). Pajak Daerah.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Menurut Davey dalam Nurcholis (2007:182), klasifikasikan pengertian pajak daerah terbagi dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pengaturan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintahan daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintahan daerah tetapi hasil pungutan diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintahan daerah.

Untuk menilai pajak daerah, Devas dalam Mardiasmo (2007:150) menggunakan ukuran sebagai berikut :

1. Hasil (*yield*) : memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber lebih besar memberikan sumbangan lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) : pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suistability as a local revenue source*) : artinya harus ada kejelasan kepada daerah dimana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai pelayanan terhadap masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Devas (2004) mengungkapkan

bahwa sistem perpajakan yang sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan nampak sebagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban dari pada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Pemerintah pusat di Indonesia telah melakukan pembaharuan dengan menerbitkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun demikian upaya untuk meminimalkan 'kelemahan' dalam sektor pajak dan retribusi daerah harus tetap dilakukan agar penerimaan daerah menjadi maksimal.

Lebih lanjut, Devas et. al, (2004) memberikan penjelasan bahwa kemampuan menghimpun dana adalah perbandingan antara penerimaan dari pajak dengan retribusi atau disebut dengan upaya (*tax effort*). Pada Gupta (2008) yang menyatakan bahwa negara - negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, kurang dalam upaya peningkatan pajak dalam negeri khususnya pada pemerintahan daerah. Devey dalam Sagbas (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan sumber - sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintahan daerah itu sendiri dalam mengoptimalkan faktor - faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut. Untuk itu, Mardiasmo dkk, (2007:146-147) mengungkapkan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintahan daerah di Indonesia perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang riil yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga bisa diketahui peningkatan kapasitas pajak (*tax capacity*) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah.

b). Retribusi Daerah.

Pengertian retribusi daerah menurut Halim (2007:97) adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi, sedangkan Sugianto (2007:2) menyatakan retribusi daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Merujuk pada Kaho (2005) menyatakan pungutan daerah adalah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan ciri mendasar dari retribusi daerah adalah pertama, pemungutan retribusi dilakukan oleh negara, kedua, terdapat paksaan secara ekonomis dalam pemungutan retribusi, ketiga, adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk dari retribusi, dan keempat, retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Davey dalam Sagbas (2008) mengungkapkan beberapa pendapat mungkin akan timbul pada elastisitas retribusi yang harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan atau konsumsi akan suatu pelayanan. Dalam konteks yang demikian itu, pengelolaan sumber - sumber PAD dari jenis retribusi tentu mempunyai konskuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintahan daerah. Artinya Pemerintah daerah tidak boleh memikirkan bagaimana memperoleh pendapatan yang sebesar - besarnya dari pemungutan retribusi, tetapi pemerintah daerah bertanggung jawab atas konskuensi pemungutan retribusi tersebut.

c). Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d). Lain-lain PAD yang sah.

Jenis lain - lain PAD yang sah disediakan untuk anggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, yang antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai

atau angsuran / cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2) Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti kepada daerah diberikan keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. DAU terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten / kota.

Besaran DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 25% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *netto* yang ditetapkan dalam APBN sampai dengan tahun anggaran 2007, sedangkan mulai tahun anggaran 2008 ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *netto* yang ditetapkan dalam APBN.

Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD.

Formula DAU menggunakan pendekatan *fiscal gap* (celah fiskal) yaitu selisih antara *fiscal need* (kebutuhan fiskal) dikurangi dengan *fiscal capacities* (kapasitas fiskal) daerah dan Alokasi Dasar (AD).

Adapun formula DAU sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

$$\text{AD} = \text{Gaji PNS Daerah}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan fiskal} - \text{kapasitas fiskal}$$

Variabel kebutuhan fiskal terdiri dari :

- 1) Sampai dengan tahun anggaran 2005 variabel kebutuhan fiskal terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks kemiskinan relatif (sesuai UU Nomor 25 Tahun 1999).
- 2) Mulai tahun anggaran 2006 variabel kebutuhan fiskal terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi dan PDRB perkapita (sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004).

Dalam perhitungan DAU dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1). Kebutuhan Fiskal.
 - a). Kebutuhan Fiskal (Kbf) sampai dengan tahun anggaran 2005 sesuai UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa formula DAU dirumuskan sebagai berikut :

$Kbf = \text{Total pengeluaran rata - rata daerah I} \times (0,4 \text{ Indeks penduduk} + 0,1 \text{ Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)} + 0,1 \text{ Luas wilayah} + 0,4 \text{ Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)}).$

- b). Kebutuhan Fiskal (Kbf) mulai dari tahun anggaran 2006 berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 formula tersebut disesuaikan menjadi :

$Kbf = \text{Total pengeluaran rata - rata daerah I} \times (\text{Indeks jumlah penduduk} + \text{Luas wilayah} + \text{Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)} + \text{PDRB per kapita}) + \text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)}.$

2). Kapasitas Fiskal.

- a). Kapasitas Fiskal (KpF) sampai dengan tahun anggaran 2005 sesuai UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah $KpF = PAD + (PBB + BPHTB + PPh + SDA)$ dimana perhitungan untuk PAD = estimasi berdasarkan proyeksi PDRB.

- b). Kapasitas Fiskal (KpF) mulai tahun anggaran 2006 sesuai Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah : $KpF = PAD + (PBB + BPHTB + PPh + SDA).$

3). Celah Fiskal.

- a). Celah Fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah. Jika kebutuhan fiskal sama dengan kapasitas fiskal, maka jumlah DAU yang diterima akan sama dengan Alokasi Dasar (AD).
- b). Dalam hal celah fiskal negatif, maka jumlah DAU yang

diterima daerah adalah sebesar Alokasi Dasar (AD) setelah diperhitungkan dengan nilai absolut dari celah fiskalnya, sehingga mengurangi total DAU yang akan diterima daerah.

- c). Apabila ternyata nilai absolut dari celah fiskal tersebut lebih besar dibandingkan alokasi dasarnya, maka daerah tersebut tidak akan menerima DAU atau $DAU = 0$.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa apabila suatu daerah tidak menerima DAU sama sekali, tidak berarti bahwa daerah tersebut tidak menerima transfer apapun dari pemerintah pusat. Kemungkinannya adalah daerah tersebut sudah menerima dana bagi hasil pajak maupun bukan pajak yang cukup besar serta mempunyai APBD yang besarnya jauh diatas rata – rata nasional.

Seperti sudah disebutkan di bagian pendahuluan, tujuan DAU adalah sebagai instrumen untuk *equalizing grant* atau pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Untuk itu, berhasil tidaknya alokasi DAU akan ditentukan tercapai tidaknya upaya perbaikan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dari tahun ke tahun.

Alokasi DAU dibuat dengan hanya berdasarkan formula murni sebenarnya adalah upaya langsung untuk memperbaiki pemerataan kemampuan fiskal antar daerah (ketimpangan horizontal) yang selama ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan *hold harmless*. Kebijakan ini praktis mengurangi kemampuan DAU untuk lebih memperkuat APBD daerah – daerah termiskin di Indonesia yang kebutuhan fiskalnya jauh melebihi kapasitas fiskalnya.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, maka mulai tahun 2008 terdapat perubahan yang signifikan dalam kebijakan pengalokasian DAU. Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perhitungan alokasi DAU berdasarkan formula dilaksanakan secara penuh mulai tahun anggaran 2008. Perhitungan DAU tahun 2008 berdasarkan formula tersebut akan menghasilkan alternatif alokasi DAU sebesar nol (tidak mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan atau lebih besar dari DAU tahun 2007.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Sidik (2004) menyatakan tujuan DAK adalah untuk mengisi kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan yang berlaku, khususnya bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah sehingga secara bertahap keserasian tingkat pelayanan publik diberbagai wilayah dapat tercapai, dimana pemerintah harus dapat menyusun kriteria yang jelas dan tegas untuk penggunaan DAK, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah ditampung pada anggaran pembangunan.

Pada awalnya DAK terbagi menjadi dua, yaitu :

- DAK DR (Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi).
- DAK Non DR (Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi).

DAK Non DR dan DAK DR yang dialokasikan dalam tahun anggaran APBN secara riil diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar publik dan rehabilitasi hutan di daerah. Kriteria umum pengalokasian DAK Non DR diprioritaskan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata. Kemampuan fiskal daerah tersebut dihitung berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan daerah, tidak termasuk SILPA dengan belanja PNS daerah (*fiscal netto*).

Sejak tahun 2007, DAK – DR dirubah menjadi DBH SDA Kehutanan, sedangkan DAK Non DR berubah menjadi DAK, dengan tetap mengalokasikan bidang kehutanan sebagai salah satu mata anggaran. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI. Penggunaan DAK harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK yang dikeluarkan oleh menteri teknis. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.

Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerima DAK, yaitu :

- 1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK-nya di dalam APBD.

- 2) Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang – kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- 3) Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan RI, menteri teknis dan Menteri Dalam Negeri RI. Penyampaian laporan dilakukan selambat - lambatya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Alokasi DAK terbagi atas bidang – bidang teknis. Untuk bidang DAK ditahun 2011 adalah bidang kelautan dan perikanan, bidang kehutanan, bidang sarana dan prasarana perdesaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang irigasi, bidang air minum dan sanitasi, bidang prasarana pemerintah, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, bidang Keluarga Berencana (KB), bidang perdagangan pasar, bidang transportasi perdesaan, bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, bidang listrik perdesaan, bidang perumahan dan permukiman, serta bidang keselamatan transportasi darat.

4) Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Guna menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (sumber daya alam) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by-origin*).

DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, DBH terdiri atas :

1) Dana Bagi Hasil Perpajakan (DBH Perpajakan), yaitu :

a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut PP Nomor 16 tahun 2000, bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk daerah ditetapkan sebesar 90%, sedangkan pemerintah pusat mendapatkan sisanya sebesar 10%, juga seluruhnya dikembalikan kepada daerah.

b) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi.

Sesuai PP Nomor 115 Tahun 2000, bagian daerah dari PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi, ditetapkan masing - masing sebesar 20% dari penerimaannya. 20% bagian daerah tersebut terdiri atas 8% bagian provinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintahan daerah kepada masing - masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan dari gubernur dengan mempertimbangkan faktor - faktor jumlah penduduk, luas wilayah serta faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Dasar Hukum DBH SDA selain UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jenis penerimaan DBH SDA terdiri dari :

a) Kehutanan, berasal dari :

- (1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH).
- (2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
- (3) Dana reboisasi.

b) Pertambangan Umum, berasal dari :

- (1) Iuran tetap (*landrent*).
- (2) Iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*).

c) Perikanan, berasal dari :

(1) Pungutan pengusaha perikanan.

(2) Pungutan hasil perikanan.

d) Pertambangan minyak dan gas bumi, berasal dari :

(1) Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dalam bentuk DBH dialokasikan kepada pemerintah daerah sebesar 15,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya serta bagian untuk pemerintah pusat sebesar 84,5%.

(2) Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dalam bentuk DBH dialokasikan kepada pemerintah daerah sebesar 30,5% setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya dan pemerintah Pusat sebesar 69,5%.

e) Pertambangan panas bumi, berasal dari :

(1) Setoran bagian pemerintah.

(2) Iuran tetap dan iuran produksi.

Besaran persentase DBH SDA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Persentase Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

No	Jenis Penerimaan	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Kab/ Kota lainnya	UU Otsus Papua & UUPA
1	Kehutanan					
	a. DUPH	20	16	64	-	80
	b. PSDH	20	16	32	32	80
	c. Dana Reboisasi	60	-	40	-	40
2	Pertambangan Umum					
	a. Landrent	20	16	64	-	80
	b. Royalti	20	16	32	32	80
3	Perikanan	20	-	-	80	80
4	Minyak Bumi	84.5	3.1	6.2	6.2	70
5	Gas Bumi	69.5	6.1	12.2	12.2	70
6	Panas Bumi	20	16	32	32	80

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

Penghitungan realisasi produksi DBH SDA dilaksanakan dengan :

- 1) Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA perikanan.
- 2) Penghitungan realisasi DBH SDA minyak bumi dan gas bumi didasarkan atas realisasi *lifting* minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis.

Sementara pemantauan dan evaluasi DBH SDA dilakukan dengan :

- 1) Pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH DR dilaksanakan oleh menteri teknis.
- 2) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR dan penggunaan anggaran pendidikan dasar (sebesar 0,5% dari minyak bumi dan gas bumi) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI.
- 3) Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan, menteri keuangan dapat meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan.

5) Dana Transfer Pemerintah Provinsi

Dana transfer pemerintah provinsi terbagi menjadi dua, yaitu : bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi yang dikenal sebagai DABA (dana bantuan) provinsi. Pada bagi hasil pajak provinsi, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pembagian jenis pajak yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota.

Pajak provinsi dibagi menjadi lima jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Jika dibandingkan dengan Undang – undang sebelumnya yaitu UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam Undang – undang tersebut pajak provinsi hanya dibagi menjadi empat jenis dan belum termasuk pajak rokok.

Pajak rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan pajak rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Penerimaan pajak rokok tersebut dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

Tabel 2.2 dibawah menggambarkan proporsi bagi kabupaten/kota, dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, melalui pemberlakuan bagi hasil pajak provinsi. Dan kemudian pajak provinsi tersebut dibagikan kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut.

Tabel 2.2 Persentasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

No.	Jenis Pajak	Provinsi	Kab/Kota
1	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
3	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	30%	70%
4	Pajak Air Permukaan	50%	50%
5	Pajak Rokok	30%	70%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut juga terdapat perluasan basis pajak daerah terutama pajak provinsi yaitu dengan mengenakan pajak pada PKB dan BBNKB terhadap kendaraan pemerintah. Juga untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan kualitas pelayanan, penghematan energi, juga pelestarian/ perbaikan lingkungan, diberikan batasan kenaikan tarif maksimum pajak daerah. Untuk pajak provinsi kenaikan tarif maksimum pajak daerah adalah :

- 1) Tarif maksimum pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.
- 2) Tarif maksimum bea balik nama kendaraan bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
- 3) Tarif maksimum pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.

Pajak provinsi juga dikenakan *earmark*. Untuk meningkatkan

kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan *earmarking* untuk pajak provinsi adalah :

- 1) 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
- 2) 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

Bantuan keuangan pemerintah provinsi atau yang dikenal sebagai DABA provinsi, merupakan bantuan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten / kota yang berada pada hirarkinya. DABA provinsi disahkan oleh keputusan kepala daerah antara lain diberikan untuk sektor pendidikan yang berada di kabupaten / kota diwilayah provinsi.

6. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang berbeda, dengan menggunakan berbagai proses organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Grant:2010).

Perkembangan teori dan empiris sekarang ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan keinginan

pelanggannya dan juga lebih baik dalam membangun dan memasarkan barang atau jasa melalui aktivitas yang terkoordinasi dengan baik. Perusahaan yang memiliki kompetensi yang tinggi juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya mengenai aksi dan reaksi pesaing, dimana akan membantu perusahaan tersebut untuk membangun keunggulan dalam persaingan (Naver dan Slater, 2006; Touminen *et al.*, 2006).

Dalam menjalankan usahanya perusahaan harus didukung melalui kompetensi inti. Bogner dan Thomas (2002) mendefinisikan kompetensi inti sebagai keahlian khusus yang dimiliki oleh perusahaan dan tingkat pengetahuan perusahaan yang diarahkan untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya.

Kompetensi dalam perusahaan dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah keahlian dan teknologi, sehingga perusahaan tersebut memiliki keunikan dan kekuatan melalui persaingan sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dan nilai positif serta memudahkan perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar yang baru dan lebih luas (Prahalad dan Hamel, 2010; Heene dan Hamel, 2011).

Kompetensi teknis bagi perusahaan atau organisasi merupakan hal yang penting. Meyer dan Utterback (2006) menekankan peran penting kompetensi teknis baik dalam bidang teknologi, penelitian dan pengembangan (*research and development*), kompetensi produksi dan manufaktur, serta kompetensi pemasaran pada perusahaan atau organisasi. Dukungan fisik terhadap sistem operasi suatu perusahaan tidak hanya

melalui fasilitas interior dan eksterior gedung perusahaan saja, tetapi meliputi seluruh sarana fisik operasional yang digunakan oleh perusahaan, seperti : kelengkapan, keakuratan, kecanggihan peralatan yang digunakan dalam suatu perusahaan, serta kemudahan lokasi perusahaan sehingga dapat mendukung kualitas pelayanan dalam memberikan kepuasan pada konsumen.

Kompetensi teknis yang dimiliki oleh suatu perusahaan sangat erat hubungannya dengan persepsi konsumen karena konsumen memiliki persepsi kualitas layanan yang tinggi terhadap perusahaan. Perusahaan dapat kehilangan pelanggan atau konsumen dengan beralih kepada perusahaan lain yang mempunyai sarana pendukung sistem operasional lebih baik, jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan lingkungan dan teknologi.

Menurut Andreasson (2005) dan Tax, Brown dan Chandrashekar (2008), kompetensi teknis dapat diukur melalui tiga indikator dalam meningkatkan kualitas pelayanan, ketiga indikator-indikator tersebut adalah :

1. Penguasaan *job description* yang baik.
2. Keterampilan teknis yang baik.
3. Penguasaan teknologi.

Berbeda dengan perusahaan, kompetensi pada organisasi pemerintah bertujuan untuk melayani masyarakat (*public service*). Menindaklanjuti Prahalad dan Hamel (2010), perusahaan maupun organisasi seperti pada pemerintahan daerah sebagai SKPD yang sukses adalah selalu berfokus

pada peningkatan kompetensi, dan menggunakan cara - cara baru dan inovatif untuk mencapai tujuan. Perhatian utama perusahaan atau SKPD tersebut adalah dengan menggunakan sumber daya dengan cara - cara yang menantang dan kreatif untuk membangun kompetensi inti.

7. Partisipasi Anggaran

Brownell (2006) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut.

Darlis (2002) menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran, keterlibatan (partisipasi) berbagai pihak dibutuhkan dalam membuat keputusan. Melalui penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para manajer yang ada berada dibawahnya mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa jika disetujuinya suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif, maka karyawan memiliki rasa tanggung jawab secara pribadi dan akan bersungguh – sungguh dalam mencapai tujuan atau standar yang ditetapkan karena keterlibatan dalam proses penyusunan.

Dengan keterlibatan lini manajerial dalam penyusunan anggaran, dapat menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang sedang dan yang akan dihadapi serta membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anggaran (Darlis,2002). Karena dengan mengetahui suatu tujuan anggaran yang relevan, serta dapat diterima dan dicapainya suatu anggaran, melalui partisipasi anggaran, dapat mengurangi tekanan

dan kegelisahan para bawahan. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran merupakan suatu cara efektif untuk menciptakan keselarasan tujuan setiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara umum.

Darlis (2002) berpendapat bahwa komunikasi yang positif dapat diarahkan melalui partisipasi anggaran, karena mekanisme pertukaran informasi akan terjadi melalui partisipasi anggaran.

Anthony dan Govindarajan (2003) menyatakan bahwa terkadang pada perusahaan atau organisasi sering terjadi perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik perusahaan, ini disebut dengan kesenjangan anggaran (*budgetary slack*). Juga merupakan pelaporan jumlah anggaran yang dengan sengaja dilaporkan melebihi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan atau mengecilkan kemampuan produktifitas yang dimilikinya (Grover:2005).

Dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah, partisipasi anggaran dibutuhkan agar pencapaian target dan sasaran anggaran dapat terlaksana. Menindaklanjuti Kenis (2006) bahwa pengetahuan mengenai tujuan yang telah dianggarkan dan informasi mengenai tingkatan dimana tujuan tersebut telah tercapai dalam satu tahun anggaran memberikan dasar bagi para manajer untuk mengukur efisiensi, mengidentifikasi masalah dan mengontrol biaya, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal waktu dan besarnya, koordinasi dengan berbagai aktivitas fungsional pendapatan pada seluruh SKPD juga dapat dicapai melalui proses pembuatan dan penerapan anggaran khususnya pada anggaran pendapatan.

8. Pembelajaran Organisasi

Marquardt (2011) menyatakan bahwa dalam perubahan lingkungan bisnis yang cepat, kapasitas pembelajaran suatu organisasi merupakan hal yang mutlak agar dapat mencapai dan terus mempertahankan keunggulan dalam persaingan. Garvin (2000) mendefinisikan *learning organization* :

“an organization skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insights”.

Yaitu keahlian suatu organisasi dalam menciptakan, memperoleh, menginterpretasikan, mentransfer dan membagi ilmu pengetahuan dengan tujuan agar dapat memodifikasi perilaku anggota organisasi tersebut untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang baru.

Organisasi belajar melalui individu - individu yang menjadi bagian dari organisasi. Pembelajaran individu merujuk pada nilai yang diperoleh individu tersebut melalui proses pengalaman, wawasan dan observasi juga pada perubahan keahlian, pengetahuan, wawasan dan sikap. Senge (2006) memberikan lima disiplin kunci dari pembelajaran organisasi yaitu *system thinking, mental models, personal mastery, team learning* dan *building shared vision*, dimana merupakan ‘komponen teknologis’ atau dimensi yang sangat penting dan diperlukan dalam membangun pembelajaran organisasi.

Marquardt kemudian menyempurnakan teori sange (2006) dengan menambahkan satu dimensi penting dalam membangun pembelajaran organisasi yakni dialog. Menurut Marquardt (2011) untuk mewujudkan proses pembelajaran organisasi ada enam dimensi yang diperlukan yaitu

sistem berpikir, model mental, keahlian personal, kerjasama tim, membagi visi bersama, dan dialog.

Tesis ini pada akhirnya menggunakan berbagai dimensi pengukuran pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dengan menggunakan tiga dari enam dimensi pembelajaran organisasi yang dibangun oleh Marquardt (2011) :

1. *System thinking* (sistem berfikir) merupakan disiplin pembelajaran yang menunjukkan kerangka konseptual yang digunakan seseorang agar mempunyai pola kerja yang lebih jelas dan pada akhirnya dapat membantu seseorang tersebut untuk merubah pola – pola konvensional tersebut menjadi efektif.
2. *Mental models* (mentalitas) yaitu disiplin pembelajaran yang menunjukkan asumsi, generalisasi dan gambaran yang mendalam tentang pemahaman kita terhadap dunia sekitar dan kemudian bagaimana kita mengambil langkah – langkah.
3. *Personal mastery* (keahlian personal) adalah disiplin pembelajaran yang menunjukkan keunggulan keterampilan kita yang tinggi dalam bidang – bidang tertentu. Disiplin ini melibatkan komitmen seseorang untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*) supaya dapat terwujudnya keahlian spesifik, sehingga seseorang tersebut dapat bekerja dengan baik pada seluruh organisasi.
4. *Team learning* (kerja sama tim) yaitu disiplin pembelajaran yang menunjukkan proses pengembangan kemitraan (*alignmen*) dan pengembangan kapasitas sebuah tim guna mewujudkan pembelajaran

serta hasil kinerja yang diinginkan oleh seluruh anggota. *Team learning* merupakan masalah praktek dan proses. Senge (2006) menyebut proses ini sebagai *teamlearning* dan menjelaskan bahwa hal ini merupakan disiplin yang ditandai dengan tiga dimensi penting :

- a. Kemampuan untuk memiliki wawasan berpikir mengenai masalah - masalah penting.
 - b. Kemampuan untuk bertindak dengan cara-cara yang inovatif dan koordinatif.
 - c. Kemampuan untuk memainkan peranan yang berbeda pada tim yang berbeda.
5. *Shared vision* (keahlian untuk membagi visi bersama) yakni disiplin pembelajaran dengan melibatkan keterampilan anggota organisasi untuk menjelajahi gambaran bersama tentang masa depan, yang berguna untuk mendorong munculnya komitmen dan keterlibatan penuh sekaligus menghindari penyerahan diri sekedarnya pada anggota organisasi tersebut.
6. *Dialogue* (dialog) yaitu disiplin pembelajaran yang melibatkan kemampuan dan kemauan yang keras dari individu anggota organisasi untuk saling mendengarkan dan berkomunikasi. Disiplin ini melibatkan upaya eksploratif secara kreatif isu yang *sensitive* atau samar, kemampuan mendengarkan dengan sabar pendapat orang lain, serta kemampuan menahan diri. Disiplin dialog juga melibatkan pembelajaran bagaimana memahami pola interaksi di dalam tim yang dapat menumbuhkan ataupun mengganggu proses pembelajaran.

Untuk terus mempertahankan keberhasilan pada perusahaan dimana kondisi lingkungan intern dan ekstern yang selalu berubah, yang harus dilakukan perusahaan menurut Prahalad and Hamel (2010) adalah :

- 1) Perusahaan harus dapat belajar pada tingkatan yang sama dengan perubahan lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai kompetensi inti pada *market* dan ini harus dilakukan dalam *long term condition*.
- 2) Jika menginginkan perubahan kinerja perusahaan atau organisasi, tingkatan pembelajaran dalam organisasi atau perusahaan tersebut harus sama dengan yang dilakukan oleh pesaing perusahaan.
- 3) Pengukuran kinerja diperlukan selama proses pembelajaran karena aktivitas pembelajaran mempunyai pengaruh pada kinerja bisnis, ini diperlukan agar perusahaan mempunyai kemampuan lebih cepat dalam belajar dan mempunyai waktu yang efektif pada perubahan lingkungan sehingga dapat mencapai keunggulan dalam berkompetisi.

Lebih lanjut, Lo dan Wang (2003) kemudian menyatakan bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh positif terhadap kompetensi inti perusahaan. Menurut Luthans (2010) karakteristik dalam pembelajaran organisasi dapat tercermin dari nilai – nilai kultural yang berorientasi pada manusia (*human oriented cultural values*). Budaya organisasi atau perusahaan yang baik adalah memandang bahwa setiap pegawai sebagai sumber ide. Pegawai adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan permasalahan organisasi atau perusahaan sehingga mereka akan memiliki cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan organisasi atau

perusahaan tersebut baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu, setiap ide yang dicetuskan oleh pegawai atau anggota organisasi harus dihargai serta kesalahan yang dilakukan oleh pegawai atau anggota organisasi dianggap sebagai suatu proses pembelajaran.

9. Kinerja

Kinerja merupakan konsep dasar yang bersifat umum. Konsep ini seringkali dipahami secara implisit sehingga sulit untuk diungkap secara eksplisit. Chakravarthy (2009) menyatakan bahwa kinerja yang terkait dengan konsep tertentu dapat melahirkan pendekatan atau pengukuran khusus.

Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka dilakukan penilaian kinerja. Kata penilaian sering diartikan dengan kata *assessment*. Sedangkan kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dengan demikian menurut Kaplan dan Norton (2004) penilaian kinerja perusahaan (*companies performance assessment*) merupakan suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu.

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mencapai sasaran organisasi melalui motivasi personil dengan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan hasil dan tindakan sesuai yang diinginkan organisasi. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen

atau rencana formal yang dituangkan dalam bentuk rencana strategik, program dan anggaran organisasi. Penilaian kinerja juga digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil kinerja pada waktu serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur melalui ukuran keuangan dan non keuangan. Ukuran keuangan bertujuan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan dimasa lalu. Ukuran keuangan tersebut dapat dilengkapi dengan ukuran non keuangan tentang kepuasan *customer*, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis/intern serta produktivitas dan komitmen personil yang akan menentukan kinerja keuangan dimasa yang akan datang. Ukuran keuangan dapat juga menunjukkan akibat dari berbagai tindakan yang terjadi diluar permasalahan keuangan. Karena dalam ukuran ROE (*Return On Equity*) dimana menunjukkan peningkatan *financial returns* adalah merupakan akibat dari berbagai tingkat kinerja operasional seperti :

1. Peningkatan kepercayaan *customer* terhadap produk yang dihasilkan perusahaan.
2. Peningkatan produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa.
3. Peningkatan produktivitas dan komitmen personil.

Jadi jika manajemen puncak (*top level management*) berkeinginan untuk melipatgandakan kinerja keuangan pada perusahaan, maka fokus

perhatian seharusnya ditujukan untuk memotivasi personel dalam melipatgandakan kinerja di perspektif non keuangan atau operasional, karena disitulah terdapat *the real driver* (pemacu sesungguhnya) kinerja keuangan berjangka panjang.

Menurut Hansen dan Mowen (2003:396), dalam melakukan pengukuran kinerja adalah :

“Activity performance measure exist in both financial and non financial forms. These measures are designed to assess how well an activity was performed and the result achieved. They are also designed to reveal if constant improvement is being realized. Measures of activity performance center on three major dimension: (1) efficiency, (2) quality, and (3) time”.

Dalam penjelasan diatas terlihat bahwa penilaian aktivitas kinerja menggunakan dua jenis pengukuran yaitu pengukuran keuangan dan pengukuran non keuangan. Pengukuran ini digunakan untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang dicapai. Ada juga penilaian kinerja yang dirancang untuk menyingkap jika terjadi kemandekan perbaikan yang akan dilakukan. Pada dasarnya penilaian pusat aktivitas kinerja dibagi kedalam tiga dimensi utama, yaitu : (1) efisiensi, (2) kualitas, (3) waktu. Hal ini juga berlaku jika penilaian aktivitas kinerja dilakukan pada pemerintahan daerah di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan studi kepustakaan mengenai penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian.

Penelitian sebelumnya tersebut adalah :

Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya

	Masalah penelitian	Pendapat/Temuan	Peneliti	Judul Buku/Jurnal
1.	Pengaruh kinerja pada organisasi sektor publik	Adanya hubungan kinerja pada organisasi sektor publik	Frank H.M. Verbeeten, (2008)	Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance
2.	Kinerja - pengelolaan keuangan daerah	Kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas - Pendidikan Kota Yogyakarta Baik	A. Subrata (2008)	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas - Pendidikan Kota Yogyakarta
3.	Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja	Partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manajerial	Mohd. Nor Yahya dkk (2008)	Budgetary participation and performance : some Malaysian evidence
4.	Pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kompetensi dan kinerja	Pembelajaran organisasi berpengaruh positif terhadap kompetensi dan kinerja perusahaan	Lo dan Wang (2003)	Customer-focused Performance and the Dynamic Model for Competences Building and Leveraging: A Resource-based View

Sumber : Dari berbagai jurnal

Lo dan Wang (2003) menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dengan pembelajaran organisasi. Melalui pembelajaran organisasi, peningkatan kompetensi terbangun melalui karyawan dan sumber daya yang lainnya, karyawan dapat mempergunakan pengetahuan dan keahliannya secara kontinyu untuk mengatasi berbagai masalah dalam operasional dan strategis perusahaan.

Dalam partisipasi anggaran Yahya dkk. (2008) melakukan penelitian tentang hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Kementerian Pertahanan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi penganggaran.

Menindaklanjuti Hitt *et al.*, (2007), pembelajaran organisasi sektor publik khususnya yang dilakukan oleh Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat akan menciptakan kompetensi inti dan strategi guna membantu dalam mencapai kesuksesan kinerja.

Pada kinerja pengelolaan keuangan daerah, Subrata (2003) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Melalui pengukuran kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2007 adalah baik.

C. Kerangka Berfikir

Peran manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan negara tetap memperhatikan aspek sumber daya manusia. Secara sederhana, manajemen diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan (*planning*), mengadakan pengorganisasian (*organizing*), mengadakan pengarahan dan pembimbingan (*directing*), mengadakan pengkoordinasian (*coordinating*) serta mengadakan pengawasan (*controlling*) terhadap orang – orang dan barang – barang, untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan.

Ivancevich dkk (2008) menyatakan bahwa teori manajemen terus mengalami perkembangan. Hal ini seperti yang berkembang di negara Jepang

dan dikemukakan dalam Teori Z oleh Ouchi pada tahun 1981. Teori ini mengajarkan bahwa keberhasilan tujuan manajemen sangat dipengaruhi oleh suatu upaya yang dilakukan manajer sebagai pengelola organisasi secara keseluruhan.

Satu cara yang harus dilakukan menurut Siagian (2004) bahwa “dalam situasi yang demikian, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi oleh organisasi pengguna tenaga kerja, yaitu melalui menyelenggarakan pelatihan secara intensif dan terprogram, agar para pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan”. Pengakuan terhadap PNS yang mengelola keuangan negara pada SKPD adalah vital bagi pencapaian tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan untuk menjamin bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, organisasi dan masyarakat.

Adapula dijumpai dalam suatu negara maupun organisasi yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar, akan tetapi negara atau organisasi tersebut kurang berhasil membangun negara atau organisasinya dikarenakan lemahnya pengelolaan keuangan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jika pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat diterapkan dalam setiap organisasi dengan tidak mengenal besar kecilnya organisasi bersangkutan, baik organisasi yang berorientasi pada pencarian laba maupun organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat / sosial, organisasi agama dan pemerintahan. Maka pencapaian tujuan negara atau organisasi tersebut dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam penerapan ilmu manajemen keuangan pada Dinas PPKA

Kabupaten Bangka Barat, pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. **Transparansi**, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. **Akuntabilitas**, adalah pertanggungjawaban publik yang mempunyai arti bahwa dalam penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, juga pada pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat atau publik tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- c. *Value for money*, yakni dengan diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran daerah yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintahan daerah mencapai *good governance*. *Value*

for money harus dioptimalkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang didasari konsep *value for money* diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai jika pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Kondisi aktual penerimaan daerah di Kabupaten Bangka Barat menggambarkan penerimaan yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya penerimaan sehingga pada akhirnya pengeluaran belanja daerah menjadi rendah. APBD yang kecil dikarenakan rendahnya pendapatan daerah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah pula sehingga pada akhirnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi rendah. Banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut yang diantaranya adalah :

1. Kompetensi teknis pegawai

Dengan hanya 37 orang PNS dari keseluruhan PNS Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang berjumlah 2781 orang dan memiliki kualifikasi S1 kurang dari 60% PNS, maka kompetensi teknis PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat menjadi faktor menentukan dalam peningkatan pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Namun faktor kompetensi teknis tidak lantas menjadi satu - satunya faktor penentu dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat.

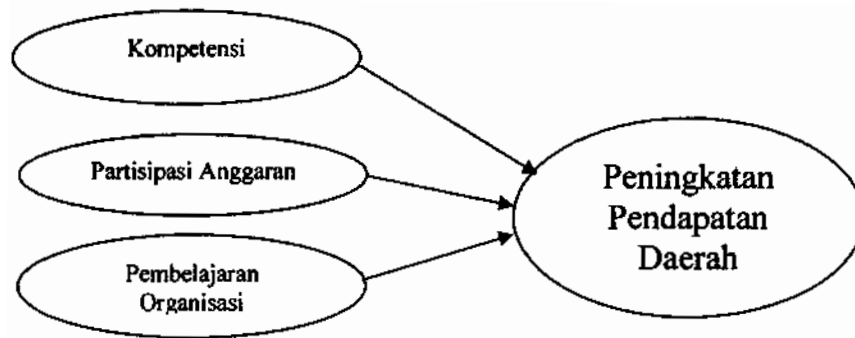
2. Partisipasi anggaran

Partisipasi anggaran diperlukan agar dalam pelaksanaannya seluruh PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam pendapatan, belanja dan aset,

mengetahui sumber dan penggunaan dana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Partisipasi anggaran pada pendapatan daerah dibutuhkan agar sasaran pada anggaran dapat dipenuhi, utamanya pada PAD. Pada dana perimbangan pemerintah pusat yang meliputi DAU, DAK dan DBH, pagu anggaran ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun perhitungan pagu anggaran tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Partisipasi anggaran dari pegawai pemerintah daerah khususnya PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dibutuhkan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui kondisi kebutuhan daerah yang sebenarnya. Pemerintah pusat kemudian menggunakan data yang diperoleh dari pemerintah daerah tersebut untuk perhitungan dana perimbangan sesuai dengan rumusan yang telah ada. Proses pencairan dan realisasi DAK pemerintah pusat juga membutuhkan partisipasi anggaran pada pemerintahan daerah. Pada DTPP berupa pajak provinsi dan DABA (Dana Bantuan) provinsi, partisipasi anggaran dibutuhkan agar sasaran anggaran dapat diperoleh secara keseluruhan. Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus memaksimalkan peran PNS dalam partisipasi anggaran pada APBD agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

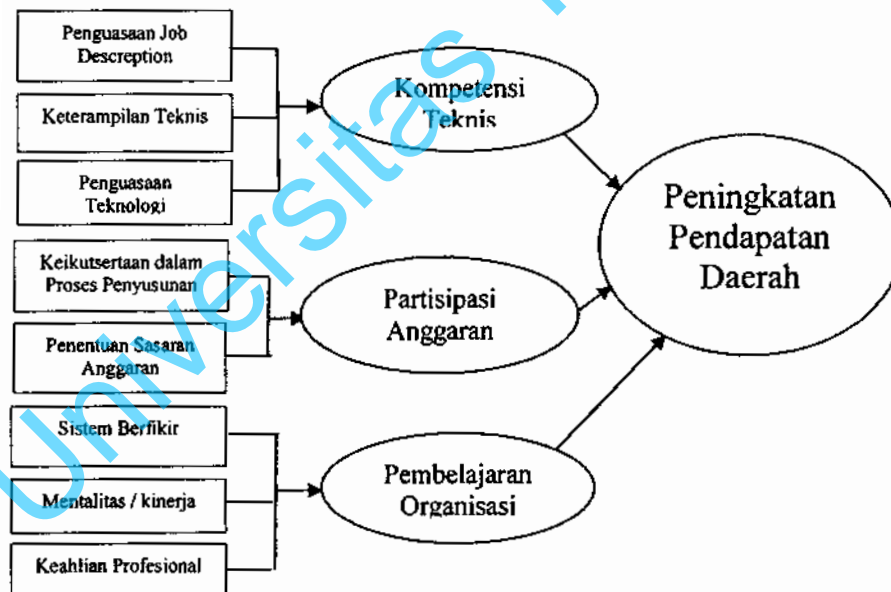
3. Pembelajaran Organisasi

Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada pemerintah kabupaten Bangka Barat maka diperlukan juga pembelajaran organisasi. Tanpa adanya pembelajaran organisasi maka peningkatan kompetensi, partisipasi anggaran dan peningkatan kinerja PNS dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah akan sulit untuk dilakukan.



Gambar 2.1 Variabel dan Hasil Akhir Penelitian

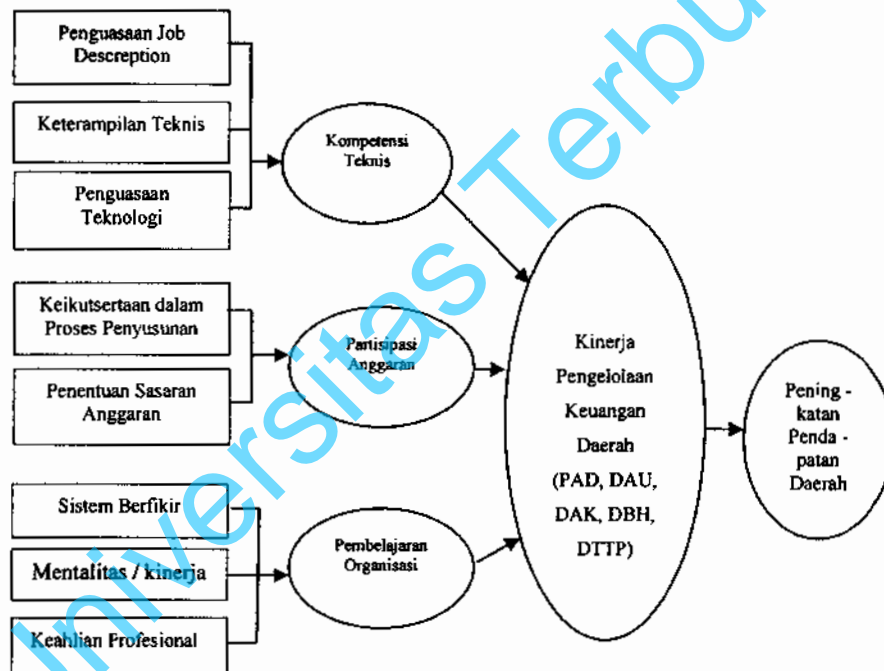
Untuk melihat kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi diperlukan acuan-acuan sebagai indikatornya. Tanpa adanya indikator untuk melihat kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi maka untuk menilai apakah benar faktor kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah akan sulit dilakukan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Variabel kompetensi teknis merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Parameter kompetensi dilihat dari pendapat Tor Wallin

Andreasson (2005), Tax, Brown dan Chandrashekar (2007) melalui tiga dimensi pengukuran variabel yaitu : penguasaan *jobdescription* yang baik, keterampilan teknis yang baik, dan penguasaan teknologi. Parameter partisipasi anggaran menggunakan pendapat Darlis (2002) dan Kenis (2006) yang menekankan pada keikutsertaan dalam proses penyusunan dan penentuan sasaran anggaran yang menjadi tanggung jawab karyawan. Sedangkan parameter pembelajaran organisasi menggunakan dimensi pembelajaran organisasi yang dibangun oleh Marquardt (2011), yaitu : sistem berpikir, kinerja dan keahlian personal.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Barat selain kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi PNS maka yang perlu dilihat selanjutnya adalah kinerja dalam pengelolaan

keuangan daerah terutama agar PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian dapat dikemukakan :

- H1: Kompetensi teknis PNS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.
- H2: Partisipasi anggaran PNS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.
- H3: Pembelajaran organisasi PNS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.
- H4: Kompetensi teknis, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada DPPKA Kabupaten Bangka Barat.

E. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional

Variabel bebas (*independent variabel*) dalam penelitian ini yaitu kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi. Variabel terikat (*dependent variabel*) yang merupakan perhatian utama adalah kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP.

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah menggunakan skala ordinal terdiri dari :
 - a) PAD adalah total realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain penerimaan PAD yang sah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
 - b) DAU adalah total dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah *ketimpangan horizontal* (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
 - c) DAK adalah total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus (*specific grant*) pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
 - d) DBH adalah total dana bagi hasil pemerintah pusat yang pembagiannya sesuai persentase hasil pajak dan bukan pajak khususnya bagi hasil sumber daya alam pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
 - e) DTTPP adalah total dana transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik dana bagi hasil pajak maupun dana bantuan (DABA) provinsi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- 2). Kompetensi adalah kemampuan PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan pekerjaannya secara efisien dan efektif, dengan menggunakan skala ordinal.
- 3). Partisipasi anggaran adalah suatu proses dimana PNS yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target

anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran dengan menggunakan skala ordinal.

- 4) Pembelajaran organisasi adalah suatu proses dinamis PNS dalam menciptakan, mengambil, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk mengembangkan sumber daya dan kapabilitas dalam memberikan kontribusi pada kinerja organisasi yang lebih baik dengan menggunakan skala ordinal.
- 5) Kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah hasil atau tingkat keberhasilan PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan selama periode tertentu dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan skala ordinal.
- 6) Peningkatan pendapatan daerah adalah hasil akhir dalam proses pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel melalui operasionalisasi konsep variabel perlu dirumuskan terlebih dahulu. Rumusan variabel tersebut adalah :

a. Kompetensi teknis

1. Penguasaan dalam bidang pekerjaan :

- (a) Peraturan perundang – undangan.
- (b) Sumber pendapatan.
- (c) Peningkatan pendapatan.
- (d) Realisasi pendapatan daerah pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber PAD lainnya.

- (e) Penatausahaan pendapatan daerah.
- (f) Penyusunan laporan tentang pendapatan.
- (g) Teknik dan prosedur pendapatan.

2. Keterampilan teknis

- (a) Pelaksanaan fungsi manajemen dalam pekerjaan.
- (b) Penguasaan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya usaha peningkatan pendapatan daerah.

3. Penguasaan teknologi

- (a) Teknologi informasi.
- (b) Sistem pelaporan pendapatan dana transfer ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (c) Penggunaan sistem pendapatan daerah.

b. Partisipasi anggaran

1. Keikutsertaan dalam proses penyusunan anggaran

- (a) Pelaksanaan proses penganggaran pendapatan pada APBD.
- (b) Pelaksanaan upaya insentif dan bonus tambahan untuk peningkatan kinerja melalui anggaran.
- (c) Pemeriksaan / pengecekan *budgetary slack* tidak terjadi dalam penyusunan anggaran pendapatan.

2. Penentuan sasaran pelaksanaan anggaran

- (a) Melaksanakan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui anggaran.
- (b) Melibatkan diri secara langsung dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan pada APBD.

- (c) Melibatkan diri secara tidak langsung dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan pada APBD.

c. Pembelajaran organisasi

1. Sistem berfikir

- (a) Menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- (b) Menunjukkan kemampuan dalam proses penatausahaan pendapatan daerah.
- (c) Memiliki landasan pemikiran akuntansi dan manajemen keuangan dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.

2. Kinerja

- (a) Mengalokasikan waktu dalam penyelesaian pekerjaan dengan efektif.
- (b) Melibatkan diri dalam setiap keputusan.
- (c) Menunjukkan kemampuan dalam prestasi individu.
- (d) Menerapkan pendekatan pola aktivitas dalam tugas.

3. Profesionalitas

- (a) Menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
- (b) Mampu dalam mengelola keuangan daerah.
- (c) Memahami sistem akuntansi dan manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah.

b. Kinerja pengelolaan keuangan daerah

1. Perencanaan pendapatan daerah

- (a) Proses perencanaan pendapatan daerah.
- (b) Prosedur perencanaan pendapatan daerah.
- (c) Penguasaan manajemen perencanaan pendapatan daerah.

(d) Penguasaan akuntansi perencanaan pengelolaan pendapatan daerah.

2. Penatausahaan pendapatan daerah

(a) Pelaksanaan dan upaya peningkatan dana transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber pendapatan daerah lainnya.

(b) Pengelolaan pendapatan daerah.

(c) Proses akuntansi pengelolaan keuangan daerah.

(d) Prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah.

3. Pertanggungjawaban keuangan daerah

(a) Pengelolaan dana pendapatan daerah.

(b) Pengelolaan laporan pendapatan daerah dan penguasaan manajemen pertanggungjawaban pendapatan daerah.

(c) Penguasaan akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan.

Sedangkan mengenai dimensi-dimensi dan indikator masing-masing variabel penelitian bila ditampilkan melalui tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Operasional Variabel Bebas Kompetensi Teknis (X₁)

Variabel	Dimensi	Indikator	No.
Kompetensi teknis	Penguasaan bidang pekerjaan	Peraturan perundang - undangan	1
		Sumber pendapatan daerah	2
		Peningkatan pendapatan daerah	3
		Realisasi pendapatan daerah pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber PAD lainnya.	4
		Pengelolaan pendapatan daerah	5
		Penyusunan laporan tentang pendapatan daerah	6
		Teknik dan prosedur pendapatan daerah	7

	Keterampilan teknis	Pelaksanaan fungsi manajemen dalam pekerjaan	8
		Penguasaan kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya usaha peningkatan pendapatan daerah	9
	Penguasaan teknologi	Teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah	10
		Sistem pelaporan pendapatan dana transfer ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	11
		Penggunaan sistem pendapatan daerah	12

Tabel 2.5
Operasional Variabel Bebas Partisipasi Anggaran (X₂)

Variabel	Dimensi	Indikator	No.
Partisipasi anggaran	Keikutsertaan dalam proses penyusunan anggaran	Penganggaran pendapatan pada APBD	13
		Pelaksanaan upaya insentif dan bonus tambahan untuk peningkatan kinerja melalui anggaran	14
		Budgetary slack anggaran pendapatan	15
	Penentuan sasaran pelaksanaan anggaran	Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui anggaran	16
		Keterlibatan langsung dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan pada APBD	17
		Keterlibatan tidak langsung dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan pada APBD	18

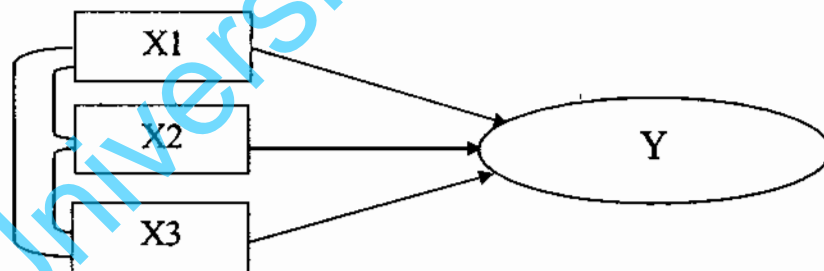
Tabel 2.6
Operasional Variabel Bebas Pembelajaran Organisasi (X₃)

Variabel	Dimensi	Indikator	No.
Pembelajaran organisasi	Sistem berfikir	Menunjukkan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan daerah	19
		Menunjukkan kemampuan dalam proses penateusahaan pendapatan daerah	20
		Memiliki landasan pemikiran akuntansi dan manajemen keuangan dalam proses pengelolaan pendapatan daerah	21
	Kinerja	Mengapresiasi sistem pengalokasian waktu	22
		Melibatkan diri dalam setiap keputusan	23
		Menunjukkan kemampuan dalam prestasi individu	24
		Menerapkan pendekatan pola aktivitas dalam tugas	25
	Keahlian profesionalitas	Profesionalisme dalam tugas	26
		Keterampilan dalam proses pengelolaan keuangan daerah	27
		Pemahaman terhadap akuntansi dan manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah	28

Tabel 2.7
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Variabel	Dimensi	Indikator	No.
Kinerja pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan pendapatan daerah	Proses perencanaan pendapatan daerah	29
		Prosedur perencanaan pendapatan daerah	30
		Penguasaan manajemen perencanaan pendapatan daerah	31
		Penguasaan akuntansi perencanaan pengelolaan pendapatan daerah	32
	Penatausahaan pendapatan daerah	Pelaksanaan dan upaya peningkatan dana transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber pendapatan daerah lainnya	33
		Pengelolaan pendapatan daerah	34
		Proses akuntansi pengelolaan keuangan daerah	35
		Prosedur manajemen pengelolaan keuangan daerah	36
	Pertanggung-jawaban keuangan daerah	Pengelolaan dana pendapatan daerah	37
		Pengelolaan laporan pendapatan daerah dan penguasaan manajemen pertanggungjawaban pendapatan daerah	38
		Penguasaan akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah	39

Hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.4 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Keterangan:

- X1 = Kompetensi (variabel bebas)
- X2 = Partisipasi anggaran (variabel bebas)
- X3 = Pembelajaran organisasi (variabel bebas)
- Y = Kinerja pengelolaan keuangan daerah (variabel terikat)

Pada gambar 2.4 tersebut dapat dilihat pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran, dan pembelajaran organisasi PNS secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP. Dan pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi secara simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

2. Metode Pengukuran Variabel

Untuk mengukur variabel-variabel yang sudah diidentifikasi digunakan instrumen dan alat ukur sebagai berikut :

Tabel 2.8 Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Konseptual	Kriteria/Ukuran	Skala Pengukuran
Dependen	Kinerja pengelolaan keuangan daerah	Penerimaan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP	3 poin skala pada 11 item pengukuran	Ordinal
Independen	Kompetensi (X1)	Kompetensi adalah keahlian yang dimiliki perusahaan dan pengetahuan yang diarahkan untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya	3 poin skala pada 12 item pengukuran	Ordinal
Independen	Partisipasi anggaran (X2)	Proses yang menggambarkan keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut	3 poin skala pada 6 item pengukuran	Ordinal
Independen	Pembelajaran organisasi (X3)	Seperangkat perilaku organisasi yang menunjukkan komitmen untuk belajar dan terus melakukan perbaikan	3 poin skala pada 10 item pengukuran	Ordinal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Dimana proses penelitian yang dilaksanakan dapat selesai dalam waktu 6 bulan, dimulai dari seminar usulan penelitian hingga menyelesaikan tesis. Jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan Tahun 2011							Ket
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	
1	Tahap I Penelitian Penyusunan Usulan								
	a. Menyusun Usulan Penelitian	■							
	b. Sidang Usulan Penelitian	■							
	c. Perbaikan Usulan Penelitian	■							
2	Tahap II Penulisan Tesis								
	a. Penyusunan kuesioner		■						
	b. Analisis dan pengolahan data		■						
	c. Penulisan Laporan Tesis			■					
	d. Bimbingan Tesis			■					
3	Tahap III Sidang Tesis								
	a. Bimbingan Akhir Tesis			■					
	b. Perbaikan Tesis			■	■	■	■	■	
4	Sidang Tesis								November 2011

2. Jenis Penelitian

Umar (2002) menyatakan bahwa rancangan atau desain penelitian umumnya terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu penelitian eksploratif (*explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*) dan penelitian penjelasan (*explanatory research*).

Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Terakhir, penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Jenis penelitian ini adalah survei, dengan metode deskriptif analitis.

Ridwan (2007:217) menyatakan bahwa metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif dan pada akhir penelitian akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian. Dan pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

B. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam suatu penelitian selalu terdapat populasi yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2006:130) "Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian". Populasi dalam penelitian ini adalah PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Arikunto (2006:131) "sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti". Sedangkan menurut Narbuko (2009:107), "sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian". Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi untuk dijadikan obyek dalam penelitian. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa jumlah PNS yang bekerja di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit dan untuk keakuratan data penelitian, maka penulis mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel atau dengan cara sensus.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan tujuan untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi responden yang dianggap memahami dan terkait langsung dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan media kuesioner / angket dengan tingkat pengukuran ordinal. Setiap jawaban

responden akan dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkap dengan kata – kata (Riduan,2002:12 -13).

Alat ukur penelitian ini berbentuk angket, dengan tingkat pengukuran ordinal, katagori jawaban terdiri atas 4 tingkatan. Untuk analisis secara kuantitatif, maka alternatif jawaban tersebut dapat diberi skor dari 1 sampai 4 sebagai berikut:

a. Terdapat empat alternatif jawaban untuk variabel kompetensi, yaitu :

- 4 : Sangat menguasai / terampil (*highly mastered*)
- 3 : Cukup menguasai / terampil
- 2 : Kurang menguasai / kurang terampil
- 1 : Tidak menguasai / tidak terampil

b. Ada empat alternatif jawaban untuk variabel partisipasi anggaran, yaitu :

- 4 : Sangat partisipatif
- 3 : Cukup partisipatif
- 2 : Kurang partisipatif
- 1 : Tidak partisipatif

c. Ada empat alternatif jawaban untuk variabel pembelajaran organisasi, yaitu :

- 4 : Sangat mampu
- 3 : Cukup mampu
- 2 : Kurang mampu
- 1 : Tidak mampu

d. Ada empat alternatif jawaban untuk variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- 4 : Baik
- 3 : Cukup
- 2 : Sedang / kurang
- 1 : Buruk

D. Prosedur pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada SKPD yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung dari perusahaan / SKPD). Data primer ini didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Metode pengamatan atau *observasi* adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti, juga pengamatan atas kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penulisan laporan ini, diadakan pengamatan langsung pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Metode wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, *interview* dilakukan di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.
 - c. Kuesioner
Teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dimana dalam penelitian ini sebagai responden adalah PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, agar dapat memberikan respon/ jawaban yang sebenarnya atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Studi pustaka (*library research*), merupakan data sekunder penelitian yang dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat-pendapat yang

dikemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan melalui beberapa tahap yakni :

1. Uji persyaratan analisis

a. Uji validitas dan uji reliabilitas

1). Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur item-item pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan / pernyataan kuesioner adalah *korelasi product moment* dari Karl Pearson dengan ketentuan bahwa : jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka skor butir pertanyaan / pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka skor butir pertanyaan / pernyataan kuesioner tidak valid.

2). Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi antara hasil pengamatan dengan instrumen atau alat ukur yang digunakan pada waktu yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas

pengamatan adalah dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu instrumen dapat dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Nunnally dalam Ghazali (2006) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

c. *Coding* (Pengkodean)

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

d. Tabulasi

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak (Ghozali:2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan histogram dan kurva penyebaran *probability plot* (P-Plot). Melalui pola penyebaran *P-Plot*, data dikatakan berdistribusi normal jika pola penyebaran memiliki garis normal atau garis yang menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai $tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali:2006).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain adalah tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, atau dengan kata lain tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik - titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain itu,

heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *glesjer*. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali:2006).

d. Uji Autokorelasi,

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW). Jika nilai Durbin – Watson terletak antara -2 sampai $+2$, maka tidak terjadi autokorelasi (Ghozali:2006).

3. Model Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Dalam uji ini digunakan nilai α (alpha) 5%. Dengan ketentuannya adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinilai berdasarkan hasil uji hipotesis, dimana ditunjukkan oleh tabel koefisien pada kolom signifikasi, yaitu ditunjukkan nilai $< \alpha$ (alpha) 5%. Selanjutnya, dilakukan pula penilaian setiap variabel bebas yang dilakukan untuk melihat variabel apa yang memberikan pengaruh paling dominan diantara variabel yang ada. Pengujian dilakukan dengan uji t atau biasa disebut uji parsial. Tingkat pengaruh yang signifikan juga didasarkan pada α (alpha) 5% atau melihat nilai t hitung harus lebih besar dari nilai t tabel. Dan sebaliknya, jika t hitung $<$ dari t tabel maka pengaruh yang terjadi tidak signifikan.

F. Gambaran Umum Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka Barat adalah *buffer area* (daerah penyangga) antara dua ibukota provinsi yaitu Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan dengan dibatasi Selat Bangka dan Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Muntok, ibukota Kabupaten Bangka Barat berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional yang ramai menuju Singapura dan Selat Malaka. Kabupaten Bangka Barat memiliki luas wilayah kurang lebih 2.820,61 Km² atau sekitar 282.061 Ha. Dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 175.000 jiwa. Sektor industri metalurgi peleburan timah dan perkebunan kelapa sawit mendominasi PDRB selain perdagangan dan sektor jasa di Kabupaten Bangka Barat.

Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat menjadi objek dalam penelitian ini merupakan pengelola pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP. Responden pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terdiri atas pejabat eselon dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (kepala dinas, kepala bidang, kepala sub bagian / kepala seksi dan staf di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat). Pada responden diketahui jenis kelamin terbanyak adalah pria sebesar 26 orang (70,27%) dengan kategori umur terbanyak antara 20-40 tahun sebesar 31 orang (83,78%). Pendidikan responden Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terbanyak adalah S1 sebesar 20 orang (54,05%) sedangkan jabatan responden dengan proporsi terbesar adalah staf (64,86%) dan kepala sub bagian / kepala seksi (24,32%).

Berikut ini adalah deskripsi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2004 sampai dengan tahun 2010.

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

PAD Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan yang signifikan PAD Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh jasa giro dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di bank daerah yaitu Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel). Dibawah ini merupakan tabel pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai tahun 2004 – 2010.

Tabel 4.1 Pertumbuhan PAD Kab. Bangka Barat 2004 - 2010
(dalam ribuan rupiah)

PAD	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Pertumbuhan
2004	9,624,100.00	10,250,975.00	106.51	0
2005	12,079,046.00	14,550,692.00	120.46	41.94
2006	15,489,429.00	17,155,764.00	110.76	17.90
2007	17,208,858.00	22,224,342.00	129.14	29.54
2008	22,277,500.00	26,376,771.00	118.40	18.68
2009	21,595,314.00	26,597,049.00	123.16	0.84
2010	26,390,902.00	27,530,497.00	104.32	3.51

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Bangka Barat, 2004 - 2010

Masih rendahnya sektor pajak daerah dan retribusi menjadikan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Usaha peningkatan PAD harus terus dilaksanakan agar ditahun – tahun mendatang PAD Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Pertumbuhan Dana Alokasi Umum

DAU yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dari perkembangan DAU itu sendiri, dimana pada tahun 2004 jumlah

DAU untuk Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar Rp 42.217.000.000,- dan kemudian meningkat secara signifikan untuk tahun anggaran 2010 menjadi Rp 217.122.438.000,00.

Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan DAU Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai tahun 2004 – 2010.

Tabel 4.2 Pertumbuhan DAU Kab. Bangka Barat 2004 - 2010
(dalam ribuan rupiah)

DAU	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Pertumbuhan
2004	42,217,000.00	42,216,500.00	100.00	0
2005	55,370,000.00	55,370,000.00	100.00	31.16
2006	186,185,000.00	186,185,000.00	100.00	236.26
2007	188,769,000.00	188,769,000.00	100.00	1.39
2008	228,461,981.00	228,461,981.00	100.00	21.03
2009	219,252,201.00	219,252,201.00	100.00	(4.03)
2010	217,122,438.00	217,122,438.00	100.00	(0.97)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Bangka Barat, 2004 - 2010

Pada dasarnya terdapat dua jenis *grant* yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Mardiasmo, 2007:157) yaitu : *block grant* (Dana Alokasi Umum) dan *specific grant* (Dana Alokasi Khusus).

Dalam rangka peningkatan *local discretion*, *grant* yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant* bukan *specific grant*. Pada perhitungan DAU menggunakan dua faktor yaitu faktor murni dan faktor penyeimbang. Perhitungan DAU faktor murni adalah berdasarkan formula, sedangkan perhitungan faktor penyeimbang adalah merupakan suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah.

Dengan demikian, DAU Kabupaten Bangka Barat menempati posisi yang sangat strategis dalam kerangka desentralisasi.

3. Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus

DAK diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan DAK Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai tahun 2004 – 2010.

Tabel 4.3 Pertumbuhan DAK Kab. Bangka Barat 2004 - 2010
(dalam ribuan rupiah)

DAK	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Pertumbuhan
2004	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0
2005	31,220.00	31,220.00	100.00	(99.22)
2006	23,910,000.00	23,910,000.00	100.00	76,485.52
2007	40,921,000.00	27,765,300.00	67.85	16.12
2008	47,477,000.00	42,729,300.00	90.00	53.89
2009	40,002,000.00	40,002,000.00	100.00	(6.38)
2010	21,883,200.00	21,883,200.00	100.00	(45.29)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Bangka Barat, 2004 - 2010

Sejak DAK dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2004, DAK telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, baik sisi besaran alokasi maupun cakupan bidang yang didanai dari DAK. Pada tahun 2004 alokasi DAK sebesar Rp 4.000.000.000,- hanya dialokasi untuk satu bidang yaitu prasarana pemerintahan, dana tersebut digunakan untuk pembangunan kantor Bupati Bangka Barat dan gedung DPRD Kabupaten Bangka Barat. Di tahun 2010, Alokasi DAK bagian Kabupaten Bangka Barat meningkat menjadi Rp 21.883.200.000,00 untuk mendanai 11 (sebelas) bidang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang jalan, bidang irigasi, bidang air minum / sarana dan prasarana air bersih, bidang sanitasi, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan peternakan, bidang

lingkungan hidup, bidang keluarga berencana dan bidang kehutanan.

4. Pertumbuhan Dana Bagi Hasil

Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan DBH Pajak dan Bukan Pajak Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai tahun 2004 – 2010. Data tersebut didasarkan pada hasil kalkulasi DBH Pajak dan Bukan Pajak untuk Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4.4 Pertumbuhan DBH Kab. Bangka Barat 2004 - 2010
(dalam ribuan rupiah)

DBH	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Pertumbuhan
2004	15,000,690.00	21,552,896.00	143.68	0
2005	20,531,081.00	30,143,961.00	146.82	39.86
2006	21,080,898.00	30,723,750.00	145.74	1.92
2007	27,827,927.00	46,742,154.00	167.97	52.14
2008	18,617,266.00	86,637,681.00	465.36	85.35
2009	73,503,732.00	73,527,604.00	100.03	(15.13)
2010	64,666,691.00	64,666,691.00	100.00	(12.05)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Bangka Barat, 2004 - 2010

DBH terbagi menjadi dua yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak yang diterima oleh daerah ditentukan berdasarkan formula sesuai dengan peraturan yang berlaku. DBH pajak bersumber dari : (1) Pajak Penghasilan (PPh) WP Orang Pribadi Dalam Negeri, (2) PPh Pasal 21, (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sejak tahun 2010 pengelolaannya diserahkan kepada daerah. Sedangkan DBH Bukan Pajak sumber penerimaannya adalah berasal dari : (1) Pertambangan minyak bumi, (2) Pertambangan gas bumi, (3) Pertambangan umum, (4) Pertambangan panas bumi, (5) Kehutanan dan (6) Perikanan.

5. Pertumbuhan Dana Transfer Pemerintah Provinsi

DTTP, dimana untuk Kabupaten Bangka Barat merupakan penyaluran dana dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dana ini berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan pemberian bantuan atau DABA (Dana Bantuan) provinsi.

Data berikut ini merupakan penambahan DBH Pajak Provinsi dan Dana Bantuan (DABA) bagian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2004 – 2009.

Tabel 4.5 Pertumbuhan DTPP Kab. Bangka Barat 2004 - 2010
(dalam ribuan rupiah)

DTPP	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% Pertumbuhan
2004	4,884,256.00	4,884,256.00	100.00	0
2005	7,424,717.00	10,674,717.00	143.77	118.55
2006	13,659,269.00	13,659,269.00	100.00	27.96
2007	10,481,016.00	14,111,076.00	134.63	3.31
2008	12,791,387.00	18,075,812.00	141.31	28.10
2009	13,117,730.00	13,117,730.00	100.00	(27.43)
2010	24,464,429.00	24,464,429.00	100.00	86.50

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kab. Bangka Barat, 2004 - 2010

DBH Pajak Provinsi merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan dimana besaran tarif untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia. Sementara untuk DABA (Dana Bantuan) penetapannya dilakukan oleh gubernur yang kemudian diberikan kepada seluruh kabupaten / kota yang berada dalam provinsi tersebut.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam proses pengumpulan data kuantitatif, menyebarkan kuesioner kepada para responden dan kemudian dilakukan penghitungan data jawaban responden tersebut melalui program komputer agar data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dapat mengurangi tingkat kesalahan.

Berikut adalah deskripsi data, pengujian persyaratan analisis dan pengujian hipotesis yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada PNS yang terdapat pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang responden. Empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kompetensi (X_1), variabel partisipasi anggaran (X_2), variabel pembelajaran organisasi (X_3) sebagai variabel bebas dan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) sebagai variabel terikat. Berikut adalah gambaran mengenai variabel – variabel yang menjadi dasar pertanyaan kuesioner penelitian tersebut.

a. Variabel kompetensi teknis (X_1)

Pada variabel kompetensi, hasil pengolahan data komputer pada program SPSS versi 16.0 (terlampir) memiliki *mean* 27,6216, *median* 28,0000, *standar deviasi* 7,47348, *variance* 55,853, *range* 43, *minimum* 0.00, *maximum* 43.

Untuk variabel kompetensi (X_1) skor frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Skor Frekuensi Data Variabel Kompetensi (X_1)

Kompetensi (X_1)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	2.7	2.7	2.7
	16	1	2.7	2.7	5.4
	17	1	2.7	2.7	8.1
	20	1	2.7	2.7	10.8
	21	1	2.7	2.7	13.5
	23	1	2.7	2.7	16.2
	24	6	16.2	16.2	32.4
	25	1	2.7	2.7	35.1
	26	2	5.4	5.4	40.5
	27	2	5.4	5.4	45.9
	28	5	13.5	13.5	59.5
	30	2	5.4	5.4	64.9
	31	1	2.7	2.7	67.6
	32	5	13.5	13.5	81.1
	34	1	2.7	2.7	83.8
	36	4	10.8	10.8	94.6
	38	1	2.7	2.7	97.3
	43	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sumber : SPSS versi 16.0

Sebagai gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel kompetensi (X_1) (terlampir), disajikan distribusi frekuensi sebagai berikut :

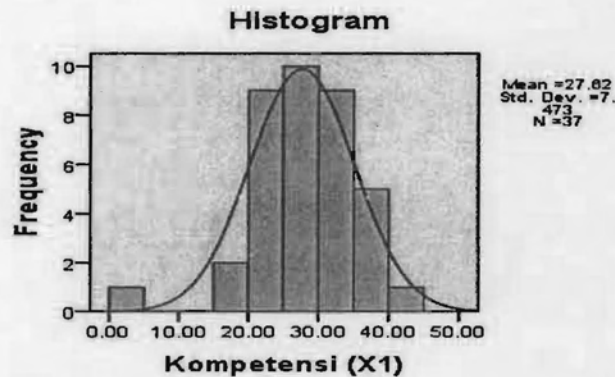
Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Data Variabel Kompetensi (X_1)

No	Skor	Frekuensi	Persen (%)	Kumulatif Persen (%)
1	0 – 8	1	2,70	2,70
2	9 – 17	2	5,41	8,11
3	18 – 26	12	32,43	40,54
4	27 – 35	16	43,24	83,78
5	36 – 43	6	16,22	100
	Total	37	100	

Sumber : data diolah kembali

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa 16 responden atau 43,24% berada pada kelompok rata-rata, 15 responden atau 40,54% berada di bawah rata-

rata, dan 6 responden atau 16,22 % berada di atas rata-rata. Pada histogram frekuensi berikut dapat dilihat gambaran yang lebih jelas.



Sumber SPSS versi 16.0

Gambar 4.1 Histogram Frekuensi Variabel Kompetensi (X₁)

b. Variabel Partisipasi Anggaran (X₂)

Pada variabel partisipasi anggaran, hasil pengolahan data komputer pada program SPSS versi 16.0 (terlampir) memiliki *mean* 12,8649, *median* 13,0000, *standar deviasi* 4,73264, *variance* 22,398, *range* 22, *minimum* 0, *maximum* 22. Untuk variabel partisipasi anggaran (X₂) skor frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Skor Frekuensi Data Variabel Partisipasi Anggaran (X₂)

Partisipasi Anggaran (X ₂)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	2.7	2.7	2.7
	6	2	5.4	5.4	8.1
	7	4	10.8	10.8	18.9
	9	2	5.4	5.4	24.3
	10	1	2.7	2.7	27.0
	11	2	5.4	5.4	32.4
	12	6	16.2	16.2	48.6
	13	4	10.8	10.8	59.5
	15	2	5.4	5.4	64.9
	16	2	5.4	5.4	70.3
	17	3	8.1	8.1	78.4
	18	6	16.2	16.2	94.6
	19	1	2.7	2.7	97.3
	22	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sumber : SPSS versi 16.0

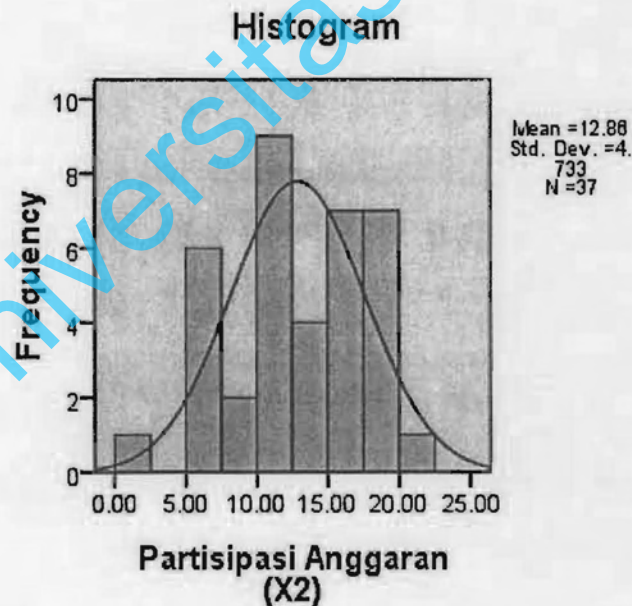
Sebagai gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel partisipasi anggaran (X_2) (terlampir), disajikan distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Data Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)

No	Skor	Frekuensi	Persen (%)	Kumulatif Persen (%)
1	0 – 4	1	2,70	2,70
2	5 – 9	8	21,62	24,32
3	10 – 14	13	35,14	59,46
4	15 – 19	14	37,84	97,30
5	20 – 24	1	2,70	100
Total		37	100	

Sumber : data diolah kembali

Dari tabel 4.9 terlihat bahwa 13 responden atau 35,14% berada pada kelompok rata-rata, 9 responden atau 24,32% berada di bawah rata-rata, dan 15 responden atau 40,54 % berada di atas rata-rata. Pada histogram frekuensi berikut dapat dilihat gambaran yang lebih jelas.



Sumber SPSS versi 16.0

Gambar 4.2 Histogram Frekuensi Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)

c. **Variabel Pembelajaran organisasi (X_2)**

Pada variabel pembelajaran organisasi, hasil pengolahan data komputer pada program SPSS versi 16.0 (terlampir) memiliki *mean* 24,7838, *median* 26,0000, *standar deviasi* 6,50698, *variance* 42,341, *range* 37, *minimum* 0, *maximum* 37. Untuk variabel pembelajaran organisasi (X_3) skor frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Skor Frekuensi Data Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)

Pembelajaran Organisasi (X_3)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	2.7	2.7	2.7
	15	1	2.7	2.7	5.4
	16	1	2.7	2.7	8.1
	17	1	2.7	2.7	10.8
	18	1	2.7	2.7	13.5
	19	1	2.7	2.7	16.2
	20	3	8.1	8.1	24.3
	21	1	2.7	2.7	27.0
	23	2	5.4	5.4	32.4
	24	1	2.7	2.7	35.1
	25	5	13.5	13.5	48.6
	26	3	8.1	8.1	56.8
	27	2	5.4	5.4	62.2
	28	2	5.4	5.4	67.6
	29	3	8.1	8.1	75.7
	30	6	16.2	16.2	91.9
	31	1	2.7	2.7	94.6
	33	1	2.7	2.7	97.3
	37	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sumber : SPSS versi 16.0

Sebagai gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel pembelajaran organisasi (X_3) (terlampir), disajikan distribusi frekuensi sebagai berikut :

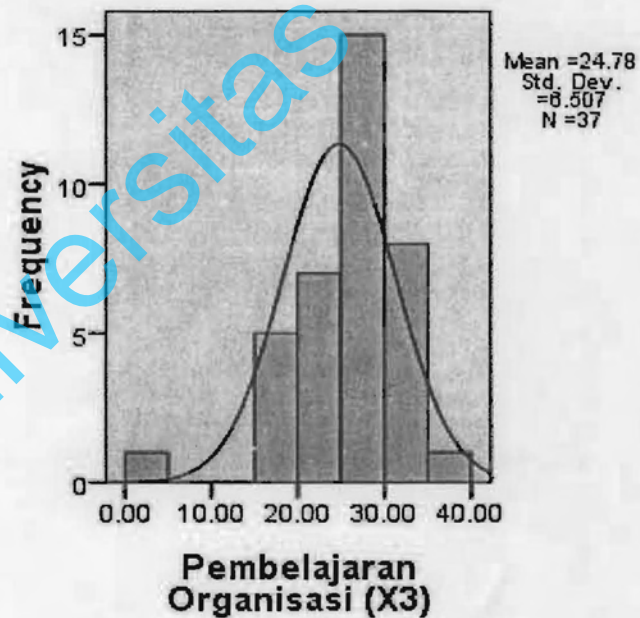
Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Data Variabel Pembelajaran Organisasi (X₃)

No	Skor	Frekuensi	Persen (%)	Kumulatif Persen (%)
1	0 – 7	1	2,70	2,70
2	8 – 15	1	2,70	5,40
3	16 – 23	10	27,03	32,43
4	24 – 31	23	62,16	94,59
5	32 – 40	2	5,41	100
Total		37	100	

Sumber : data diolah kembali

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa 23 responden atau 62,16% berada pada kelompok rata-rata, 12 responden atau 32,43% berada di bawah rata-rata, dan 2 responden atau 5,41% berada di atas rata-rata. Pada histogram frekuensi berikut dapat dilihat gambaran yang lebih jelas.

Histogram



Sumber SPSS versi 16.0

Gambar 4.3 Histogram Frekuensi Variabel Pembelajaran Organisasi (X₃)

d. Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pada variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah, hasil pengolahan data komputer pada program SPSS versi 16.0 (terlampir) memiliki *mean* 25,4865, *median* 27,0000, *standar deviasi* 8,59787, *variance* 73,923, *range* 43, *minimum* 0, *maximum* 43. Untuk variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) skor frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Skor Frekuensi Data Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	2	5.4	5.4	5.4
	16	2	5.4	5.4	10.8
	18	1	2.7	2.7	13.5
	20	2	5.4	5.4	18.9
	21	1	2.7	2.7	21.6
	22	5	13.5	13.5	35.1
	23	3	8.1	8.1	43.2
	25	1	2.7	2.7	45.9
	27	2	5.4	5.4	51.4
	28	4	10.8	10.8	62.2
	29	2	5.4	5.4	67.6
	31	2	5.4	5.4	73.0
	32	1	2.7	2.7	75.7
	33	6	16.2	16.2	91.9
	34	1	2.7	2.7	94.6
	35	1	2.7	2.7	97.3
	43	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Sumber : SPSS versi 16.0

Sebagai gambaran frekuensi hasil data penelitian variabel kompetensi (X₁) (terlampir), disajikan distribusi frekuensi sebagai berikut :

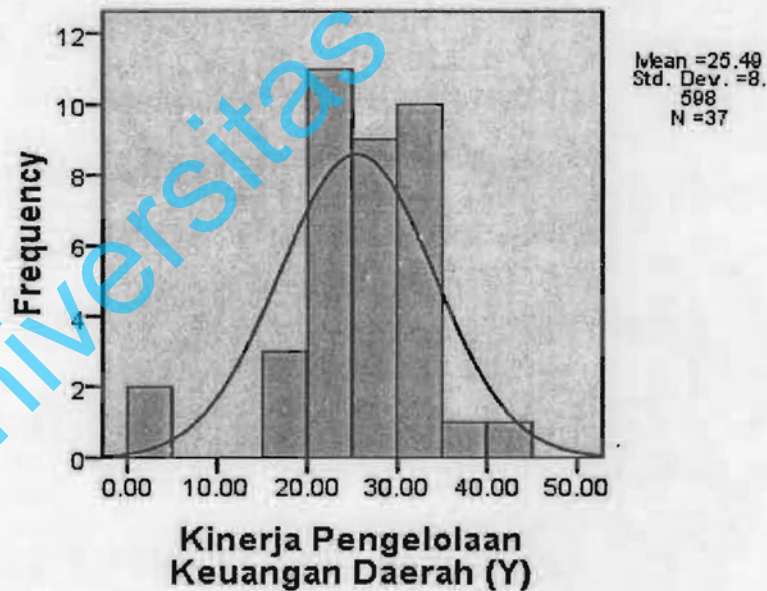
Tabel 4.13
Distribusi Frekuensi Data Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

No	Skor	Frekuensi	Persen (%)	Kumulatif Persen (%)
1	0 – 8	2	5,41	5,41
2	9 – 17	2	5,41	10,82
3	18 – 26	13	35,13	45,95
4	27 – 35	19	51,35	97,30
5	36 – 44	1	2,70	100
Total		37	100	

Sumber : data diolah kembali

Dari tabel 4.13 terlihat bahwa 13 responden atau 35,13% berada pada kelompok rata-rata, 4 responden atau 10,82% berada di bawah rata-rata, dan 20 responden atau 54,05% berada di atas rata-rata. Pada histogram frekuensi berikut dapat dilihat gambaran yang lebih jelas.

Histogram



Sumber SPSS versi 16.0

Gambar 4.4
Histogram Frekuensi Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

2. Pengujian Persyaratan Analisis

Pada pengujian persyaratan analisis, pengujian akan dilaksanakan setelah dilakukannya pendeskripsian data hasil penelitian. Uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi adalah pengujian persyaratan analisis yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Berikut diuraikan masing-masing uji persyaratan analisis :

a. Uji Reliabilitas dan Validitas

Untuk mengecek konsistensi alat ukur dan validitas dari masing-masing kuesioner digunakan uji reliabilitas dan validitas pada data mentah. Agar memperoleh hasil penghitungan yang akurat, digunakan program SPSS versi 16.0 pada komputer dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1). Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Arikunto (2006:154) adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Bila suatu instrumen atau alat pengukur data dipakai dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut dikatakan handal.

Uji statistik dilakukan dengan menggunakan metode *cronbach alpha* yang membandingkan dan mengukur korelasi antar jawaban responden pada tahap uji coba kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel bila nilai *cronbach alpha* terhitung lebih besar dari 0,60 atau bila hasil penghitungan mendekati nilai 1,00 maka kuesioner dapat dikatakan handal dan layak digunakan. Melalui penghitungan dengan bantuan

komputer Program SPSS 16.0 diperoleh nilai koefisien reliabilitas *alpha cronbach* (terlampir), sebagai berikut :

Tabel 4.14
Koefisien *Reliability* Variabel Kompetensi (X₁)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.956	.957	12

Sumber : SPSS versi 16.0

Tabel 4.15
Koefisien *Reliability* Variabel Partisipasi Anggaran (X₂)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.940	.944	6

Sumber : SPSS versi 16.0

Tabel 4.16
Koefisien *Reliability* Variabel Pembelajaran Organisasi (X₃)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.935	.937	10

Sumber : SPSS versi 16.0

Tabel 4.17
Koefisien *Reliability* Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.964	.966	11

Sumber : SPSS versi 16.0

Dengan melihat hasil koefisien reliabilitas (*alpha cronbach*) yang tertera pada tabel diatas, yaitu variabel kompetensi (X_1) dengan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,956, variabel partisipasi anggaran (X_2) dengan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,940, variabel pembelajaran organisasi (X_3) dengan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,935 dan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) dengan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,964, dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan reliabel, artinya semua instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah tergolong baik.

2). Uji Validitas

Validitas menurut Arikunto (2006:144) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat - tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Dengan demikian validitas merupakan suatu kriteria yang dijadikan tolok ukur untuk menunjukkan tingkat kesahihan suatu alat pengukur data.

Rumus korelasi dari *pearson product moment* digunakan dalam pengujian validitas instrumen atau alat ukur data dalam penelitian ini. Jika suatu instrumen menghasilkan data yang mempunyai validitas tinggi ketika menggali suatu data, maka instrumen tersebut dikatakan valid.

Hasil yang diperoleh dalam perhitungan dengan teknik korelasi *product moment* adalah koefisiensi butir (r_{hitung}) untuk 12, 6, 10 dan 11 butir instrumen (kuesioner) dengan sampel sebanyak 37 orang ($n = 37$ orang), dengan $\alpha = 0,05$ didapat r_{tabel} 0,1507, artinya bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir kuesioner tersebut tidak valid, dan apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir kuesioner tersebut dapat digunakan (valid). Pada masing-

masing variabel dengan perhitungan statistik (terlampir), ternyata bahwa r_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} , sehingga dapat dikatakan semua butir kuesioner berpredikat valid. Pada tabel berikut ini disajikan nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen setiap variabel.

a). Variabel Kompetensi

Pada tabel 4.18 berikut dapat dilihat nilai-nilai koefisien korelasi dari uji validitas untuk variabel kompetensi, pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* nilai r_{hitung} dapat dilihat untuk setiap nilai kuesionernya melebihi nilai r_{tabel} . Berdasarkan data yang tertera pada tabel dibawah, dapat diketahui bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel kompetensi (X_1) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} , sehingga seluruh instrumen sebanyak 12 butir dikatakan valid.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas
Variabel Kompetensi (X_1)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	25.1351	48.009	.768	.718	.953
P2	24.9730	47.749	.652	.507	.957
P3	25.1892	47.713	.757	.704	.954
P4	25.4324	46.586	.864	.871	.950
P5	25.3784	47.131	.826	.746	.952
P6	25.3514	45.512	.816	.771	.952
P7	25.3243	46.614	.814	.751	.952
P8	25.0811	49.688	.627	.578	.957
P9	25.4324	47.419	.880	.931	.950
P10	25.4885	46.979	.807	.770	.952
P11	25.5135	45.979	.884	.911	.950
P12	25.5405	46.033	.776	.780	.953

Sumber : SPSS versi 16.0

b). Variabel Partisipasi Anggaran

Pada tabel 4.19 dibawah dapat dilihat nilai-nilai koefisien korelasi dari uji validitas untuk variabel partisipasi anggaran. Pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*, nilai r_{hitung} dilihat untuk setiap nilai kuesionernya melebihi nilai r_{tabel} . Berdasarkan data yang tertera pada tabel dibawah, dapat diketahui bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel partisipasi anggaran (X_2) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} dan seluruh instrumen sebanyak 6 butir dikatakan valid.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas
Variabel Partisipasi Anggaran (X_2)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	10.6216	15.964	.825	.743	.928
P2	10.8378	16.751	.811	.770	.931
P3	10.9459	16.497	.863	.838	.925
P4	10.7568	14.523	.795	.807	.936
P5	10.6216	15.020	.874	.915	.921
P6	10.5405	15.700	.809	.872	.929

Sumber : SPSS versi 16.0

c). Variabel Pembelajaran Organisasi

Nilai - nilai koefisien korelasi dari uji validitas untuk variabel pembelajaran organisasi dapat dilihat dari tabel 4.20 dibawah, pada

kolom *Corrected Item-Total Correlation*, nilai r_{hitung} dilihat untuk setiap nilai kuesionernya melebihi nilai r_{tabel} .

Tabel 4.20
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas
Variabel Pembelajaran Organisasi (X_3)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	22.4595	34.422	.794	.794	.926
P2	22.3514	34.568	.757	.766	.927
P3	22.4595	34.922	.777	.820	.927
P4	22.3784	34.631	.753	.758	.928
P5	22.2432	34.134	.734	.806	.929
P6	22.2973	34.548	.720	.655	.929
P7	22.1351	34.176	.710	.797	.930
P8	21.8919	35.321	.787	.705	.927
P9	22.4054	32.970	.720	.626	.931
P10	22.4324	35.752	.710	.743	.930

Sumber : SPSS versi 16.0

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen variabel pembelajaran organisasi (X_3) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} dan seluruh instrumen sebanyak 10 butir dikatakan valid.

d). Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Nilai - nilai koefisien korelasi dari uji validitas untuk variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tabel 4.21 dibawah, pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*, nilai r_{hitung} dilihat untuk setiap nilai kuesionernya melebihi nilai r_{tabel} .

Tabel 4.21
Rekapitulasi Nilai r Untuk Uji Validitas
Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	22.9730	61.418	.658	.826	.987
P2	22.8649	62.453	.701	.868	.984
P3	23.2162	61.896	.859	.924	.959
P4	23.2973	61.270	.868	.859	.959
P5	23.4324	61.030	.847	.829	.960
P6	23.2432	61.634	.819	.788	.961
P7	23.2162	60.396	.873	.938	.959
P8	23.1892	60.324	.905	.949	.958
P9	23.0811	62.077	.851	.895	.960
P10	23.1622	60.806	.895	.914	.958
P11	23.1892	61.158	.874	.829	.959

Sumber : SPSS versi 16.0

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai-nilai koefisien korelasi untuk uji validitas instrumen pada variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) yang diperoleh lebih besar dari r_{tabel} sehingga seluruh instrumen sebanyak 11 butir dikatakan valid.

3. Uji Penyimpangan Asumsi

a. Persyaratan Normalitas Data

Ghozali (2006) menyatakan bahwa pada uji normalitas, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak. Regresi mempunyai model yang baik jika distribusi datanya mengikuti distribusi normal atau mendekati normal, dengan cara melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif pada data sesungguhnya dengan distribusi normal pada distribusi kumulatif. Pada distribusi normal, satu garis lurus diagonal akan terbentuk. Dan plotting data akan dibandingkan dengan garis normal. Garis yang menggambarkan

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya jika distribusi data adalah normal. Dimana titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, ini terlihat dari gambar hasil pengolahan, yang menunjukkan data-data penelitian terdistribusi secara normal (lihat lampiran).

Pada uji normalitas kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Distribusi *standarized residual* pada histogram memperlihatkan adanya distribusi residual yang mempunyai kecenderungan sebaran normal.

Juga sebaran data pada grafik *normal probability* memperlihatkan bahwa pada *chart* tersebut terdapat korelasi yang kuat antara *expected cumulative probability* dengan *observed cumulative probability*, sehingga memenuhi persyaratan normalitas dimana data terpencar disekitar angka nol (0 pada sumbu Y), ini ditunjukkan dengan hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* dimana tidak membentuk suatu trend pola tertentu, berarti model regresi layak untuk memprediksi kinerja pengelolaan keuangan daerah (lihat lampiran).

Sehingga tidak terjadi permasalahan dalam uji normalitas kompetensi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, uji normalitas partisipasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dan uji normalitas pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Juga uji normalitas pada kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi pada PNS

Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat secara bersama – sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

b. Uji Heterokedastisitas

Penggunaan uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lain pada sebuah model. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Pada regresi, tidak terjadi heteroskedastisitas dapat disimpulkan melalui *scatterplot*, yang dapat dianalisis melalui penyebaran titik - titik data yang berada di atas dan di bawah atau di sekitar 0, dengan tidak adanya titik - titik data yang mengumpul hanya dibawah atau diatas saja, dan tidak terbentuknya pola bergelombang yang melebar dan kemudian menyempit lalu melebar lagi pada penyebaran titik - titik data, maupun titik - titik data tersebar secara berpola.

Pada uji heterokedastisitas, keputusan dapat diambil jika titik - titiknya menyebar dan tidak terdapat pola yang jelas, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dan jika titik-titiknya membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.

Pada regresi hubungan antara kompetensi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, partisipasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, juga regresi pada kompetensi, partisipasi

anggaran dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat secara bersama – sama, diketahui data tersebut bersifat homoskedatisitas dan memenuhi persyaratan untuk analisis regresi. Pada lampiran terlihat bahwa data terpecah disekitar angka 0 (0 pada sumbu Y), dan tidak membentuk pola atau *trend* garis tertentu.

c. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW) untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada model regresi melalui program SPSS versi 16.0. Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan uji Durbin-Watson (DW) secara umum adalah jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di bawah -2 , maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika pengujian diperoleh nilai DW statistik diantara -2 sampai 2 , maka diindikasikan tidak ada autokorelasi dan jika pengujian diperoleh nilai DW statistik di atas 2 , maka diindikasikan ada autokorelasi negatif.

Tabel 4.22
Durbin-Watson

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.896 ^a	.802	.784	3.99673	1.843
a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3), Partisipasi Anggaran (X2), Kompetensi (X1)					
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)					

Sumber SPSS versi 16.0

Pada pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, nilai statistik Durbin-Watson dari

perhitungan program komputer SPSS versi 16.0 diperoleh (terlampir) adalah 1,843. Maka dalam regresi ini tidak terdapat autokorelasi dikarenakan sesuai dengan kriteria bahwa apabila Durbin-Watson adalah -2 sampai dengan 2, tidak dijumpai autokorelasi.

d. Uji Multikorelasi

Untuk mengetahui masalah multikolinearitas pada pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, digunakan uji *collinearity*, yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada *collinearity* atau tidak diantara variabel bebas. Cara yang digunakan adalah dengan menghitung *tolerance* dan VIF. melalui penghitungan program komputer SPSS versi 16.0 diperoleh nilai *tolerance* (terlampir) untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Tolerance – VIF
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.536	2.745		-.924	.362		
	Kompetensi (X1)	.109	.187	.095	.582	.565	.227	4.399
	Partisipasi Anggaran (X2)	.790	.240	.435	3.298	.002	.345	2.896
	Pembelajaran Organisasi (X3)	.599	.170	.454	3.530	.001	.363	2.751

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber SPSS versi 16.0

Pada variabel kompetensi (X₁) hasil penghitungan program komputer SPSS versi 16.0 diperoleh nilai *tolerance* (terlampir). Karena nilai *tolerance* tidak ada yang kurang (<) dari 0.10 maka dapat dikatakan tidak terjadi kolinearitas. Demikian juga dengan nilai VIF (terlampir) dari hasil

penghitungan diperoleh nilai VIF 4,399. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh tidak lebih besar ($>$) dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada kolinearitas dalam variable bebas X_1 , demikian pula dengan variabel X_2 , hasil penghitungan program komputer SPSS versi 16.0 diperoleh nilai *tolerance* (terlampir).

Karena nilai *tolerance* tidak ada yang kurang ($<$) dari 0.10 maka dapat dikatakan tidak terjadi kolinearitas. Demikian juga dengan nilai VIF (terlampir) dari hasil penghitungan diperoleh nilai VIF 2,896. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh tidak lebih besar ($>$) dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada kolinearitas dalam variable bebas X_2 .

Pada variabel pembelajaran organisasi (X_3) diperoleh hasil nilai *tolerance* (terlampir). Karena nilai *tolerance* tidak ada yang kurang ($<$) dari 0.10 maka dapat dikatakan tidak terjadi kolinearitas. Demikian juga dengan nilai VIF (terlampir) dari hasil penghitungan diperoleh nilai VIF 2,751.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh tidak lebih besar ($>$) dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada kolinearitas dalam variable bebas X_3 , dikarenakan tidak ada kolinearitas dalam variable bebas, dengan demikian model regresi berganda antara variable bebas X_1 , X_2 dan X_3 dengan variable Y telah sesuai.

4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) hipotesis akan diuji kebenarannya melalui teknik regresi berganda linier. Hipotesis tersebut adalah :

Hipotesis 1 :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi teknis PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi teknis PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

Hipotesis 2 :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi anggaran PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi anggaran PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

Hipotesis 3 :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran organisasi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran organisasi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

a. Pengaruh Kompetensi PNS terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

1). Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis ini adalah :

➤ $H_0 = 0$; atau model regresi tidak nyata

➤ $H_1 = 0$; atau model regresi nyata

Dasar pengambilan keputusan adalah :

➤ Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima

➤ Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Tabel 4.24

ANOVA^b

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1735.074	1	1735.074	65,569	.000 ^a
	Residual	926.170	35	26.462		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Pada perhitungan data, diperoleh F_{hitung} 65,569, sedangkan harga kritis nilai F_{tabel} dengan derajat bebas pembilang 1 dan penyebut 35 pada α (0,05) 4.121338. Dengan demikian F_{hitung} (65,569) > F_{tabel} (4.121338) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi variabel kompetensi teknis PNS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

2). Uji t

Pada Uji t, dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sebagai berikut :

➤ Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_1 ditolak, H_0 diterima

> Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima, H_0 ditolak

Tabel 4.25
Coefficient^a

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.172	3.280		-.053	.958		
	Kompetensi (X1)	.928	.115	.807	8.097	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Dari hasil penghitungan uji t diperoleh t_{hitung} 8,097 sedangkan harga t_{tabel} pada taraf nyata 0,025 dengan derajat bebas 36 sebesar 2.028094. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} artinya hipotesis teruji atau dengan kata lain, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kompetensi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

3). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.26
Model Summary^b

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.652	.642	5.14412	1.811

a. Predictors: (Constant), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Nilai koefisien determinasi (R^2) berdasarkan tabel 4.26 adalah 0,652 artinya 65,2% keragaman variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh kompetensi dan sisanya 34,8% disebabkan oleh faktor lain.

4). Hasil Uji Persamaan Regresi Sederhana

Model persamaan garis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat disebut persamaan regresi sederhana. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) diperoleh nilai persamaan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= b_0 + b_1X_1 \\ &= -0.172 + 0,929X_1 \end{aligned}$$

Persamaan terlihat menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 skor variabel kompetensi (X_1), berpengaruh terhadap peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) 0,929 skor.

Persamaan diatas juga menunjukkan bahwa jika kompetensi teknis PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (X_1) nilainya adalah 0, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) nilainya negatif sebesar - 0,172 skor.

5). Hasil Uji Sensivitas (*Beta Coefficient*)

Untuk melihat kepekaan variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat digunakan analisis sensitivitas. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) nilai *beta coefficient* 0,807.

Nilai *beta coefficient* tersebut mengandung pengertian bahwa setiap kenaikan 1 standar deviasi variabel kompetensi (X_1) akan meningkatkan 0,807 standar deviasi dari variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y).

b. Pengaruh Partisipasi Anggaran PNS terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

1). Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis ini adalah:

- $H_0 = 0$; atau model regresi tidak nyata
- $H_1 = 0$; atau model regresi nyata

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima

Dari hasil perhitungan data diperoleh F_{hitung} 68,745 sedangkan harga kritis nilai F_{tabel} dengan derajat bebas pembilang 1 dan penyebut 35 pada α (0,05) 4.121338. Dengan demikian F_{hitung} (68,745) $>$ F_{tabel} (4.121338) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi variabel partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4.27
ANOVA^b

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1763.428	1	1763.428	68.745	.000 ^a
	Residual	897.815	35	25.652		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran (X2)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : SPSS versi 16.0

2). Uji t

Dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sebagai berikut :

- > Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_1 ditolak, H_0 diterima
- > Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima, H_0 ditolak

Tabel 4.28
Coefficients^a

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.461	2.441		2.647	.012		
	Partisipasi Anggaran (X2)	1.479	.178	.814	8.291	.000	1.000	1.000

Sumber : SPSS versi 16.0

Hasil penghitungan uji t diperoleh t_{hitung} 8,291, sedangkan harga t_{tabel} pada taraf nyata 0,025 dengan derajat bebas 36 sebesar 2.028094. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} artinya hipotesis teruji atau dengan kata lain, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel partisipasi anggaran PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

3). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.29
Model Summary^b

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.814 ^a	.663	.653	5.06477	2.297

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran (X2)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : SPSS versi 16.0

Nilai koefisien determinasi (R^2) berdasarkan tabel 4.29 0,663 artinya 66,3% keragaman variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh partisipasi anggaran dan sisanya 33,7% disebabkan oleh faktor lain.

4). Hasil Uji Persamaan Regresi Sederhana

Persamaan regresi sederhana merupakan model persamaan garis untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) diperoleh nilai persamaan regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= b_0 + b_2 X_2 \\ &= 6.461 + 1.479 X_2 \end{aligned}$$

Persamaan terlihat menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 skor variabel partisipasi anggaran (X_2), berpengaruh terhadap peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) 1.479 skor.

5). Hasil Uji Sensivitas (*Beta Coefficient*)

Untuk melihat kepekaan variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat dilakukan analisis sensitivitas. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) nilai *beta coefficient* 0,814. Nilai *beta coefficient* tersebut mengandung pengertian bahwa setiap kenaikan 1 standar deviasi variabel partisipasi anggaran (X_2) akan meningkatkan 0,814 standar deviasi dari variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y).

c. Pengaruh Pembelajaran Organisasi PNS terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

1). Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis ini adalah:

- $H_0 = 0$; atau model regresi tidak nyata
- $H_1 = 0$; atau model regresi nyata

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima

Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) diperoleh F_{hitung} 71.404 sedangkan harga kritis nilai F_{tabel} dengan derajat bebas pembilang 1 dan penyebut 35 pada α (0,05) 4.121338. Dengan demikian F_{hitung} (71.404) $>$ F_{tabel} (4.121338) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi variabel pembelajaran organisasi PNS berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 4.30
ANOVA^b

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1785.867	1	1785.867	71.404	.000 ^a
	Residual	875.377	35	25.011		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

2). Uji t

Dasar pengambilan keputusan adalah membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sebagai berikut :

➤ Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_1 ditolak, H_0 diterima

➤ Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima, H_0 ditolak

Dari hasil penghitungan uji t pada program komputer SPSS 16.0 (terlampir) diperoleh t_{hitung} 8,450 sedangkan harga t_{tabel} pada taraf nyata 0,025 dengan derajat bebas 36 sebesar 2.028094. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} artinya hipotesis teruji atau dengan kata lain, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembelajaran organisasi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.31
Coefficients^a

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.340	3.279		-.409	.685		
	Pembelajaran Organisasi (X3)	1.082	.128	.819	8.450	.006	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

3). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.32
Model Summary^b

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.819 ^a	.671	.662	5.00108	2.018	

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) berdasarkan tabel 4.32 adalah 0,671 artinya 67,1% keragaman variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh partisipasi anggaran dan sisanya 32,9% disebabkan oleh faktor lain.

4). Hasil Uji Persamaan Regresi Sederhana

Model persamaan garis yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat disebut persamaan regresi sederhana. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) diperoleh nilai persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = b_0 + b_3X_3$ $= -1.340 + 1.082X_3$
--

Persamaan terlihat menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 skor variabel pembelajaran organisasi (X_3), berpengaruh terhadap peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) 1.082 skor. Persamaan diatas juga menunjukkan bahwa jika pembelajaran organisasi pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (X_3) nilainya adalah 0, maka kinerja pengelolaan keuangan daerah (Y) nilainya negatif sebesar - 1,340 skor.

5). Hasil Uji Sensivitas (*Beta Coefficient*)

Untuk melihat kepekaan variabel bebas terhadap perubahan yang terjadi pada variabel terikat digunakan analisis sensitivitas. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) nilai *beta coefficient* 0,819. Nilai *beta coefficient* tersebut mengandung pengertian

bahwa setiap kenaikan 1 standar deviasi variabel pembelajaran organisasi (X_3) akan meningkatkan 0,819 standar deviasi dari variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y).

d. Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Anggaran dan Pembelajaran Organisasi PNS terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

1). Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis ini adalah:

- $H_0 = 0$; atau model regresi tidak nyata
- $H_1 = 0$; atau model regresi nyata

Dasar pengambilan keputusan adalah :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_1 ditolak
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_1 diterima

Tabel 4.33
ANOVA^b

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2134.105	3	711.368	44.533	.000 ^a
	Residual	527.138	33	15.974		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3), Partisipasi Anggaran (X2), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Dari hasil perhitungan data dengan menggunakan SPSS versi 16.0 diperoleh F_{hitung} 44,533, sedangkan harga kritis nilai F_{tabel} dengan derajat bebas pembilang 3 dan penyebut 33 pada α (0,05) 2.891564.

Dengan demikian $F_{hitung} (44,533) > F_{tabel} (2.891564)$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi variabel kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

2). Uji t

Dasar dari pengambilan keputusan adalah membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_1 ditolak, H_0 diterima
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_1 diterima, H_0 ditolak

Tabel 4.34
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.536	2.745		-.924	.362		
	Kompetensi (X1)	.109	.187	.095	.582	.565	.227	4.399
	Partisipasi Anggaran (X2)	.790	.240	.435	3.298	.002	.345	2.896
	Pembelajaran Organisasi (X3)	.599	.170	.454	3.530	.001	.363	2.751

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Pada program komputer SPSS 16.0, hasil penghitungan uji t dijelaskan sebagai berikut :

- Pengaruh kompetensi (X_1) secara individual PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y) diperoleh t_{hitung} 0.582, sedangkan harga t_{tabel} pada taraf

nyata 0,025 dengan derajat bebas 33 sebesar 2.034515. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} artinya hipotesis telah teruji atau dengan kata lain, tidak terdapat pengaruh positif dan nyata antara variabel kompetensi (X_1) terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y).

- Pengaruh partisipasi anggaran (X_2) secara individual PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y) diperoleh t_{hitung} 3.298, sedangkan harga t_{tabel} pada taraf nyata 0,025 dengan derajat bebas 33 sebesar 2.034515. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} artinya hipotesis teruji atau dengan kata lain, terdapat pengaruh positif dan nyata antara variabel partisipasi anggaran (X_2) terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y).
- Pengaruh pembelajaran organisasi (X_3) secara individual PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y) diperoleh t_{hitung} 3.530, sedangkan harga t_{tabel} pada taraf nyata 0,025 dengan derajat bebas 33 sebesar 2.034515. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} artinya hipotesis teruji atau dengan kata lain, terdapat pengaruh positif dan nyata antara variabel pembelajaran organisasi (X_3) terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y).

3). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Table 4.35 Model Summary^b

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.896 ^a	.802	.784	3.99673	1.843

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3), Partisipasi Anggaran (X2), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Sumber : SPSS versi 16.0

Nilai koefisien determinasi (R^2) berdasarkan tabel 4.35 adalah 0,802 artinya 80,2% keragaman variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi dan sisanya 19,8% disebabkan oleh faktor lain.

4). Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda

Model persamaan garis untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan persamaan regresi berganda. Dari hasil pengolahan data program komputer SPSS 16.0 (terlampir) diperoleh nilai persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \\
 &= -2.536 + 0,109X_1 + 0,790X_2 + 0,599X_3
 \end{aligned}$$

Pada persamaan tersebut menunjukkan bahwa :

- Setiap peningkatan 1 skor variabel kompetensi (X_1), berpengaruh terhadap peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat (Y) 0,109 skor.

- Setiap peningkatan 1 skor variabel partisipasi anggaran (x_2), berpengaruh terhadap peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada DPPKA Kabupaten Bangka Barat (Y) 0,790 skor.
- Setiap peningkatan 1 skor variabel pembelajaran organisasi (X_3), berpengaruh terhadap peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah pada DPPKA Kabupaten Bangka Barat (Y) 0,599 skor.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian terhadap 4 (empat) hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini tidak semuanya berhasil diterima. Pembahasan berikut ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritis dan dukungan empiris terhadap hasil pengujian hipotesis.

1. Pengaruh kompetensi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Melalui regresi sederhana, didapatkan hasil penelitian bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pada regresi tersebut, kompetensi PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi pada kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah bagi PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sudah baik. Aspek manajemen keuangan dalam hal ini akuntansi manajemen berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah

berupa pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada kompetensi PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat juga sudah terkoordinasikan dengan baik, terlihat dari PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dapat terus meningkatkan kinerja, yang merupakan kunci dalam memperoleh keunggulan bersaing untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel pada pemerintahan daerah di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pendapat Naver dan Slater (2006) dan Touminen *et al.*, (2006) dalam ilmu manajemen yang menyatakan perusahaan yang memiliki kompetensi yang tinggi juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan bertindak berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya mengenai aksi dan reaksi pesaing, dimana akan membantu perusahaan tersebut untuk membangun keunggulan dalam persaingan.

Dalam hal ini kompetensi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka - Barat telah diaplikasikan sehingga mempunyai pengaruh yang besar pada kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat khususnya pada pendapatan daerah.

2. Pengaruh partisipasi anggaran PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Melalui regresi sederhana, didapatkan hasil penelitian bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ini sejalan dengan penelitian Yahya dkk. (2008) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Kementerian Pertahanan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial mempunyai pengaruh

positif dan signifikan terhadap partisipasi penganggaran.

Aspek manajemen keuangan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya akuntansi manajemen berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada partisipasi PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sudah terkoordinasikan dengan baik.

Pada aspek akuntansi manajemen pada perencanaan kinerja pengelolaan keuangan daerah, partisipasi anggaran PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat rata – rata baik dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula pada aspek akuntansi manajemen dalam penatausahaan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah, PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat rata – rata memiliki partisipasi anggaran yang baik pada penatausahaan pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP.

Pada aspek akuntansi manajemen dalam pelaporan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitian didapatkan juga bahwa partisipasi anggaran PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan pelaporan keuangan pada pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP berada pada tingkatan yang baik pada kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum dalam akuntansi manajemen yang dilakukan oleh PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada PAD dan proses pencapaian sasaran anggaran terutama pada DAU, DAK, DBH dan DTPP sudah berpartisipasi dengan baik. Tingkat partisipasi PNS

dipengaruhi pula oleh perilaku PNS yang aktif memberikan sumbangan pemikiran, opini, pemberian usulan dan pendapat berkenaan dengan anggaran tanpa diminta oleh atasan, semisal tentang program yang akan diusulkan anggarannya. PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat juga aktif mengoreksi hal – hal yang tidak logis dan tidak sesuai dengan anggaran sehingga pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP dapat terealisasi secara maksimal.

PNS juga berperan secara aktif dalam pencapaian target anggaran pada tahun berjalan. Partisipasi anggaran yang besar pada pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat utamanya pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP membuktikan kinerja PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang tinggi, sehingga seluruh target dan sasaran anggaran pendapatan dapat terealisasi secara keseluruhan.

Pada hasil penelitian ini juga didapatkan tidak adanya *budgetary slack* dalam penganggaran khususnya PAD pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Temuan tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Grover (2005) dimana seringkali terjadi *budgetary slack* dimana jumlah anggaran yang dengan sengaja dilaporkan melebihi sumberdaya yang dimiliki perusahaan dan mengecilkan kemampuan produktifitas yang dimilikinya.

Hasil penelitian pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ini pada akhirnya sesuai dengan penelitian Kenis (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai tujuan yang telah dianggarkan dan informasi mengenai tingkatan dimana tujuan tersebut telah tercapai dalam satu tahun anggaran memberikan dasar bagi para manajer dalam hal ini pejabat struktural pada

Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat untuk dapat mengukur tingkat efisiensi, mengidentifikasi masalah dan mengontrol biaya, utamanya dalam peningkatan pendapatan daerah.

3. Pengaruh pembelajaran organisasi PNS terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Melalui regresi sederhana, didapatkan hasil penelitian bahwa pembelajaran organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Lo dan Wang (2003) yang menyatakan bahwa pembelajaran organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan.

Aspek manajemen keuangan khususnya akuntansi manajemen berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa pendapatan daerah khususnya PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada pembelajaran organisasi PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sudah terkoordinasikan dengan baik. Pada aspek akuntansi manajemen pada perencanaan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pembelajaran organisasi yang dilakukan PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sudah baik. PNS memiliki pengetahuan yang baik dan terus melakukan pembelajaran pada organisasi khususnya pada perencanaan pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP.

Begitu pula aspek akuntansi manajemen dalam penatausahaan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah, PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat rata-rata memiliki pembelajaran organisasi yang baik pada penatausahaan pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP.

Perubahan peraturan perundang – undangan setiap tahun pada pendapatan daerah, disikapi oleh PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat melalui penatausahaan pendapatan yang baik pada setiap periode tahun anggaran.

Pada aspek akuntansi manajemen dalam pelaporan pada kinerja pengelolaan keuangan daerah, hasil penelitian didapatkan juga bahwa pembelajaran organisasi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan pelaporan keuangan pada pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP berada pada tingkatan yang baik. Pada pelaporan pelaksanaan dana transfer pemerintah pusat baik DAU, DAK dan DBH, juga DTPP baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak lain yang berkepentingan seperti pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dapat melaksanakan pelaporan keuangan dengan baik.

Hal ini terbukti dengan terealisasikannya anggaran pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada setiap periode tahun anggaran. Secara umum dalam akuntansi manajemen yang dilakukan oleh PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terhadap kinerja pengelolaan pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP sudah baik. Tingkat pembelajaran organisasi pada PNS dipengaruhi oleh sistem berfikir, kinerja dan profesionalitas PNS yang tinggi. Hal ini terbukti dari jawaban kuesioner dan melalui regresi sederhana yang dilakukan memberikan hasil yang positif dan signifikan.

perubahan lingkungan di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah melalui proses pembelajaran organisasi menjadi faktor penentu kesuksesan bagi Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

4. Pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Hasil penelitian berbeda diperoleh melalui regresi berganda untuk mengetahui pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi secara bersama – sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana didapatkan kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kurangnya kompetensi PNS jika dihubungkan dengan partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi disebabkan kurangnya jumlah PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan manajemen keuangan, sehingga pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah masih sangat kurang.

Tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah yaitu pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP ini, tidak sejalan dengan hasil penelitian Prahalad dan Hamel (2010), dimana perusahaan maupun organisasi seperti pada pemerintahan daerah sebagai SKPD yang sukses melalui kompetensi. Juga pendapat Andreasson (2005) dan Tax, Brown dan Chandrashekar (2008), dimana kompetensi teknis dapat diukur melalui tiga indikator yaitu : penguasaan *job*

description yang baik, keterampilan teknis yang baik dan penguasaan teknologi.

Pada Dinas PPKA Kabupaten tiga indikator ini mempunyai *grade* yang cukup rendah. Pada penguasaan *job description*, seringnya terjadi mutasi pejabat struktural dan staf dari SKPD yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pada akhirnya PNS tersebut harus mempelajari dari awal tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya pada penatausahaan pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP. Kedepan harus diperhitungkan mutasi yang dilakukan agar kompetensi tetap sama bagi PNS yang masuk maupun dipindahkan dari Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pada indikator keterampilan teknis yang baik, banyaknya PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang kurang memahami secara mendalam akuntansi dan manajemen keuangan dikarenakan tidak memiliki latar belakang pendidikan, juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dari akuntansi dan manajemen keuangan, sehingga mempunyai kesulitan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP.

Kedepan latar belakang pendidikan harus diperhitungkan pada PNS yang masuk maupun dipindahkan ke Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat melalui latar belakang pendidikan keuangan sehingga mempermudah untuk dilakukannya pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP. Dan pada indikator penguasaan teknologi, penguasaan sistem komputerisasi bagi PNS Kabupaten Bangka Barat juga memiliki kelemahan.

Walaupun mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan, namun rata - rata PNS tersebut tidak menguasai *soft ware* dan *hard ware* keuangan khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Sistem komputerisasi pendapatan daerah belum teraplikasi secara baik pada seluruh PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Kedepan agar PNS di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sering diberikan pelatihan khusus untuk mendalami *soft ware* dan *hard ware* terutama pada pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP, walaupun pelatihan *soft ware* dan *hard ware* tersebut dilaksanakan di luar daerah.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan pendapat Meyer dan Utterback (2006) yang menekankan peran penting kompetensi teknis baik dalam bidang teknologi, penelitian dan pengembangan (*research and development*), kompetensi pelayanan pada perusahaan atau organisasi nirlaba seperti pada SKPD di Kabupaten Bangka Barat khususnya Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai pendapat tersebut, walaupun kompetensi pelayanan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sudah cukup baik sesuai penelitian diatas, pada bidang kompetensi teknis lainnya seperti teknologi informasi serta *research and development* pada pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP masih kurang. Usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat untuk memperbaiki masalah ini, adalah melalui pembentukan reputasi yang mempengaruhi pengembangan strategi kompetensi teknis melalui pelatihan dan

kursus pendalaman teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah di Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya pada pengelolaan pendapatan daerah, juga memberikan anggaran yang cukup dalam penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah tersebut khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP, melalui peran serta PNS dalam melaksanakan hal tersebut.

Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sebagai satu – satunya SKPD yang melakukan pengelolaan pendapatan daerah PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP harus terus meningkatkan kompetensi PNS agar kedepan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kompetensi teknis pada pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP bagi PNS Dinas PPKA kabupaten / kota di Indonesia khususnya pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sangat penting karena peran pemerintahan daerah tidak hanya berfokus pada aspek belanja saja.

Aspek pendapatan daerah sangat dibutuhkan agar tidak terjadi defisit dalam pengeluaran pemerintah daerah. Usaha peningkatan pendapatan dapat terlaksana dengan baik jika PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat mempunyai kompetensi yang tinggi dalam hal pendapatan.

Untuk itu dibutuhkan usaha pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat untuk terus meningkatkan kompetensi PNS-nya, semisal dengan adanya program dan kegiatan peningkatan kompetensi PNS pada penganggaran Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, secara nasional pun perlu dimasukan program dan kegiatan peningkatan kompetensi PNS pada anggaran SKPD terutama

pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah dan peraturan perundang – undangan dibawahnya agar jika dimasa yang akan datang diberikan remunerasi pegawai bagi seluruh PNS di Indonesia, kompetensi PNS utamanya dalam pengelolaan keuangan daerah berupa pendapatan daerah telah siap dan terukur.

Dengan kata lain program dan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai penting dilakukan agar setiap PNS di Indonesia khususnya pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat mempunyai kompetensi inti sehingga remunerasi dapat diberlakukan pada PNS yang bersangkutan.

Selaras dengan pendapat tersebut PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus dapat terus meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam program pelatihan pengelolaan keuangan negara dan daerah, mengikuti kuliah akuntansi atau manajemen keuangan tanpa mengganggu jam kerja, serta terus mengaplikasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan agar pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat lebih maksimal kedepan.

Basis pendidikan manajemen keuangan dan akuntansi sangat dibutuhkan pada peningkatan pengelolaan pendapatan daerah agar peningkatan pendapatan daerah dapat terlaksana dengan baik. Kompetensi PNS harus selaras dengan aspek manajemen keuangan baik berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuacting*) dan pengawasan (*controlling*) agar mempunyai nilai signifikansi yang tinggi.

Kurangnya kompetensi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat

dikarenakan aspek manajemen yang dicanangkan melalui *leadership* (kepemimpinan) Kepala Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat kurang teraplikasikan dengan baik pada tataran pejabat struktural dan staf dibawahnya.

Hal ini terjadi bukan karena lemahnya *leadership* dari Kepala Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, namun karena kompetensi PNS dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pendapatan daerah masih kurang. Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Anggaran Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, Bapak Abimayu, SE, Ak, M.Ec.Dev., dan beberapa staf bidang keuangan Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, didapat kesimpulan bahwa penyebab kurangnya kompetensi PNS adalah disebabkan seringkali terjadi mutasi PNS masuk dan keluar dari Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. PNS yang telah mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah seringkali dimutasikan ketempat yang lain dan digantikan dengan PNS yang tidak mempunyai pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah.

Pada aspek manajemen keuangan berupa perencanaan (*planning*) kompetensi PNS, proses pembelajaran dari awal dan memakan waktu dalam periode anggaran seringkali membuat staf dan bawahan kurang dapat mengaplikasikan kebijakan dari pejabat struktural yang baru. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat adalah dengan melakukan revitalisasi pada staf PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat agar jika terjadi mutasi pejabat struktural masuk dan keluar dari Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah tetap berjalan, sesuai dan bahkan melebihi target pendapatan daerah.

Pada aspek manajemen keuangan berupa pengorganisasian (*organizing*), PNS harus tetap melakukan pekerjaan melalui pemahaman yang tinggi terhadap pendapatan daerah yaitu pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP, walaupun pada bidang yang berbeda, pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah harus terus berjalan agar jika terjadi mutasi PNS, pemahaman dan pengetahuan tentang pendapatan daerah terus dapat digunakan.

Pada aspek manajemen keuangan berupa *actuacting* (pengarahan), transfer pengetahuan terus dilakukan oleh atasan pada staf agar tidak terjadi kekurangpengetahuan (*miss information*) staf dikemudian hari. Pentingnya pemahaman staf PNS terhadap pendapatan daerah yaitu pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP perlu terus diarahkan oleh manajemen dalam hal ini pejabat struktural pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat agar peningkatan pendapatan daerah terus terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

Pada aspek manajemen keuangan berupa pengawasan (*controlling*), kompetensi PNS pada kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus ditingkatkan melalui pengawasan yang baik. Melalui pengawasan yang baik pula penilaian kinerja PNS dapat terlaksana secara maksimal.

Aspek kompetensi pada akuntansi manajemen berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan jika dilakukan bersama – sama dengan partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi belum terkoordinasi dengan baik, kelemahan ini dikarenakan pada PNS, pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan biasanya terpisah dimana penyelenggara

pelatihan berada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan bukan Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PNS untuk mempelajari aspek perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah khususnya pada pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP secara keseluruhan, dimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut langsung dikoordinasikan oleh Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Untuk partisipasi anggaran, hasil penelitian diperoleh melalui regresi berganda untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, kompetensi dan pembelajaran organisasi secara bersama – sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Didapatkan pula partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ini searah dengan penelitian Brownell (2006) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan individu PNS dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut dan pada akhirnya kinerja manajerial secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi penganggaran.

Jika anggaran pendapatan melebihi target maka penghargaan layak diberikan bagi PNS baik berupa uang maupun piagam penghargaan agar dapat memotivasi PNS untuk terus meningkatkan pendapatan daerah. Hasil

penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Darlis (2002) bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan daerah utamanya PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP keterlibatan (partisipasi) berbagai pihak dibutuhkan dalam membuat keputusan.

Partisipasi anggaran pada pendapatan daerah khususnya PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP secara bersama – sama dengan kompetensi dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan. Melalui aspek manajemen keuangan berupa perencanaan (*planning*) dan pengorganisasian (*organizing*), pada PAD PNS bersama – sama menentukan target dan sasaran pada PAD dalam satu periode anggaran.

Partisipasi anggaran PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat sangat baik, hal ini terbukti dari tercapainya sasaran anggaran bahkan dapat melebihi target anggaran. Selain itu tidak terdapatnya *budgetary slack* pada penganggaran PAD pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pada dana perimbangan pemerintah pusat berupa DAU, DAK dan DBH, PNS berperan aktif dalam bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menentukan dasar perhitungan juga konfirmasi penerimaan dan realisasi dana perimbangan ke pusat baik pada DAU, DAK, dan DBH.

Proses pengurusan dana perimbangan khususnya DAK pada pemerintah pusat dilakukan oleh PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada laporan DAK pada SKPD. Dimana laporan realisasi DAK dari SKPD – SKPD tersebut dapat terselesaikan dengan adanya partisipasi anggaran melalui penatausahaan pendapatan daerah sehingga dapat terlaksana target dan

pencapaiannya. Juga pada DTPP partisipasi anggaran melalui penatausahaan pendapatan daerah dilakukan melalui proses pencairan DTPP untuk setiap bulan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Partisipasi anggaran yang tinggi dapat terlaksana dengan tercapainya pula target realisasi pada anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, sehingga pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terjadi koordinasi yang baik melalui partisipasi anggaran PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pada aspek manajemen keuangan berupa *actuacting* (pengarahan), manajemen dalam hal ini pejabat struktural baik yang lama maupun baru pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat terus melakukan pengarahan agar target dan sasaran pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP dapat terealisasi dengan baik. Terbukti selama periode anggaran, pendapatan baik pada PAD, DAU, DAK dan DBH, juga DTPP dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terealisasi dengan baik. Khusus untuk PAD, realisasi anggaran selalu melebihi target pada satu periode anggaran.

Pada aspek manajemen keuangan berupa *controlling* (pengawasan), pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi terhadap staf PNS memberikan hasil yang baik, hal ini terbukti dengan berjalan dengan semestinya tahapan – tahapan realisasi baik melalui laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan akhir tahun pada pendapatan baik pada PAD, DAU, DAK dan DBH, juga DTPP, tentunya pada pelaksanaan realisasi dilapangan pada pendapatan daerah baik pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP tersebut

berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan target dan realisasi yang dibuat pada permulaan periode anggaran.

Pada variabel partisipasi anggaran, aspek akuntansi manajemen berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan jika dilakukan bersama – sama dengan partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi telah terkoordinasi dengan baik, hal ini berarti partisipasi anggaran yang dilakukan oleh PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ditunjang oleh kompetensi dan pembelajaran organisasi yang baik.

Untuk pembelajaran organisasi, hasil penelitian yang diperoleh melalui regresi berganda untuk mengetahui pengaruh pembelajaran organisasi, kompetensi dan partisipasi anggaran secara bersama – sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana didapatkan pembelajaran organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara bersama – sama dengan kompetensi dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa apabila Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat melakukan kegiatan pembelajaran organisasi secara berkelanjutan maka kompetensi dan partisipasi anggaran pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat akan semakin baik.

Semakin sering Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat melakukan kegiatan yang sifatnya untuk membantu meningkatkan proses pembelajaran organisasi pada pengelolaan keuangan daerah khususnya pada PAD, DAU,

DAK, DBH dan DTPP, maka akan tercipta peningkatan kemampuan PNS yang merupakan motor utama pengembangan suatu sentral pengelolaan keuangan di daerah khususnya di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pada aspek manajemen keuangan berupa perencanaan (*planning*), pembelajaran organisasi multak diperlukan, dimana PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus terus diakomodasikan untuk melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP, terutama melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam dan luar daerah juga perkuliahan kesarjanaan tanpa mengganggu jam kerja seperti yang dilakukan pada Universitas Terbuka khususnya program studi manajemen dan akuntansi bagi PNS yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Perkuliahan program magister dan doktoral juga harus dilakukan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat agar dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki keahlian yang spesifik sehingga dapat memberikan *multiplier effect* pada pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Misalnya jika satu dinas pengelolaan keuangan di suatu kabupaten mempunyai 3 – 4 PNS yang berpendidikan tingkat doktoral dan itu akan diikuti oleh 497 kabupaten / kota di Indonesia, maka pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien di seluruh Indonesia akan berjalan dengan baik, dikarenakan keahlian pengelolaan keuangan pada setiap kabupaten / kota secara profesional dapat berjalan melalui pakar – pakar keuangan negara yang berada di daerah.

Sejalan dengan tugas bekerja PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka

Barat, pegawai harus terus melakukan tugas pembelajaran organisasi tanpa mengganggu dan menghambat kewajiban kerja yang harus dijalankan. Secara institusi, Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus terus melakukan pembelajaran dengan melakukan studi banding pengelolaan keuangan daerah pada Dinas PPKA kabupaten lainnya, baik kabupaten pemekaran maupun kabupaten yang sudah lama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah pada PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP, agar peningkatan pendapatan daerah secara signifikan dapat terlaksana dimasa yang akan datang.

Penting juga untuk dilakukan studi banding keluar negeri agar secara makro PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat mengetahui pengelolaan keuangan negara dan daerah dari negara – negara maju, yang kemudian hasil dari studi banding tersebut dapat diaplikasikan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pada aspek manajemen keuangan berupa *organizing* adalah agar pembelajaran organisasi pada pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah dapat terus berjalan tanpa melihat bidang – bidang pekerjaan yang dilakukan oleh PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.

Pejabat struktural pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus terus melakukan aspek manajemen keuangan berupa *actuacting* (pengarahan) agar pembelajaran organisasi baik secara individu PNS maupun institusi dapat terus berjalan pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Sehingga jika terjadi perubahan status kepegawaian semisal dengan terjadinya mutasi, pengetahuan dan keahlian melalui pembelajaran organisasi secara terus menerus pada PNS

yang bersangkutan akan terus dapat dikembangkan.

Aspek manajemen keuangan berupa *controlling* (pengawasan) harus terus dilakukan agar pembelajaran organisasi tidak keluar dari jalur yang diarahkan berupa pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP secara profesional, transparan dan akuntabel. Pengawasan dalam pembelajaran organisasi dapat dilakukan baik melalui atasan maupun rekan kerja agar output berupa hasil pembelajaran baik individu PNS maupun organisasi dapat dihasilkan secara maksimal.

Aspek akuntansi manajemen pembelajaran organisasi pada kinerja berupa perencanaan, penatausahaan dan pelaporan jika dilakukan bersama – sama dengan kompetensi dan partisipasi anggaran telah terkoordinasi dengan baik, hal ini berarti bahwa pembelajaran organisasi yang dilakukan oleh PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat ditunjang oleh kompetensi dan partisipasi anggaran yang baik.

Penelitian pembelajaran organisasi ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap kompetensi dalam mencapai kinerja seperti (Marquardt,2011), (Grant,2010), (Prahalad dan Hamel,2010) dan (Lo dan Wang,2003). Juga pada pembelajaran organisasi bersama - sama berpengaruh terhadap partisipasi anggaran sejalan dengan penelitian Brownell (2006), Darlis (2002) dan Kenis (2006).

Secara umum penelitian ini sejalan dengan penelitian tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Subrata (2008) dimana tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Melalui pengukuran kinerja

keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat adalah baik. Juga sejalan dengan penelitian Verbeeten (2008) menyatakan adanya hubungan kinerja pada organisasi sektor publik.

Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, sehingga semakin tinggi kompetensi maka semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat atau dapat ditafsirkan bahwa hipotesis terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Lo dan Wang (2003) menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja.
2. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, sehingga semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat atau dapat ditafsirkan bahwa hipotesis terbukti. Ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Yahya dkk. (2008) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Kementerian Pertahanan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja manajerial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi penganggaran.

3. Pembelajaran organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, sehingga semakin tinggi pembelajaran organisasi maka semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat atau dapat ditafsirkan bahwa hipotesis terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Hitt *et al.*, (2007), yang menyatakan hubungan yang positif dan signifikan pembelajaran organisasi dengan kinerja.
4. Pada partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Sehingga semakin tinggi partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi maka semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat, atau dapat ditafsirkan bahwa hipotesis terbukti. Pada variabel kompetensi, khusus kompetensi bersama – sama dengan partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Sehingga Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus meningkatkan kompetensi PNS-nya agar kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya

pendapatan daerah berupa PAD, DAU, DAK, DBH dan DTPP dapat terus meningkat. Secara umum hal ini sesuai dengan penelitian pendahuluan oleh Verbeeten (2008) menyatakan adanya hubungan kinerja pada organisasi sektor publik. dan penelitian Subrata (2008) yang melakukan penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan hasil baik.

B. Saran

1. Agar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini sebagai sebagai *top level hirarchy* dari pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Barat, dapat membuat program peningkatan kompetensi PNS melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, seminar pendidikan dan meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai kejenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1)/D-IV tanpa mengganggu jam kerja seperti pada Universitas Terbuka program studi manajemen dan akuntansi, serta program peningkatan kesejahteraan untuk memotivasi PNS melalui pemberian insentif kepada PNS, atas efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Serta perlunya peningkatan pendidikan bagi PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai basis pendidikan SMU dan sederajat, diploma tiga, sarjana, dan pasca sarjana ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Agar Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat hendaknya juga melakukan terobosan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan daerah lainnya yang telah mendapatkan hasil evaluasi yang baik dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi PNS agar pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat lebih maksimal.

3. Agar PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian agar dapat memenuhi tuntutan kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi sebagai PNS profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tinggi.
4. Agar PNS pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat hendaknya terus meningkatkan kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi khususnya kompetensi dimana dalam penelitian ini kompetensi bersama - sama diregresikan dengan partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi tidak positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kedepan program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat harus dilakukan dengan terus meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan dimana peningkatan kompetensi PNS Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat tersebut melalui kerjasama dengan pihak - pihak seperti universitas, pemerintahan daerah lain di Indonesia, pemerintah pusat juga intitusi lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan bahwa objek penelitian

hanya satu dinas pengelolaan keuangan daerah yaitu Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat dari dinas sejenis yang terdapat pada 497 kabupaten / kota yang ada di Indonesia. Akan lebih baik jika kedepan dapat memperluas cakupan secara nasional sehingga dapat diketahui pengaruh kompetensi, partisipasi anggaran dan pembelajaran organisasi secara lebih mendalam serta komprehensif diseluruh Indonesia.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P.H. (2006). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Makalah disajikan pada *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Anthony, R. N. dan Govindarajan. (2003). *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 1, Buku 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Edisi Revisi VI, Cetakan Ketigabelas. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bogner, W. C. and Thomas, H. (2002). *Core Competence and Competitive Advantage: A Model and Illustrative Evidence from the Pharmaceutical Industry*, in Hamel, G. and Heene, A. (Eds.), *Competence-Based Competition*, 111-143. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Brownell, P (2006). The Role Of Accounting Data In Performance Evaluation Budgetry Participation And Organizational Effectiveness. *Journal of accounting research on Contemporary Issues in Management Accounting* vol 20 (spring): 12-27.
- Darlis, E. (2002). Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran, *Jurnal Riset dan Akuntansi Indonesia*, Vol.5, No.1.
- Chakravarthy, S. and Jiang, Q. (2009). *Stream Data Processing: A Quality of Service Perspective. Modeling, Scheduling, Load Shedding, and Complex Event Processing (Advances in Database Systems)*. New York : Springer Publishing.
- Davey, K. J. (1998). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek – Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Terjemahan Anarullah. dkk. Jakarta : UI – Press.
- Devas, et. al. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Marsi Maris. Jakarta : UI – Press.
- Devas, N. et. al. (2004). *Municipalities and finance: a sourcebook for capacity building*. London : Earthscan Publishers.
- Dwiyanto, A., M.S. Latief, A.H. Hadna, dan R.N. Arfani (2003). *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit PSKK.

- Due, J. F. (1994). *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*, Edisi 7. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Garvin, D. A. (2000). *Learning in Action. A guide to putting the learning organization to work*. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi III. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Grant, S. and Young, R. (2010). Concepts and Standardization in Areas Relating to Competence. *International Journal of IT Standards and Standardization Research*.
- Griffin, W. E. B. (2002). *The Fighting Agents*. New York: G. P. Putnam's and Sons.
- Grover, V. (2005). The Effects of Outcome Accountability Pressure on Budgetary Slack: An Experimental Investigation. *Journal of Accounting Research* (Spring): 59-77.
- Gujarati, Damodar N. (2009). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 3. Jakarta : Erlangga.
- Gupta, S., Bornhorst, F. and Thornton, J. (2008). *Natural Resource Endowments, Governance, and the Domestic Revenue Effort: Evidence from a Panel of Countries*. Washington D.C. : IMF Working Paper.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Hagen, Von, (2005). Political Economy of Fiscal Institutions, *Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESY*.
- Hanson, D.R., and Mowen, M.M. (2003). *Management Accounting*, 6th Canadian edition. Ontario : Nelson College Indigenous.
- Hanson, D.R., dan M.M. Mowen. (2004). *Akuntansi Manajemen*, Edisi 7, Jilid 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Heene, A. & Hamel, G., (Eds.). (2011). *Competence-Based Competition*. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Hitt, M.A, Hoskinson and Ireland, (2007). *Competing for Advantage*, 2 edition. Ohio : South-Western College Pub.
- Ivancevich, J. M., Konopaske, R., Matteson, M.T. (2008). *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jilid 1, Edisi 7. Jakarta : Erlangga.
- Kaplan, R. S. and Norton, D.P. (2004). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.

- Kaho, J. R. (2005), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Edisi I Cetakan 8. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kennis, I. (2006). Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance". in *Handbook of Management Accounting Research: 321-324*.
- Lo, Hing-Po dan Wang, Y, (2003). Customer-focused performance and the dynamic model for competence building and leveraging: A resource-based view, *Journal of Management Development*, Vol. 22 Iss: 6, pp.483 – 526.
- Luthans, F. (2010). *Organizational behavior* 12th edition. Boston, Mass.: Irwin/McGraw-Hill.
- Mahi, R. et al. (2001). Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth. Jakarta : *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol 2, No. 1, Juli 2001.
- Mahmudi, (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Meyer, M.H. and Utterback, J.M. (2006). The Product Family and the Dynamics of Core Capability, *Sloan Management Review on Software Evolution and Feedback: Theory and Practice*, Vol. 34, No. 3, Spring, pp. 29-47.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Marquardt, M. J. (2011). *Building the Learning Organization: Achieving Strategic Advantage through a Commitment to Learning*, 3rd edition. London : Nicholas Brealey Publishing.
- Musgrave, R. & Musgrave, P.B. (2004). *Public Finance in Theory & Practice*, 5th edition. New Delhi : Tata McGraw Hill.
- Musgrave, R. A. and Musgrave, P. B. (2007). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi V. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Narbuko, C. dan Achmadi, A. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Narver J.C. and Slater, S.F. (2006). The effect of a market orientation on business profitability, *Journal of Marketing on CIM Coursebook 06/07 Managing Marketing Performance*, Vol. 54, October, pp. 20-35.
- Nasution, Anwar (2009) Mendorong Terciptanya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/ Daerah diambil 7 April 2011, dari situs World Wide Web <http://www.pelita-indonesia.com/bernardsimamora/Otonomi-Dekonsentrasi/banyak-kelemahan-pengelolaan-keuangan.html>).
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Prahalad C.K. dan Hamel, G. (2010). *Strategic intent*. Boston, Mass.: Harvard Business Press.
- Ridwan, (2007). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Sagbas, I. & Saruc, T. (2008). The Surge Impact of the Flypaper, Substitution and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey, *International Research Journal of Finance and Economics*, issue 13, pp.42-49.
- Samuels, D. (2000). Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary checks and balances in presidential systems. University of Minnesota, *Working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May*.
- Santoso, Singgih. (2009). *Mastering SPSS 18*. Jakarta : Elex Media.
- Sekaran, U. and Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*. 5 Edition. New York : John Wiley & Sons.
- Siagian, S. P. (2004). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sidik, M. (2002). Desentralisasi Fiskal, Kebijakan, Implementasi dan Pandangan ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah disajikan pada *Seminar Nasional, 20 April 2002*. Yogyakarta.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah Disampaikan pada *Acara Wisuda XXI STIA LAN, 10 April 2002*. Bandung.
- Sidik, M. (2002a). Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Kedepan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Makalah Disampaikan pada *Seminar Nasional: Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, 20 April 2002*. Jakarta.
- Sidik, M. Hidayanto, Djoko., Ismail, Tjip., Kadjatmiko., Pakpahan, Arlen Tobana., Adriansyah, (2004). *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

- Sidik, M. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization*. London: Crown Business Random House.
- Sugianto, (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta : Grasindo.
- Subrata, A. (2008). *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : tesis Maksi UGM.
- Sulaiman, Wahid. (2004). *Analisis-Analisis Regresi menggunakan SPSS*. Yogyakarta : ANDI.
- Tax S.S., B.S.W. and Chandrashekar M. (2008). Customer Evaluations of Service Complaint Experiences: Implications for Relationship Marketing, *Journal of Marketing*, vol 62, no April, pp 60-76.
- Tuasikal, Askam. (2007). Pengaruh pemahaman sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 08, No.01. Februari 2007.
- Andreassen, T.W. (2005). Satisfaction, Loyalty and Reputation as Indicators of Customer Orientation in the Public Sector, *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 7 Iss: 2, pp.16 – 34.
- Tuominen, M., MoÈller, K. and Rajala, A. (2006). Marketing capability: a nexus of learning-based resources and a prerequisite for market orientation, *26 EMAC Conference*, Warwick, pp. 1220-40.
- Umar, H. (2002). *Metode Riset Bisnis : Panduan Mahasiswa Untuk Melaksanakan Riset dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Verbeeten, F.H.M. (2008). Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 21 Iss: 3, pp.427 – 454.
- Widjaja, H.A.W. (2004). *Penyelenggaraan otonomi Di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Made Arya (2010). *Kebijakan Penganggaran yang Berbasis Kinerja*. Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Yahya, M.N., Ahmad, N. Nik., Fatima., A. Hamid, (2008). Budgetary participation and performance : some Malaysian evidence, *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 21 Iss: 6, pp. 658 – 673.

Dokumen :

- Republik Indonesia, 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.



Frequency Table

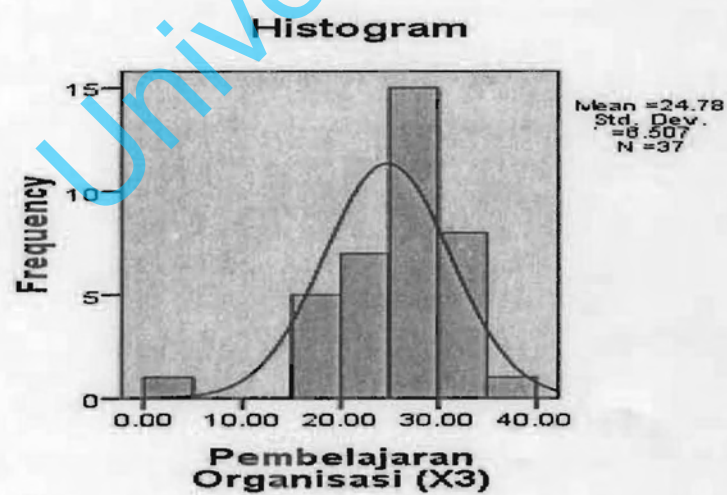
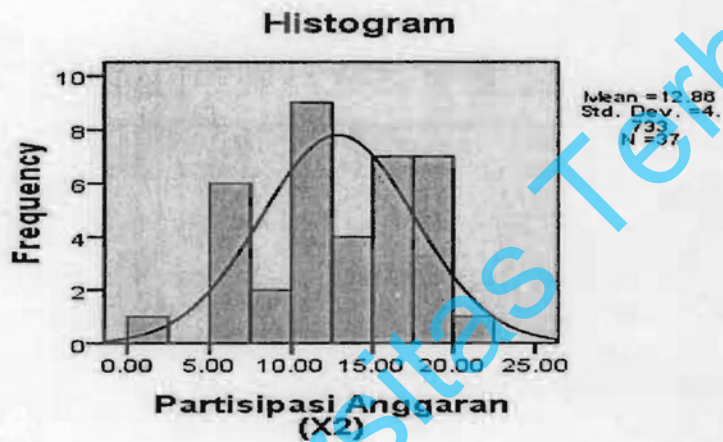
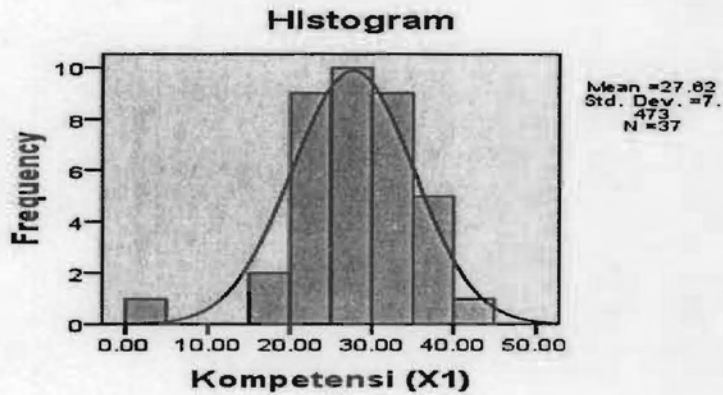
Kompetensi (X1)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	2.7	2.7	2.7
	16	1	2.7	2.7	5.4
	17	1	2.7	2.7	8.1
	20	1	2.7	2.7	10.8
	21	1	2.7	2.7	13.5
	23	1	2.7	2.7	16.2
	24	6	16.2	16.2	32.4
	25	1	2.7	2.7	35.1
	26	2	5.4	5.4	40.5
	27	2	5.4	5.4	45.9
	28	5	13.5	13.5	59.5
	30	2	5.4	5.4	64.9
	31	1	2.7	2.7	67.6
	32	5	13.5	13.5	81.1
	34	1	2.7	2.7	83.8
	36	4	10.8	10.8	94.6
	38	1	2.7	2.7	97.3
	43	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

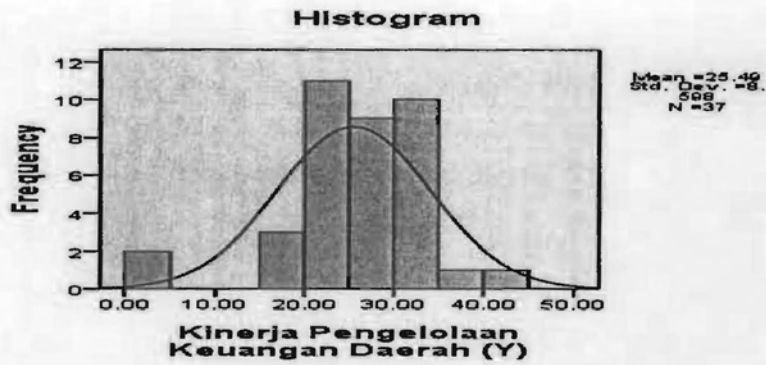
Partisipasi Anggaran (X2)					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	1	2.7	2.7	2.7
	6	2	5.4	5.4	8.1
	7	4	10.8	10.8	18.9
	9	2	5.4	5.4	24.3
	10	1	2.7	2.7	27.0
	11	2	5.4	5.4	32.4
	12	6	16.2	16.2	48.6
	13	4	10.8	10.8	59.5
	15	2	5.4	5.4	64.9
	16	2	5.4	5.4	70.3
	17	3	8.1	8.1	78.4
	18	6	16.2	16.2	94.6
	19	1	2.7	2.7	97.3
	22	1	2.7	2.7	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Pembelajaran Organisasi (X3)				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	1	2.7	2.7	2.7
15	1	2.7	2.7	5.4
18	1	2.7	2.7	8.1
17	1	2.7	2.7	10.8
18	1	2.7	2.7	13.5
18	1	2.7	2.7	16.2
20	3	8.1	8.1	24.3
21	1	2.7	2.7	27.0
23	2	5.4	5.4	32.4
24	1	2.7	2.7	35.1
25	5	13.5	13.5	48.6
26	3	8.1	8.1	56.8
27	2	5.4	5.4	62.2
28	2	5.4	5.4	67.6
29	3	8.1	8.1	75.7
30	6	16.2	16.2	91.9
31	1	2.7	2.7	94.6
33	1	2.7	2.7	97.3
37	1	2.7	2.7	100.0
Total	37	100.0	100.0	

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	2	5.4	5.4	5.4
16	2	5.4	5.4	10.8
18	1	2.7	2.7	13.5
20	2	5.4	5.4	18.9
21	1	2.7	2.7	21.6
22	5	13.5	13.5	35.1
23	3	8.1	8.1	43.2
25	1	2.7	2.7	45.9
27	2	5.4	5.4	51.4
28	4	10.8	10.8	62.2
29	2	5.4	5.4	67.6
31	2	5.4	5.4	73.0
32	1	2.7	2.7	75.7
33	6	16.2	16.2	91.9
34	1	2.7	2.7	94.6
35	1	2.7	2.7	97.3
43	1	2.7	2.7	100.0
Total	37	100.0	100.0	

Histogram





Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	37	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	37	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.956	.957	12

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P1	2.4865	.89208	37
P2	2.6486	.82382	37
P3	2.4324	.72803	37
P4	2.1892	.73929	37
P5	2.2432	.72286	37
P6	2.2703	.87078	37
P7	2.2973	.77692	37
P8	2.5405	.64956	37
P9	2.1892	.65988	37
P10	2.1351	.75138	37
P11	2.1081	.77401	37
P12	2.0811	.86212	37

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
P1	1.000	.600	.618	.684	.590	.605	.653	.635	.644	.564	.677	.724
P2	.600	1.000	.538	.614	.521	.562	.472	.521	.586	.528	.584	.511
P3	.618	.538	1.000	.721	.692	.643	.699	.491	.750	.550	.605	.606
P4	.684	.614	.721	1.000	.743	.738	.722	.533	.779	.703	.886	.673
P5	.590	.521	.692	.743	1.000	.775	.758	.481	.774	.756	.746	.636
P6	.605	.562	.643	.738	.775	1.000	.740	.422	.827	.707	.739	.636
P7	.653	.472	.699	.722	.758	.740	1.000	.608	.754	.691	.730	.585
P8	.635	.521	.491	.533	.481	.422	.608	1.000	.532	.529	.599	.465
P9	.644	.586	.750	.779	.774	.827	.754	.532	1.000	.731	.775	.754
P10	.564	.528	.550	.703	.756	.707	.691	.529	.731	1.000	.834	.712
P11	.677	.584	.605	.886	.746	.739	.730	.599	.775	.834	1.000	.777
P12	.724	.511	.606	.673	.636	.636	.585	.465	.754	.712	.777	1.000

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	25.1351	48.009	.768	.718	.953
P2	24.9730	47.749	.652	.507	.957
P3	25.1892	47.713	.757	.704	.954
P4	25.4324	46.586	.864	.871	.950
P5	25.3784	47.131	.826	.746	.952
P6	25.3514	45.512	.816	.771	.952
P7	25.3243	46.814	.814	.751	.952
P8	25.0811	49.888	.627	.578	.957
P9	25.4324	47.419	.880	.831	.950
P10	25.4865	46.979	.807	.770	.952
P11	25.5135	45.979	.884	.911	.950
P12	25.5405	46.033	.776	.780	.953

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27.6216	55.853	7.47348	12

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

		N	%
Cases	Valid	37	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	37	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.940	.944	6

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P1	2.2432	.86299	37
P2	2.0270	.76327	37
P3	1.9189	.75933	37
P4	2.1081	1.10010	37
P5	2.2432	.95468	37
P6	2.3243	.91451	37

Inter-Item Correlation Matrix						
	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	1.000	.749	.836	.732	.702	.672
P2	.749	1.000	.867	.658	.677	.703
P3	.836	.867	1.000	.709	.718	.719
P4	.732	.658	.709	1.000	.821	.627
P5	.702	.677	.718	.821	1.000	.893
P6	.672	.703	.719	.627	.893	1.000

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	10.6216	15.964	.825	.743	.928
P2	10.8378	16.751	.811	.770	.931
P3	10.9459	16.497	.863	.838	.925
P4	10.7568	14.523	.795	.807	.936
P5	10.6216	15.020	.874	.915	.921
P6	10.5405	15.700	.809	.872	.929

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
12.8649	22.398	4.73264	6

Reliability**Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	37	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	37	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.935	.937	10

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P1	2.3243	.78365	37
P2	2.4324	.80071	37
P3	2.3243	.74737	37
P4	2.4054	.79790	37
P5	2.5405	.86905	37
P6	2.4865	.83738	37
P7	2.6486	.88870	37
P8	2.8919	.69856	37
P9	2.3784	1.00971	37
P10	2.3514	.71555	37

Inter-Item Correlation Matrix										
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
P1	1.000	.833	.622	.539	.633	.642	.607	.624	.613	.584
P2	.833	1.000	.641	.588	.653	.548	.571	.583	.514	.552
P3	.622	.641	1.000	.658	.578	.495	.469	.654	.679	.820
P4	.539	.588	.658	1.000	.516	.653	.598	.729	.666	.473
P5	.633	.653	.578	.516	1.000	.583	.828	.511	.457	.535
P6	.642	.548	.495	.653	.583	1.000	.535	.662	.598	.495
P7	.607	.571	.469	.598	.828	.535	1.000	.608	.462	.462
P8	.624	.583	.654	.729	.511	.662	.608	1.000	.650	.634
P9	.613	.514	.679	.666	.457	.598	.462	.650	1.000	.618
P10	.584	.552	.820	.473	.535	.495	.462	.634	.618	1.000

Item-Total Statistics					
	Scale Mean If Item Deleted	Scale Variance If Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha If Item Deleted
P1	22.4595	34.422	.794	.794	.926
P2	22.3514	34.568	.757	.766	.927
P3	22.4595	34.922	.777	.820	.927
P4	22.3784	34.631	.753	.758	.928
P5	22.2432	34.134	.734	.806	.929
P6	22.2973	34.548	.720	.655	.929
P7	22.1351	34.176	.710	.797	.930
P8	21.8919	35.321	.787	.705	.927
P9	22.4054	32.970	.720	.626	.931
P10	22.4324	35.752	.710	.743	.930

Scale Statistics			
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24.7838	42.341	6.50698	10

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	37	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	37	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.964	.966	11

Item Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P1	2.5135	1.09599	37
P2	2.6216	.95310	37
P3	2.2703	.83827	37
P4	2.1892	.87679	37
P5	2.0541	.91122	37
P6	2.2432	.89460	37
P7	2.2703	.93240	37
P8	2.2973	.90875	37
P9	2.4054	.83198	37
P10	2.3243	.86362	37
P11	2.2973	.87765	37

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
P1	1.000	.803	.691	.561	.556	.436	.567	.595	.436	.569	.559
P2	.803	1.000	.792	.653	.472	.534	.558	.550	.584	.579	.570
P3	.691	.792	1.000	.798	.708	.762	.721	.730	.715	.741	.718
P4	.561	.653	.798	1.000	.786	.754	.819	.799	.730	.815	.755
P5	.556	.472	.708	.786	1.000	.733	.800	.852	.776	.840	.813
P6	.436	.534	.762	.754	.733	1.000	.752	.763	.834	.811	.754
P7	.567	.556	.721	.819	.800	.752	1.000	.952	.786	.767	.816
P8	.595	.550	.730	.799	.852	.763	.952	1.000	.828	.845	.861
P9	.436	.584	.715	.730	.776	.834	.786	.828	1.000	.874	.819
P10	.569	.579	.741	.815	.840	.811	.767	.845	.874	1.000	.875
P11	.559	.570	.718	.755	.813	.754	.816	.861	.819	.875	1.000

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	22.9730	61.416	.658	.826	.967
P2	22.8649	62.453	.701	.868	.964
P3	23.2162	61.896	.859	.824	.959
P4	23.2973	61.270	.866	.859	.959
P5	23.4324	61.030	.847	.829	.960
P6	23.2432	61.634	.818	.788	.961
P7	23.2162	60.396	.873	.938	.959
P8	23.1892	60.324	.905	.948	.958
P9	23.0811	62.077	.851	.895	.960
P10	23.1622	60.806	.895	.914	.958
P11	23.1892	61.158	.874	.829	.959

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.4865	73.923	8.59787	11

Regression

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kompetensi (X1) ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.807 ^a	.652	.642	5.14412	1.811

a. Predictors: (Constant), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1735.074	1	1735.074	65.569	.000 ^a
	Residual	926.170	35	26.462		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.172	3.280		-.053	.958		
	Kompetensi (X1)	.929	.115	.807	8.097	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

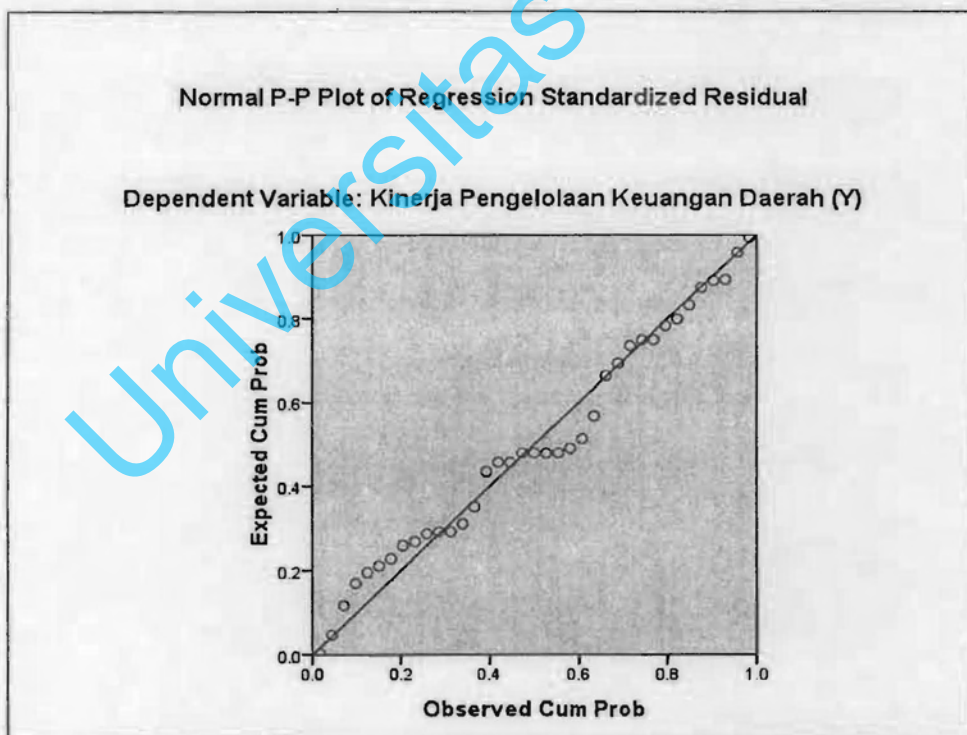
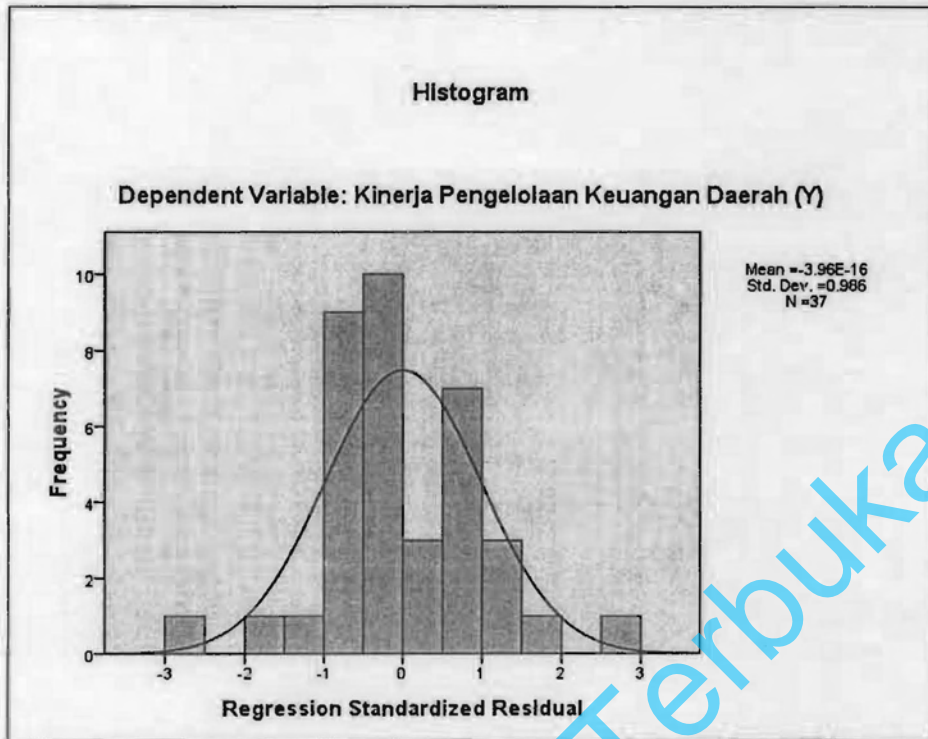
Collinearity Diagnostics ^a					
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Kompetensi (X1)
1	1	1.966	1.000	.02	.02
	2	.034	7.625	.98	.98

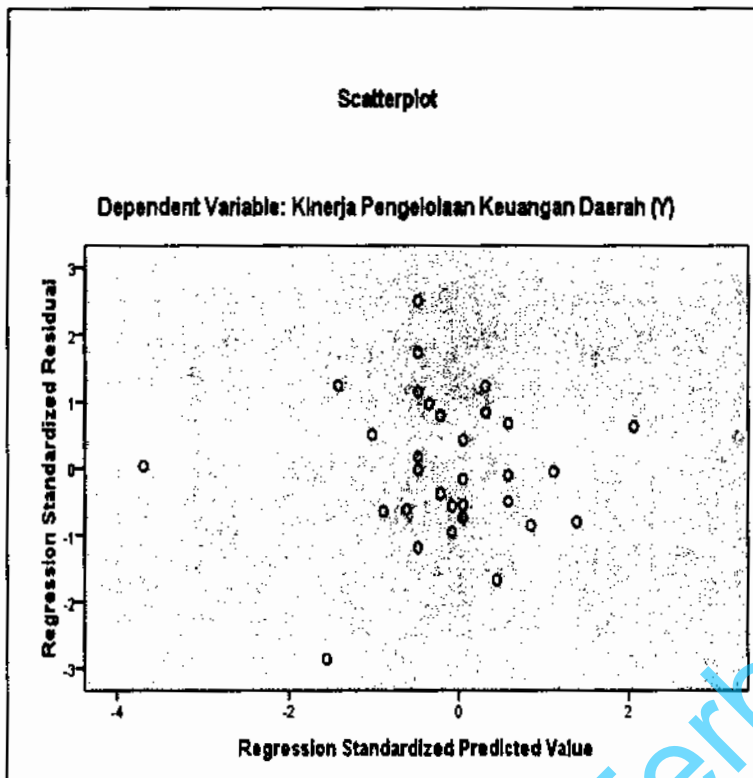
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-.1722	39.7720	25.4865	6.94237	37
Residual	-1.4690E1	12.87776	.00000	5.07217	37
Std. Predicted Value	-3.696	2.058	.000	1.000	37
Std. Residual	-2.856	2.503	.000	.986	37

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Charts





Regression

Variables Entered/Removed ^b			
Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Anggaran (X2) ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Model Summary ^b					
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.814 ^a	.663	.653	5.06477	2.297

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran (X2)

b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1763.428	1	1763.428	68.745	.000 ^b
	Residual	897.815	35	25.652		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran (X2)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.461	2.441		2.647	.012		
	Partisipasi Anggaran (X2)	1.479	.178	.814	8.291	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

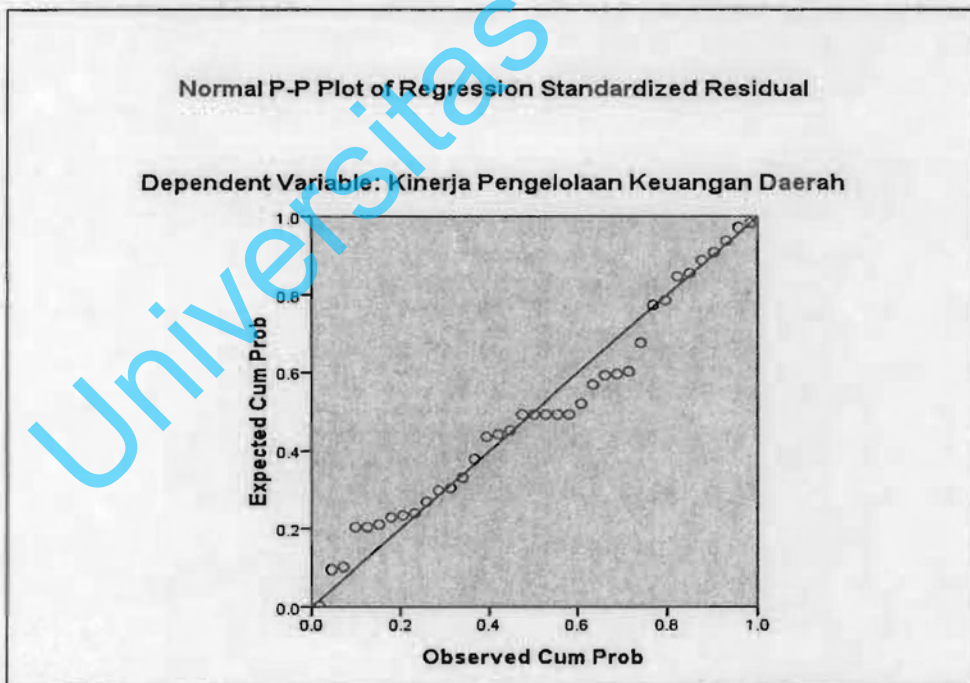
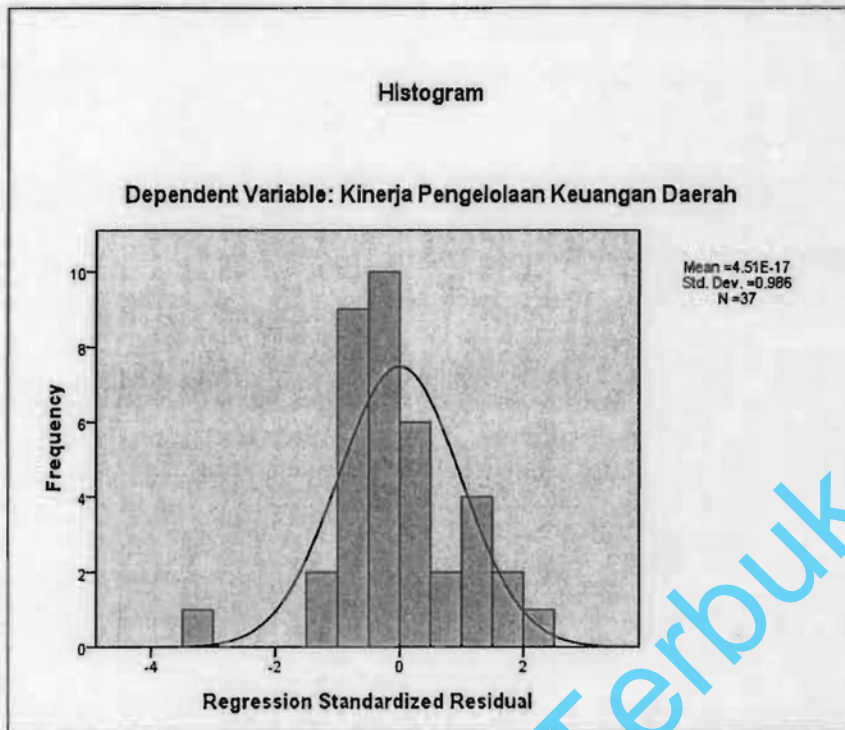
Collinearity Diagnostics ^a					
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Partisipasi Anggaran (X2)
1	1	1.940	1.000	.03	.03
	2	.060	5.687	.97	.97

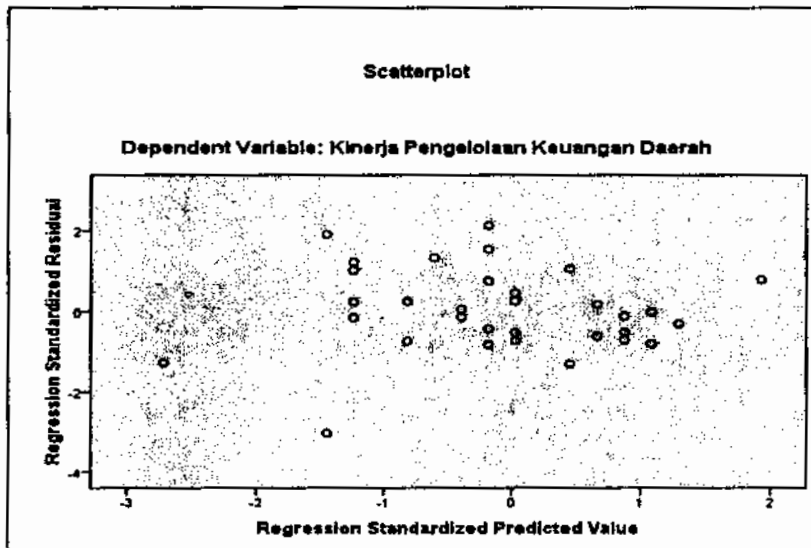
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	6.4613	38.9960	25.4865	6.99887	37
Residual	-1.5334E1	10.79252	.00000	4.99393	37
Std. Predicted Value	-2.718	1.930	.000	1.000	37
Std. Residual	-3.028	2.131	.000	.986	37

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Charts





Regression

Variables Entered/Removed ^b			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembelajaran Organisasi (X3) ^a		Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.819 ^a	.671	.662	5.00108	2.018

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1785.867	1	1785.867	71.404	.000 ^a
	Residual	875.377	35	25.011		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.340	3.279		-.409	.685		
	Pembelajaran Organisasi (X3)	1.082	.128	.819	8.450	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

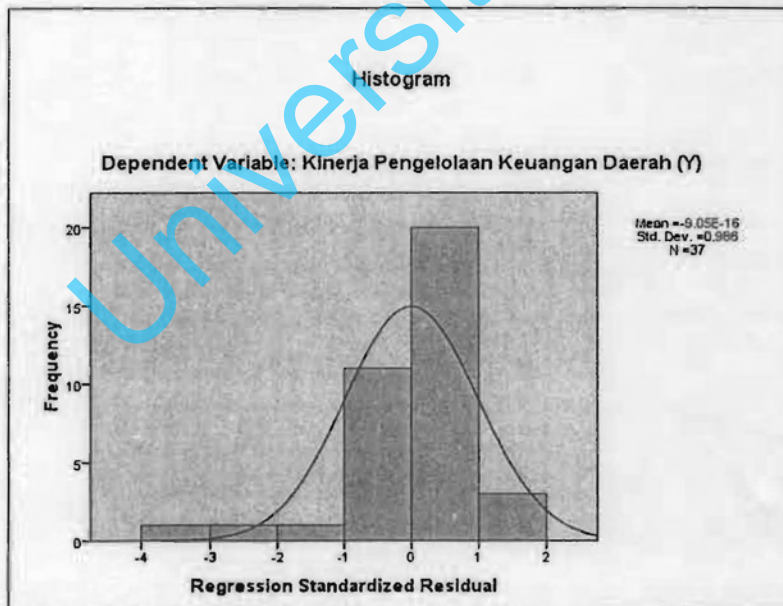
Collinearity Diagnostics ^a					
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Pembelajaran Organisasi (X3)
1	1	1.968	1.000	.02	.02
	2	.032	7.850	.98	.98

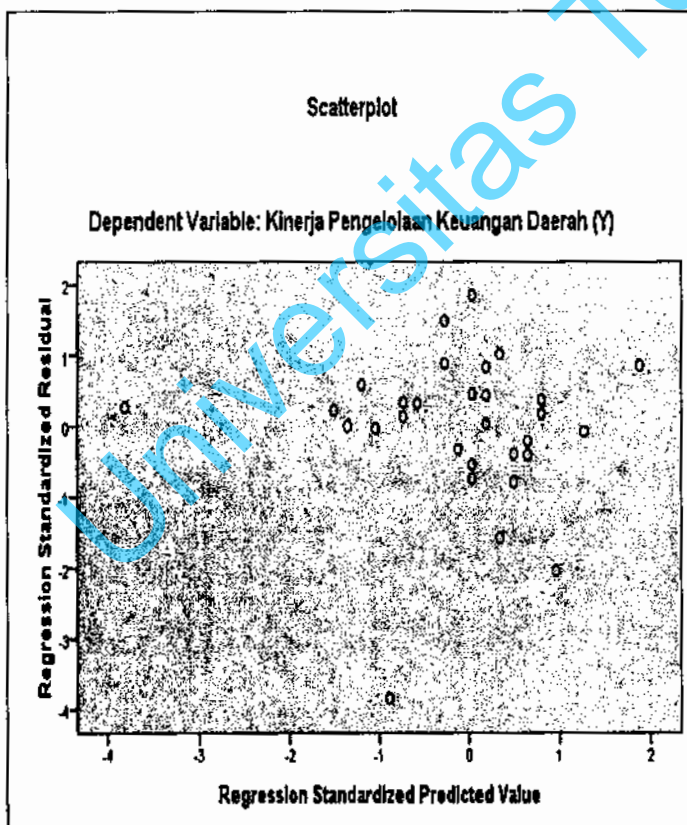
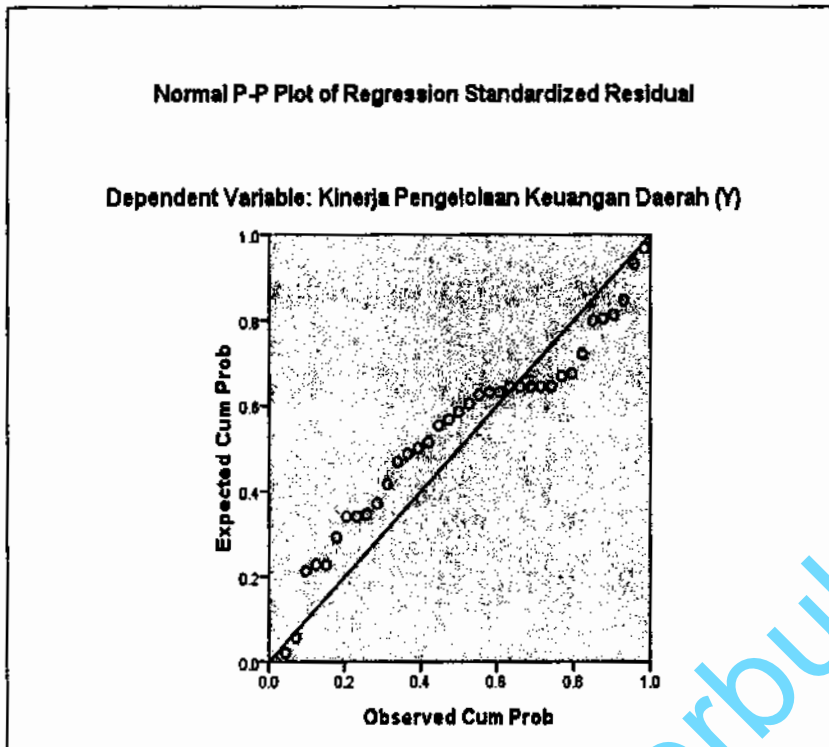
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-1.3398	38.7095	25.4865	7.04325	37
Residual	-1.9226E1	9.27948	.00000	4.93113	37
Std. Predicted Value	-3.809	1.877	.000	1.000	37
Std. Residual	-3.844	1.855	.000	.986	37

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Charts





Regression

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembelajaran Organisasi (X3), Partisipasi Anggaran (X2), Kompetensi (X1) ^a		Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.896 ^a	.802	.784	3.99673	1.843

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3), Partisipasi Anggaran (X2), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2134.105	3	711.368	44.533	.000 ^a
	Residual	527.138	33	15.974		
	Total	2661.243	36			

a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Organisasi (X3), Partisipasi Anggaran (X2), Kompetensi (X1)
b. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.536	2.745		-.924	.362		
	Kompetensi (X1)	.109	.187	.095	.582	.565	.227	4.399
	Partisipasi Anggaran (X2)	.790	.240	.435	3.298	.002	.345	2.896
	Pembelajaran Organisasi (X3)	.599	.170	.454	3.530	.001	.363	2.751

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

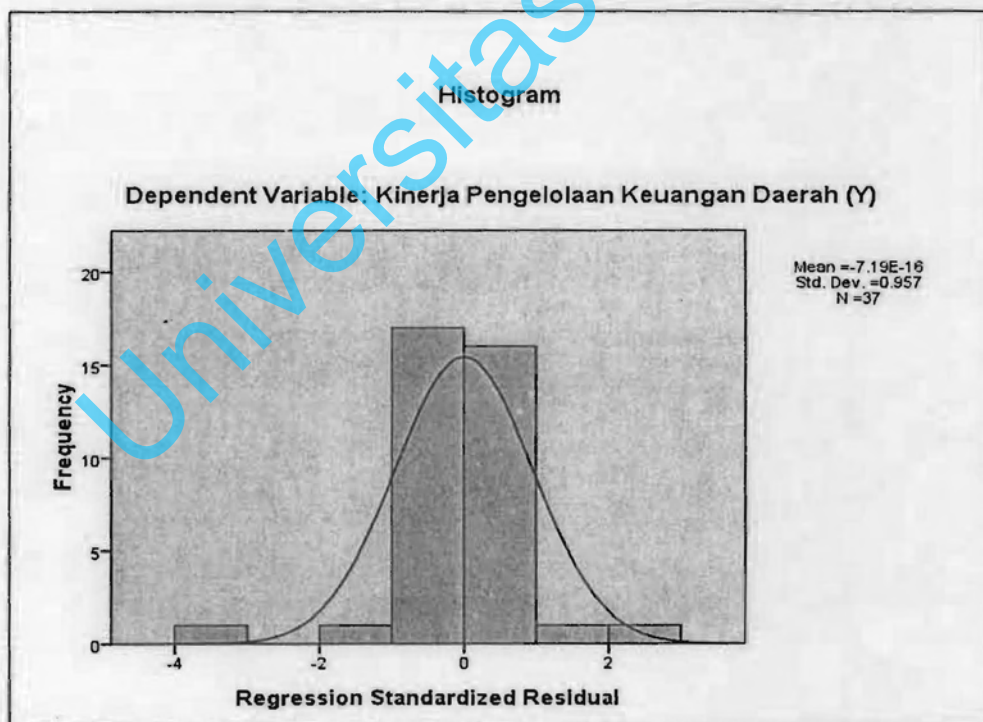
Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Kompetensi (X1)	Partisipasi Anggaran (X2)	Pembelajaran Organisasi (X3)
1	1	3.904	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.061	7.976	.52	.01	.27	.00
	3	.024	12.723	.46	.03	.42	.48
	4	.011	19.183	.02	.96	.30	.52

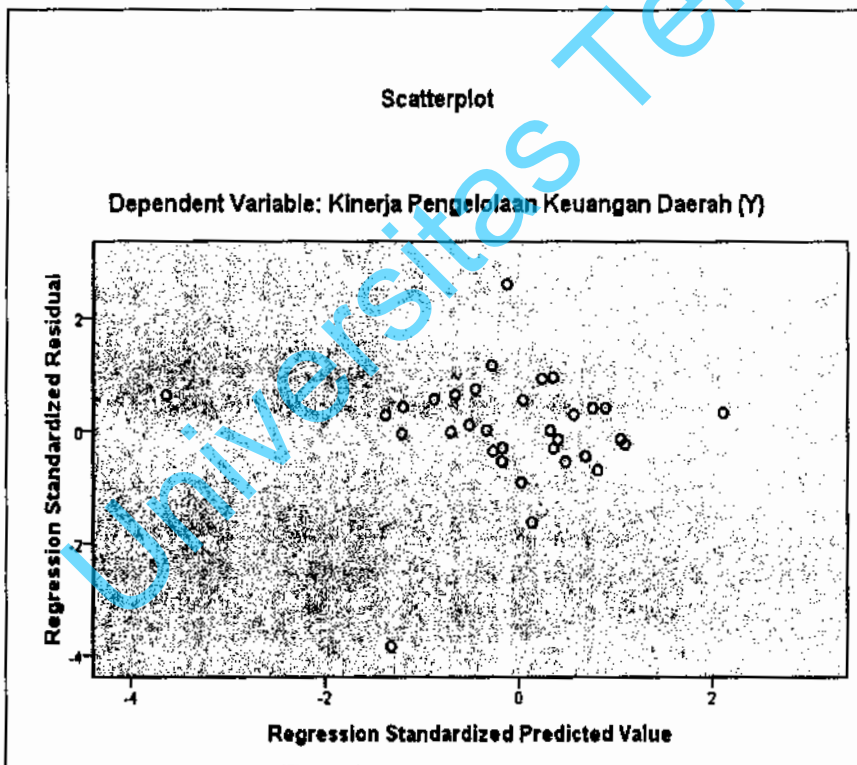
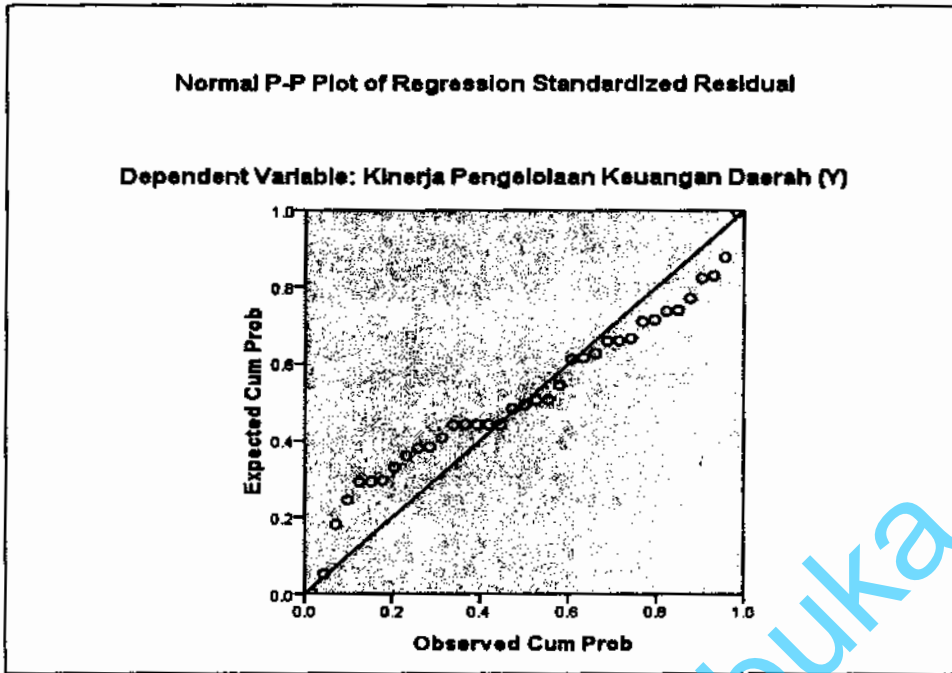
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-2.5360	41.6981	25.4865	7.69940	37
Residual	-1.5332E1	10.46097	.00000	3.82658	37
Std. Predicted Value	-3.640	2.106	.000	1.000	37
Std. Residual	-3.836	2.617	.000	.957	37

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Charts







Program Studi Magister Manajemen
Universitas Terbuka Jakarta UPBJJ Pangkalpinang

Muntok, 20 April 2011

Hal : Permohonan untuk menjadi responden

Bapak/Ibu Responden yang terhormat,

Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan, bersama ini dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner penelitian tersebut yang berkaitan dengan **Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Anggaran, dan Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat.**

Informasi yang saya dapatkan akan dijaga kerahasiaannya serta penggunaannya semata hanya untuk penelitian yang saya lakukan. Hal ini mengacu pada etika penelitian, dimana kemudian informasi tersebut akan dianalisa dan disajikan dalam bentuk keseluruhan dan bukan dalam bentuk individual.

Saya berharap agar kuisisioner tersebut dapat saya terima dalam waktu yang tidak begitu lama. Karena tanpa adanya partisipasi dari Bapak/Ibu, tentunya tesis saya akan terlalu sulit untuk diselesaikan. Keberhasilan dan kesuksesan hasil penelitian ini sangat tergantung dari hasil pengisian dan pengembalian kuisisioner ini tepat pada waktunya.

Terimakasih atas perhatian dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan kepada saya.

Hormat Saya,

M. Zuchri Satriyo

NIM. 016093323

**DAFTAR PERTANYAAN/KUESIONER KEPADA PNS DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN
BANGKA BARAT**

Nama Responden : (optional).....
 Gender :
 Usia :
 Pendidikan Terakhir
 dan Latar Belakang
 Pendidikan :
 Masa Kerja :
 Pangkat/ Gol/Jabatan :

Keterangan :

- a. Kejujuran Bapak/Ibu sangat dalam pengisian angket / kuesioner ini sangat berharga bagi kami. Jawaban yang diisikan tidak mempunyai pengaruh terhadap karier Bapak/Ibu kedepan, karena ini hanya merupakan penelitian ilmiah dilingkungan pendidikan.
- b. Kerahasiaan hasil pengisian angket ini kami junjung tinggi.
- c. Cara pengisian angket ini adalah dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan memberikan tanda silang (v) pada kolom yang disediakan.
- d. Peranan Bapak/ Ibu dalam pengisian angket secara lengkap dan benar serta pengembalian sesuai dengan waktu yang disiapkan dapat menunjang terselesaikannya penelitian ilmiah ini.
- e. Pernyataan-pernyataan yang diajukan berhubungan erat dengan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Bapak/Ibu pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bangka Barat.
- f. Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terima kasih.

Pernyataan dibawah ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keterampilan teknis yang Saudara miliki dalam menjalankan tugas – tugas / pekerjaan (di kantor Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat). Untuk itu, tentukanlah pilihan jawaban sesuai dengan pengetahuan, keahlian, latar belakang dan tingkat pendidikan serta pengalaman Saudara selama bertugas di Dinas PPKA Kabupaten Bangka Barat. Berilah tanda (v) pada kolom jawaban yang menjadi pilihan Saudara.

Tabel 2.4
Kompetensi Teknis (X1)

Variabel	Dimensi	Pernyataan	Pilihan Jawaban/ skor*)			
			4	3	2	1
		Menurut pendapat saya.....				
Kompetensi teknis	Penguasaan bidang pekerjaan	1. Pengetahuan dan penguasaan saya tentang peraturan perundang – undangan saat ini ada pada tingkat).....				
		2. Pengetahuan dan penguasaan saya tentang sumber pendapatan daerah saat ini ada pada tingkat.....				
		3. Pengetahuan dan keterampilan saya tentang upaya peningkatan pendapatan daerah saat ini ada pada tingkat.....				
		4. Pengetahuan saya tentang realisasi pendapatan daerah pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber PAD lainnya saat ini ada pada tingkat.....				
		5. Keterampilan saya di bidang pengelolaan pendapatan daerah saat ini ada pada tingkat.....				
		6. Keterampilan saya di bidang penyusunan laporan pendapatan daerah saat ini ada pada tingkat.....				
		7. Pengetahuan dan keterampilan saya tentang teknik dan prosedur pendapatan daerah saat ini ada pada tingkat.....				
	Keterampilan teknis	8. Pengetahuan dan keterampilan saya dalam pelaksanaan fungsi manajemen dalam pekerjaan ada pada tingkat.....				
		9. Pengetahuan dan keterampilan saya dalam pelaksanaan teknis pekerjaan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ada pada tingkat.....				

	Penguasaan teknologi	10.	Pengetahuan dan penguasaan saya dalam penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah ada pada tingkat.....				
		11.	Pengetahuan dan penguasaan saya dalam pelaksanaan sistem pelaporan pendapatan daerah pada pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi ada pada tingkat.....				
		12.	Pengetahuan dan penguasaan saya dalam penggunaan sistem pendapatan daerah ada pada tingkat.....				

Pilihan jawaban :

4 = sangat menguasai/ terampil (highly mastered); 3 = cukup menguasai / terampil; 2 = kurang menguasai / kurang terampil; 1 = tidak menguasai / tidak terampil.

Tabel 2.5
Partisipasi Anggaran (X₂)

Variabel	Dimensi	Pernyataan	Pilihan Jawaban/ skor*)				
			4	3	2	1	
		Menurut pendapat saya.....					
Partisipasi anggaran	Keikutsertaan dalam proses penyusunan anggaran	13.	Peranan saya dalam proses penganggaran pendapatan pada APBD adalah				
		14.	Peranan saya dalam upaya peningkatan insentif dari pendapatan adalah				
		15.	Peranan saya dalam proses <i>Budgetary Slack</i> anggaran pendapatan adalah.....				
	Penentuan sasaran pelaksanaan anggaran	16.	Peranan saya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui anggaran.....				
		17.	Peranan saya dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan pada APBD.....				
		18.	Peranan saya melibatkan diri secara tidak langsung dalam proses pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan pada APBD.....				

***) 4 = sangat partisipatif; 3 = cukup partisipatif; 2 = kurang partisipatif; 1 = tidak partisipatif.**

Tabel 2.6
Pembelajaran Organisasi (X₃)

Variabel	Dimensi	Pernyataan	Pilihan Jawaban/ skor*)			
			4	3	2	1
Pembelajaran organisasi	Sistem berfikir	19. Kemampuan saya dalam meningkatkan pendapatan daerah ada pada tingkat.....				
		20. Kemampuan saya dalam proses penatausahaan pendapatan daerah ada pada tingkat.....				
		21. Kemampuan saya menguasai landasan pemikiran akuntansi dan manajemen keuangan dalam proses pengelolaan pendapatan daerah ada pada tingkat.....				
	Kinerja	22. Kemampuan saya mengapresiasi sistem pengalokasian waktu ada pada tingkat.....				
		23. Kemampuan saya melibatkan diri dalam setiap keputusan ada pada tingkat.....				
		24. Kemampuan saya dalam berprestasi secara individual ada pada tingkat.....				
		25. Menerapkan pendekatan pola aktivitas dalam tugas ada pada tingkat.....				
	Profesionalitas	26. Profesionalisme dalam tugas				
		27. Keterampilan dalam proses pengelolaan keuangan daerah ada pada tingkat.....				
		28. Menerapkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah ada pada tingkat.....				

*) 4 = sangat mampu; 3 = cukup mampu; 2 = kurang mampu; 1 = tidak mampu.

Tabel 2.7
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Variabel	Dimensi	Pernyataan	Pilihan Jawaban/ skor*)			
			4	3	2	1
		Tugas dan tanggungjawab saya dalam				
Kinerja pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan pendapatan daerah	29. Proses perencanaan pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang				
		30. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang sesuai prosedur.....				
		31. Penguasaan saya dalam manajemen perencanaan pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang.....				
		32. Penguasaan saya dalam bidang akuntansi perencanaan pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang.....				
	Penatausahaan pendapatan daerah	33. Tugas dan tanggung jawab saya dalam pelaksanaan realisasi dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan sumber pendapatan daerah lainnya menunjukkan kinerja yang.....				
		34. Tugas dan tanggungjawab saya dalam pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang				
		35. Tugas dan tanggungjawab saya dalam proses akuntansi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang.....				
		36. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab saya dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang sudah sesuai prosedur.....				
	Pertanggung-jawaban keuangan daerah	37. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana pendapatan daerah yang sudah saya kerjakan menunjukkan kinerja yang.....				
		38. Penguasaan manajemen keuangan yang sudah saya aktualisasikan menunjukkan kinerja yang.....				
		39. Penguasaan akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pendapatan daerah yang sudah saya laksanakan menunjukkan kinerja yang.....				

*) 4 = baik; 3 = cukup; 2 = sedang/kurang; 1 = buruk.

DAFTAR ISTILAH

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBNKB	= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BPHTB	= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
DABA	= Dana Bantuan
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAK DR	= Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi
DAK NON DR	= Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi
DBH SDA	= Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DINAS PPKA	= Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTPP	= Dana Transfer Pemerintah Provinsi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
PBB	= Pajak Bumi dan Bangunan
PDRB	= Pendapatan Domestik Regional Bruto
PERDA	= Peraturan Daerah
PKB	= Pajak Kendaraan Bermotor
PP	= Peraturan Pemerintah
PPh	= Pajak Penghasilan
SKPD	= Satuan Kerja Perangkat Daerah
SILPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
S1	= Strata Satu
S2	= Strata Dua
S3	= Strata Tiga
T.A.	= Tahun Anggaran
UU	= Undang - undang
UUD 1945	= Undang – Undang Dasar 1945